



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 35 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/795/21 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1820 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2015 Nomor 19) ;
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 035 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 69);

11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 71);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2016.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau disingkat RKP adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disingkat RKPD, adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1(satu) tahun.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu SKPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

**BAB II**  
**PEDOMAN PENYUSUNAN**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati serta mengacu pada RKP Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP Nasional, yang memuat isu strategis pembangunan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, kerangka ekonomi Daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Selatan dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dana lainnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergisme pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah dan antar sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (4) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
  - a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD Tahun 2017;
  - b. Pedoman dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Tahun 2017.

**Pasal 3**

Dalam rangka penyusunan Renja-SKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD Tahun 2017 untuk :

- a. menyusun Rancangan Akhir Renja-SKPD Tahun 2017; dan
- b. sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD Tahun 2017.

**Pasal 4**

Kepala Bappeda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja-SKPD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta tugas pokok dan fungsi SKPD.

**Pasal 5**

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Kepala SKPD melakukan pemantauan;
- b. pagu dana yang tertera dalam RKPD masih bersifat indikatif;
- c. kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD;
- d. kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun sebelumnya;
- e. kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD; dan
- f. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

**Pasal 6**

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 30 Mei 2016

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 30 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

**TTD**

**M. IDEHAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 36**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

  
ZAINI FAHRI  
NIP. 19690314 199503 1 002



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah secara garis besar mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD), serta rencana pembangunan jangka pendek dengan kurun waktu 1 tahun atau disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Terkait dengan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 dan RPJMD Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD Kabupaten) sebagai dokumen resmi rencana daerah, mempunyai kedudukan yang strategis karena merupakan dokumen yang menjembatani antara dari perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

RKPD tersebut secara umum memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun 2015, prioritas pembangunan tahun 2017, kerangka ekonomi makro daerah serta rencana kerja dan pendanaan indikatif untuk tahun 2017, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 disusun melalui pendekatan teknokratis, demokratis dan partisipatif, politis, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Untuk memperoleh dokumen perencanaan yang disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi pemerintah yang saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD dan partisipasi seluruh pelaku dan pemangku kepentingan dalam pembangunan melalui penjangkauan aspirasi masyarakat secara bertahap dengan melaksanakan suatu forum yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten.



RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Renja-SKPD, dan sebagai dasar utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2017.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
21. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran



- Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 – 2025
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014- 2018.
  25. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 19);
  26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
  27. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 -2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018;

### 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan teknis operasional untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025, dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kab. HSS Tahun 2014-2018 dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 -2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyempurnaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman utama dalam



proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan juga digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD. Renja SKPD yang telah disyahkan akan dijadikan pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang nantinya akan dijabarkan dalam R-APBD.

Dalam penyusunan Rancangan Renja-SKPD berpedoman pada Renstra SKPD yang merupakan dokumen rencana pembangunan masing-masing SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renja-SKPD merupakan operasionalisasi RKPD oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Dengan memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten harus memperhatikan RKP Nasional, RPJM Nasional, RKP Provinsi, RPJM Provinsi, RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD dan Renja SKPD. Selain itu, jika dilihat hubungan dari dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten. RKPD Kabupaten tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan tata ruang wilayah.

### **1). RPJM Nasional**

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Awal Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional.

### **2). RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan**

RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada saat ini masih dalam masa transisi, peralihan dari RPJM Daerah yang periode 2010-2015 dan RPJM Daerah 2016-2020 yang sedang dalam masa penyusunan. Berdasarkan RPJMD tersebut pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan yaitu dengan menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2017, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2015 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 bagi Kabupaten/Kota.

### **3). RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

RPJMD Kabuapten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 yang memuat



visi, misi dan program prioritas Bupati terpilih dan rancangan rencana strategis untuk periode perencanaan 5 tahunan.

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 ini merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014-2018.

#### **4). RENJA-SKPD**

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017 sebagai bahan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017. Prinsip-prinsip didalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD Tahun 2017, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD Tahun 2017, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Tahun 2017;
- b. mengacu pada Renstra SKPD tahun 2014-2018, sebagai acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun kedalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- e. memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang kelurahan dan Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantung dalam rancangan awal RKPD.

Dengan adanya keterkaitan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut merupakan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan sinergis antara dokumen perencanaan tingkat nasional,

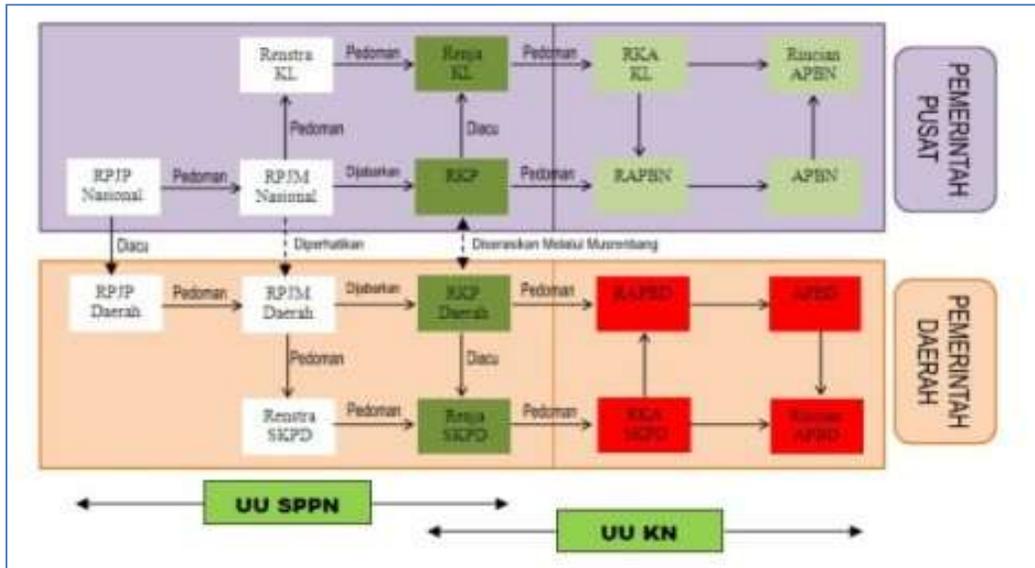


provinsi dan Kabupaten, sehingga capaian sasaran pembangunan nasional dan daerah dapat tercapai.

Berdasarkan uraian diatas keterkaitan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masing-masing gambar dibawah ini

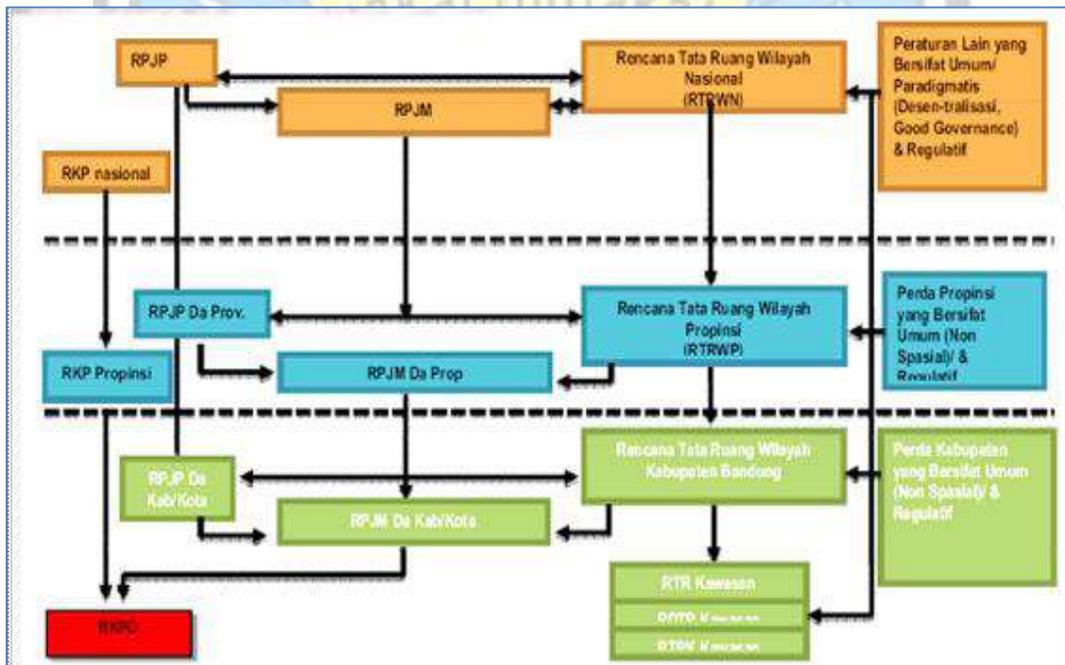
Gambar I . 1

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar I . 2

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Wilayah





## 1.4 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

### BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber - sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan)

### BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

### BAB VI. PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 diperlukan sinergitas yang mantap di jajaran pemerintah Kabupaten



Hulu Sungai Selatan, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

## 1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja-PD; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah :

1. Untuk menjamin adanya keterkaitan dan konstistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.
2. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memberikan strategi pembangunan daerah dan program pembangunan daerah serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama periode 1 (satu) tahun.
3. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan.
5. Menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dan juga bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menentukan program dan kegiatan.
6. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),



serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017.

Sedangkan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2017.
2. Menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017.
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).
5. Tersedianya daftar prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 yang sesuai dengan besaran plafon anggaran yang telah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten
6. Terjaminnya konsistensi antara hasil Musrenbang dengan RKPD dalam penganggaran.
7. Menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
8. Terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## BAB II

### EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

#### 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

##### 2.1.1. ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

###### 2.1.1.1. GEOGRAFIS

###### a. Letak Geografis

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak diantara  $02^{\circ}29'59''\text{LS}$  -  $02^{\circ}56'10''\text{LS}$  dan  $114^{\circ}51'19''\text{BT}$  -  $115^{\circ}36'19''\text{BT}$ . Sedangkan ibukotanya yaitu Kecamatan Kandangan terletak  $2^{\circ}47'\text{LS}$  dan  $115^{\circ}40'\text{BT}$  yang dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 kecamatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara
- Sebelah timur : Kabupaten Banjar dan Kotabaru
- Sebelah selatan : Kabupaten Tapin
- Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak kearah Utara ibu kota Propinsi Kalimantan Selatan dengan jarak 135 Km. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berbatasan di sebelah utara dengan Kab. Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah; di sebelah selatan, Kabupaten Tapin; di sebelah Timur dengan Kab. Banjar, Tanah Bumbu, dan Kotabaru; sebelah Barat dengan Kab. Hulu Sungai Utara dan Kab. Tapin.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan beribukota di Kandangan memiliki 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sebesar 180.494 Ha. Kecamatan Loksado merupakan kecamatan terluas sebesar 338,89 km<sup>2</sup> atau 18,78 persen dan yang paling kecil adalah luas wilayah Kecamatan Telaga Langsat yaitu 3,22 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam tiap-tiap kecamatan terlihat pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten HSS**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2014**

Kecamatan	Luas Wilayah Menurut Kecamatan (Km2)	
	2013	2014
PADANG BATUNG	203.93	203.93
LOKSADO	338.89	338.89
TELAGA LANGSAT	58.08	58.08
ANGKINANG	58.40	58.40
KANDANGAN	106.71	106.71
SUNGAI RAYA	80.96	80.96
SIMPUR	82.35	82.35
KALUMPANG	135.07	135.07
DAHA SELATAN	322.82	322.82
DAHA BARAT	149.62	149.62
DAHA UTARA	268.11	268.11
HULU SUNGAI SELATAN	1804.94	1804.94

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan**



### 1.1 Topografi dan Ketinggian

Secara geologis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari pegunungan-pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang terkadang berawa-rawa, sehingga udaranya terasa dingin dan agak lembab. Salah satu faktor tanah yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembangunan adalah faktor ketinggian tempat dan kemiringan wilayah.

Tinggi suatu tempat adalah tinggi tersebut yang diukur dari permukaan laut. Ketinggian suatu tempat berkaitan dengan naik turunnya temperatur/suhu udara, dimana semakin tinggi suatu tempat suhunya semakin menurun. Begitu pula sebaliknya semakin rendah suatu tempat suhunya akan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena terjadinya proses pemampatan dan perenggangan udara.

Morfologi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di kelas ketinggian 0-7 meter dan di kemiringan 0-2 persen. Geologi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai ketinggian 0-7 meter sebesar 58,3 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan terdapat beberapa daerah yang merupakan dataran tinggi yaitu sebesar 15,3 persen. Daerah dataran tinggi tersebut sebagian besar termasuk dalam jalur barisan pegunungan Meratus.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih merupakan sawah yaitu seluas 47.136 Ha atau 33,17 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di tempat kedua adalah rawa sebesar 46.941 Ha atau 33,03 persen, selebihnya digunakan untuk hutan, perkebunan, perairan darat, padang rumput dan tanah terbuka.

Sesuai dengan konfigurasi medannya, maka wilayah sebelah barat didominasi oleh daerah genangan (rawa) atau persawahan. Daerah ini meliputi Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat, dan sedikit wilayah Kecamatan Kalumpang dan Angkinang. Sedangkan wilayah sebelah timur terutama Kecamatan Loksado umumnya berupa hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman keras (tahunan).

Morfologi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar berada di kelas ketinggian 0 - 7 meter dan di kemiringan 0 - 2 persen. Menurut kelas ketinggian dari permukaan laut 58,3 persen wilayah Kab. HSS berada pada ketinggian 0-7 meter dan hanya 0,9 persen berada pada ketinggian di atas 1.000 meter. Daerah dataran tinggi tersebut sebagian besar termasuk dalam jalur barisan pegunungan Meratus.

Berdasarkan kemiringannya 70 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kelas kemiringan 0 - 2 persen. Sedangkan 6,99 persen wilayah berada pada kemiringan lebih dari 40 persen.

**Tabel 2.2**  
**Luas Daerah Menurut Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut**

Kelas Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase
1. 0 – 7 m	105.198	58,3
2. 7 – 25 m	18.254	10,1
3. 25 – 100 m	16.590	9,2
4. 100 – 500 m	27.546	15,3
5. 500 – 1.000 m	11.226	6,2
6. > 1.000 m	1.680	0,9
Hulu Sungai Selatan	180.494	100

Sumber : BPN Kandangan dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam angka 2015 (Kerjasama BPS dan Bappeda).

## 1.2 Kelerengan/Kemiringan Tanah

Pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, daerah dengan lereng relatif datar (0-8%) meliputi luas lebih dari 74%. Bahkan terdapat 6 (enam) kecamatan yang seluruh wilayahnya termasuk sangat datar (0-2%). Keenam wilayah kecamatan tersebut adalah Kecamatan Angkinang, Kandangan, Simpur, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara, dan Kecamatan Daha Barat.

Daerah berbukit dengan lereng terjal (antara 25 sampai lebih dari 40%) yang mencapai luas hampir 12 % yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsung, sebagian Sungai Raya dan yang paling luas terdapat di Kecamatan Loksado. Daerah dengan lereng terjal ini merupakan bagian dari jatur Pegunungan Meratus yang sebagian difungsikan sebagai kawasan lindung.

## 1.3 Tekstur Tanah

Tekstur tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikelompokkan atas 2 (dua) jenis, yaitu halus dan sedang. Hampir 69% tanah bertekstur sedang, yang meliputi seluruh wilayah kecamatan. Sementara itu tanah dengan tekstur halus sekitar 30% yang menyebar di 5 (lima) wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Padang Batung, Loksado, Sungai Raya, Daha Selatan, dan Daha Utara.

## 1.4 Iklim dan Curah Hujan

Suhu udara yang tercatat sepanjang tahun 2013 berkisar antara 16,9 derajat celsius sampai dengan 34,7 derajat celsius, namun secara rata-rata berkisar 27-28 derajat celsius. Sementara itu, berkenaan dengan curah hujan, sepanjang tahun 2012 terendah terjadi pada bulan September yaitu sebanyak 20 mm dan hanya terjadi dalam 1 hari. Curah hujan tertinggi terjadi sepanjang bulan Desember dimana selama 19 hari Kabupaten Hulu Sungai Selatan diguyur hujan sebanyak 326 mm.

Seperti daerah lainnya di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan beriklim tropis. Dari hasil pantauan Kantor Laboratorium PTPH di Sungai Raya, kelembaban udara dengan kelembaban maksimum tertinggi sebesar 100 persen di bulan Februari, Maret, Nopember dan Desember, sedangkan kelembaban minimum terendah terjadi di bulan Oktober sebesar 54 persen, lengkapnya seperti terlihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Curah Hujan**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Bulan	Curah Hujan (mm)		
	2012	2013	2014
Januari	223	379	40.60
Februari	270.50	354	165
Maret	262.70	303	503
April	217	372	234
Mei	127	256	225
Juni	56	145	147
Juli	102	266	36
Agustus	26	83	41
September	20	53	66
Oktober	153.50	122	35
November	159	401	198
Desember	326	342	430

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016  
<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

**Tabel 2.4**  
**Suhu Udara Rata Rata**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Bulan	Suhu Udara (Celcius)								
	Minimal			Maksimal			Rata-rata		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Januari	-	19.10	19.10	-	34	34	-	27.90	26.55
Februari	-	18.30	20.50	-	33.20	29.20	-	26.30	24.85
Maret	-	19.70	22.80	-	32.20	33	-	26	27.90
April	-	19.20	20.40	-	32.70	32.40	-	28.10	26.40
Mei	-	18.90	21.50	-	34.90	34.50	-	28.50	28
Juni	-	18.90	18.80	-	34.80	34.30	-	28.40	26.55
Juli	-	18.70	21.80	-	33.10	34.10	-	28.20	27.95
Agustus	-	18.20	19.40	-	33.80	34.60	-	27.10	27
September	-	20.30	18.50	-	35.40	36.10	-	27.60	27.30
Oktober	-	21.40	20.60	-	34.20	36.90	-	29.10	28.75
November	-	19.40	22.30	-	35.50	35.80	-	29	29.05
Desember	-	18.80	21.30	-	33.40	32.90	-	28.20	27.10

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016  
<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Hari Hujan**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Bulan	Hari Hujan (Hari)		
	2012	2013	2014
Januari	19	15	17
Februari	18	17	10
Maret	23	12	18
April	22	14	15
Mei	8	13	14
Juni	7	8	11
Juli	6	12	4
Agustus	4	7	4
September	1	5	4
Oktober	13	11	4
November	14	19	10
Desember	19	21	21

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

**Tabel 2.6**  
**Kelembaban Udara Rata Rata**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Bulan	Kelembaban Udara (Persen)					
	Minimal		Maksimal		Rata-rata	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Januari	64	64	97.80	97.80	80.90	80.90
Februari	61	60.50	100	98	80.50	79.25
Maret	56.30	57.50	100	98	78.20	77.75
April	61.70	63	99.30	99.50	80.50	81.25
Mei	61.80	63	99	99	80.40	81
Juni	65.30	67.80	98.50	98	81.90	82.90
Juli	58	62	97.80	97.50	77.90	79.75
Agustus	54.50	48.30	98	98	76.30	73.15
September	54.80	35.50	98	98.50	76.40	67
Oktober	54	28.30	97.80	94.50	75.90	61.40
November	54.30	24.80	100	95.30	77.10	60.05
Desember	61.30	57.80	100	99.80	80.60	78.80

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

### 1.5 Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten/kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten/kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten

hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. Terdiri dari rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya (tabel 2.3 Pola Ruang dan Peta 2.1 Pola Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Hulu Sungai Selatan)

Pengelolaan kawasan lindung meliputi semua upaya perlindungan, pengawetan, konservasi serta pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan. Maka tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya, dan kawasan lindung meliputi kawasan suaka alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pada bagian ini perlu dijelaskan tentang jenis kawasan lindung disertai dengan lokasi dan luasan sejauh memungkinkan. Dalam mengendalikan kegiatan alih fungsi kawasan lindung, ataupun tidak terjadi alih fungsi tetapi sudah mengalami penurunan fungsi, perlu dirumuskan upaya pengembalian dan pelestarian fungsi lindung sesuai dengan kepentingan fungsi masing-masing.

Jenis kawasan lindung di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

#### **Kawasan Lindung**

1. Kawasan Hutan lindung
  - Kec. Loksado 19.955 Ha
  - Kec. Padang Batung 3.059 Ha
  - Kec. Telaga Langsung 904 Ha
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya
  - Kec. Loksado luasnya 7.490 Ha
  - Kec. Padang Batung luasnya 750 Ha
  - Kec. Telaga Langsung luasnya 250 Ha
3. Kawasan perlindungan setempat
  - Danau Bangkau di Kec. Kandangan luasnya 615 Ha
  - Danau Paharangandi Kec. Daha Utara luasnya 8 Ha
  - Danau Pantai Ulin di Kec. Simpur luasnya 5 Ha
  - Danau Muning Dalam di Kec. Daha Selatan luasnya 5Ha
  - Danau Bago Tanggul di Kec. Kalumpang luasnya 56 Ha
  - Danau Bajayau Lama di Kec. Daha Barat luasnya 6 Ha
4. Ruang terbuka Hijau Kota (RTH) (Khusus untuk Kota )
  - RTH publik : lapangan olah raga, taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, rel kereta api dan sungai 30%
  - RTH privat : berupa kebun atau halaman rumah, gedung milik masyarakat dan swasta yang ditanami tumbuhan
5. Kawasan suaka alam dan cagar budaya
  - Kawasan Suaka Alam berada di Cagar Alam Gunung Kentawan luas 240 Ha
  - Kawasan Cagar Alam Budaya dan Ilmu Pengetahuan

- a. Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi di Kec. Daha Selatan
  - b. Mesjid Su'ada di Kec. Simpur
  - c. Benteng Madang di Kec. Padang Batung
  - d. Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih
  - e. Makam Tumpang Talu di Kec. Kandangan
  - f. Kubur Anam di Kec. Sungai Raya
  - g. Rumah Bersejarah H. Kaspul Anwar di Kec. Padang Batung
  - h. Rumah Bersejarah H. Abdul Kadir di Kec. Padang Batung
6. Kawasan rawan bencana alam
- Bencana Longsor
    - a. Kec. Loksado di Desa Hulu Banyu
    - b. Kec. Padang Batung di desa Batu Laki
    - c. Kec. Telaga Langsung di Desa Hamak dan Hamak Utara
  - Bencana Banjir
    - a. Kec. Kandangan :
      - 1 . Desa Jambu Hilir
      - 2 . Desa Baluti
      - 3 . Desa Sungai Kupang
      - 4 . Desa Sungai Paring
      - 5 . Desa Lungau
    - b. Kec. Kalumpang :
      6. Desa kalumpang
      7. Desa Karang Paci
      8. Desa Balanti
      9. Desa Balimau
    - c. Kec. Angkinang :
      10. Desa Telaga Sili-sili
      11. Desa Sungai Hanyar
      12. Desa Angkinang
      13. Desa Angkinang selatan
      14. Desa Bakarung
    - d. Kec. Sungai Raya :
      15. Desa Sungai Raya Selatan
      16. Desa Tanah Bangkang
      17. Desa Ida Manggala
    - e. Kec. Padang Batung :
      18. Desa Malutu
      19. Desa Batu Laki
      20. Desa Malilingin
      21. Desa Jelatang
      22. Desa Batu Bini
      23. Desa Karang Jawa Muka
    - f. Kec. Telaga Langsung :
      24. Desa Mandala
      25. Desa Lok Binuang
      26. Desa Pakuan Timur

27. Desa Gumbil
  - g. Kec. Daha Selatan
  - h. Kec. Daha Utara
  - i. Kec. Daha Barat
2. Kawasan lindung lainnya
  - Reservaat Danau Bangkau di Desa Bangkau Kec. Kandangan luasnya 10 Ha
  - Reservaat Sungai Jarum di Desa Bangkau Kec. Kandangan luasnya 100 Ha
  - Kawasan rawa Simpurn di Tanggul Desa Pantai Ulin Kec. Simpurn luasnya 5 Ha
  - Kawasan Bago Tanggul di Desa Bago Tanggul Kec. Kalumpang luasnya 5 Ha
  - Kawasan Bajayau Lama di Desa Bajayau Lama Kec. Daha Barat luasnya 5 Ha
  - Kawasan Muning Dalam di Desa Muning Dalam Kec. Daha Selatan luasnya 6 Ha

#### **Kawasan budi daya**

Dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Budidaya terdiri dari :

1. Kawasan Hutan produksi
  - Kawasan Hutan Produksi Tetap
    - a. Kec. Loksado luasnya 4.545 Ha
    - b. Kec. Padang Batung luasnya 7.702 Ha
    - c. Kec. Sungai Raya luasnya 444 Ha
    - d. Kec. Telaga Langsung luasnya 399 Ha
  - Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi
    - a. Kec. Daha Barat luasnya 2.415 Ha
    - b. Kec. Daha Selatan luasnya 5.464 Ha
    - c. Kec. Daha Utara luasnya 10.843 Ha
2. Kawasan pertanian
  - Kawasan Peruntukan pertanian tanaman pangan
    - a. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah luasnya 12.981 Ha
      1. Kec. Sungai raya
      2. Kec. Simpurn
      3. Kec. Kandangan
      4. Kec. Telaga Langsung
      5. Kec. Daha Utara
      6. Kec. Padang Batung
      7. Kec. Kalumpang
      8. Kec. Angkinang
      9. Kec. Daha Selatan
      10. Kec. Daha Utara
      11. Kec. Daha Barat
    - b. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering/tegalan luasnya 3.797 Ha
      1. Kec. Padang Batung
      2. Kec. Sungai Raya

3. Kec. Telaga Langsat
4. Kec. Loksado
- Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura luasnya 3.797Ha dengan jenis komoditas
  - a. Buah-buahan berupa semangka meliputi :
    - Kec. Telaga Langsat
    - Kec. Padang Batung
    - Kec. Daha Barat
    - Kec. Daha Selatan
    - Kec. Daha Utara
  - b. Sayur-sayuran meliputi :
    - Kec. Sungai Raya
    - Kec. Telaga Langsat
    - Kec. Kandangan
    - Kec. Angkinang
    - Kec. Padang Batung
    - Kec. Simpur
3. Kawasan perkebunan
  - Perkebunan Karet luasnya 23.839 Ha yaitu ada di
    - Kec. Telaga Langsat
    - Kec. Padang Batung
    - Kec. Loksado
    - Kec. Sungai raya
    - Kec. Angkinang
  - Perkebunan Kelapa Sawit luasnya 48.955 Ha yaitu ada di
    - Kec. Angkinang
    - Kec. Daha Barat
    - Kec. Daha Selatan
    - Kec. Daha Utara
    - Kec. Kalumpang
    - Kec. Kandangan
    - Kec. Simpur
  - Perkebunan Kayu manis
    - Kec. Loksado
  - Perkebunan Kelapa
    - Kec. Simpur
    - Kec. Kalumpang
    - Kec. Sungai raya
    - Kec. Padang Batung
    - Kec. Telaga Langsat
    - Kec. Kandangan
    - Kec. Angkinang
4. Kawasan Peternakan
  - Ternak sapi potong
    - Daerah sentra sapi meliputi : Kec. Sungai Raya, Kec. Simpur, dan Kec. Kalumpang
    - Daerah pengembangan meliputi : Kec. Kandangan, Kec. Padang Batung, Kec. Angkinang, Kec. Telaga Langsat dan Kec. Loksado
  - Ternak Kerbau Rawa
    - Kec. Daha Barat

- Kec. Daha Utara
  - Ternak kambing berada di seluruh Kecamatan
  - Ternak domba
    - Kec. Kandangan
    - Kec. Daha Selatan
  - Ternak ayam buras dan ayam ras berada di seluruh kecamatan
  - Ternak itik
    - Daerah sentra meliputi Kec. Daha Utara
    - Daerah pengembangan meliputi : Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Barat, Kec. Kalumpang, Kec. Simpbur, dan Kec. Angkinang.
5. Kawasan perikanan
- Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di sekitar sungai besar dan danau luasnya 2.059 Ha meliputi :
    - Kec. Daha Barat
    - Kec. Daha Selatan
    - Kec. Daha Utara
    - Kec. Kandangan
    - Kec. Simpbur
    - Kec. Kalumpang
  - Kawasan peruntukan budidaya perikanan
    - Pengembangan kawasan perikanan kolam meliputi : Kec. Kandangan, Kec. Daha Selatan, dan Kec. Kalumpang.
    - Pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi : Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat.
  - Kawasan pengolahan ikan
    - Kec. Daha Selatan
    - Kec. Daha Utara
    - Kec. Daha Barat
    - Kec. Kandangan
    - Kec. Kalumpang
  - Kawasan peruntukan perikanan minapolitan berada di Desa Muning Kec. Daha Selatan
6. Kawasan pertambangan
- Mineral logam
    - Emas berada di Kec. Loksado
    - Mangan berada di Desa Tampak Pipi'i, Desa Bukuanin dan Desa Mawangi Kec. Padang Batung
    - Besi berada di Desa Malaris, Desa Kamawakan, Desa S. Tinggiran, dan Desa S. Landuyan Kec. Loksado
  - Mineral bukan logam
    - a. Pasir kuarsa berada di Desa Malilingin Kec. Padang Batung
    - b. Fosfat meliputi : Desa Gn. Batu Laki dan Desa Gn. Batu Bini Kec. Padang Batung, Desa Gn. Liang Mandala dan Desa Gn. Burit Sanga Kec. Telaga Langsat

- c. Lempung meliputi :
    - Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, Desa Madang, Desa Pandulangan di Kec. Padang Batung
    - Desa Angkinang Kec. Angkinang
    - Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya
    - Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kec. Telaga Langsat
  - Batuan
    - a. Marmer berada di Desa Datar Kedayang, Desa Gn. Langara, dan Desa Gn. Kantawan Kec. Loksado
    - b. Granit berada di Desa Kamawakan Kec. Loksado
    - c. Andesit meliputi :
      - Kec. Loksado
      - Kec. Padang Batung
      - Gabro berada di Kec. Loksado
    - d. Basalt
      - Desa Haratai Kec. Loksado
      - Desa Padang Batung, Desa Durian Rabung Kec. Padang Batung.
    - e. Tanah liat
      - Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, desa Madang, dan Desa Pandulangan Kec. Padang Batung
      - Desa Angkinang Kec. Angkinang
      - Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya
      - Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kec. Telaga Langsat
    - f. Tanah urug berada di Desa Padang Batung dan Desa Tambak Pipi'i di Kec. Padang Batung
    - g. Kerikil berpasir alami (sirtu) meliputi :
      - Sepanjang Sungai Amandit di Kec. Padang Batung
      - Sepanjang Sungai Amandit di Kec. Sungai Raya
    - h. Batu gamping meliputi :
      - Desa Gn. Batu Laki dan Desa Gn. Batu Bini, Desa Tayub, dan Desa Mandapai di Kec. Padang Batung
      - Desa Gn. Liang Mandala, Desa Gn. Burit Sanga di Kec. Telaga Langsat
      - Desa Datar Kedayang, Desa Haratai, dan Desa Tanuhi di Kec. Loksado.
  - Batu bara
    - a. Bitumen padat di Desa Malutu Kec. Padang Batung
    - b. Desa Malutu, Desa Panglima Dambung, Desa Batu Bini, Desa Durian Rabung, Desa Muara Pipi'i, Desa Malilingin, Desa Kuangan, Desa Gn. Batubarang, Desa Gn. Pancur Binjai, Desa Pariangan, Desa Mandapai, Desa Tambak Pipi'i, Desa Tayub Kec. Padang Batung
    - c. Desa Taniti di Kec. Telaga Langsat
7. Kawasan industri

Kawasan industri kecil dan mikro meliputi :

- a. Industri Dodol Kandangan meliputi :
    - Desa Kapuh Kec. Simpur
    - Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau, dan Desa Hariti Kec. Sungai Raya
    - Desa Gambah Luar, Desa Kandangan Barat dan Desa Kandangan Utara Kec. Kandangan
  - b. Industri kerupuk berada di Bamban Utara Kecamatan Angkinang
  - c. Industri ikan kering meliputi :
    - Desa Bangkau Kec. Kandangan
    - Desa Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang
    - Desa Muning dan Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan
  - d. Industri propeler berada di Desa Penggadingan dan Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara
  - e. Industri imitasi berada di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan
  - f. Industri pandai besi berada di Desa Sungai Pinang dan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan
  - g. Industri gerabah berada di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan
  - h. Industri kue kering meliputi :
    - Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya
    - Desa Kapuh Kec. Simpur
  - i. Industri anyaman bambu berada di Desa Malinau, Desa Ulang dan Desa Panggungan Kec. Loksado
  - j. Industri Anyaman Purun berada di Desa Balimau dan Desa Karang Paci Kec. Kalumpang
  - k. Industri Kumpang Parang berada di Desa Sarang Halang dan Desa Sungai Raya Utara Kec. Sungai Raya
  - l. Industri Gula merah meliputi :
    - Desa Jambu Hulu, Desa Jambu Hilir Kec. Kandangan
    - Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah, Desa Asam-Asam, Desa Tamiyang, Desa Karasikan, Desa Batang Kulur Kanan, Desa Batang Kulur Kiri, Desa Bumi Berkat Kec. Sungai Raya.
8. Kawasan pariwisata
- a. Wisata Budaya Lokal meliputi :
    - Balai Adat Dayak di Kec. Loksado
    - Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi di Desa Habirau Kec. Daha Selatan
    - Rumah Adat Banjar Gajah Manyusu di Desa Amawang Kec. Kandangan
    - Upacara Aruh Ganal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
    - Seni Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
    - Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga) di Kec. Daha Selatan
    - Olahraga Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Kalang Hadangan di Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat
- b. Wisata Sejarah meliputi :
  - Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih Kec. Loksado
  - Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV di Kec. Telaga Langsung
  - Tugu Garis Demarkasi di Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung.
  - Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Jelatang Kec. Padang Batung
  - Gedung Juang Devisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Halamau Kec. Sungai Raya
  - Situs Benteng Madang di Desa Madang Kec. Padang Batung
  - Situs Amuk Hantarukung di Desa Hantarukung Kec. Simpur
  - Makam Tumpang Talu di Kandangan Barat Kec. Kandangan
  - Kubur Anam di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya
  - Makam Singakarsa di Jln. Singakarsa Kec. Kandangan
  - Makam aluh Idut di Jln. Aluh Idut Kec. Kandangan
  - Tugu 2 Januari (Tugu Hamayung) di Desa Hamayung Kec. Daha Utara
  - Makam Ning Bulang di desa Hantarukung Kec. Simpur
  - Rumah Bersejarah
- c. Wisata Religi meliputi :
  - Mesjid Su'ada di Desa Wasah Hilir Kec. Simpur
  - Makam H. M Said di Desa Simpur Kec. Simpur
  - Makam Datu H. Abbas di Desa Simpur Kec. Simpur
  - Kubah Datu Durabu di Desa Kalumpang Kec. Kalumpang
  - Kubah Taniran di Desa Taniran Kec. Angkinang
  - Makam Keramat Datu H.M Rais di Desa Loknyur Kec. Angkinang
  - Makam Datu Daha Kec. Daha Utara
  - Makam Surgi Tuan di Desa Pasungkan Kec. Daha Utara
  - Makam Habib Ibrahim Desa Mandala Kec. Daha Utara
  - Makam Tuan Guru H. Ali di Desa Pandansari Kec. Daha Selatan
  - Makam Habib Lumpangi di desa Lumpangi Kec. Loksado
- d. Pariwisata Alam
  - Wisata Alam Loksado di Kec. Loksado
  - Air Terjun Haratai di Kec. Loksado

- Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kec. Loksado
  - Gunung Kentawan di Desa Tanuhi Kec. Loksado
  - Danau Bangkau di Desa Kec. Kandangan
  - Delta dan Dam Sungai Amandit di Desa Malutu Kec. Padang Batung
  - Riam Anai di Desa Lok LahungKec. Loksado
  - Air Terjun Kilat Api di Desa Tanuhi Kec. Loksado
  - Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kec. Loksado
  - Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau Kec. Loksado
  - Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kec. Loksado
  - Air Panas Mandapai di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung
  - Telaga Bidadari di Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya
9. Kawasan permukiman  
Kawasan Peruntukan Pemukiman luasnya 4.533 Ha
- a. Kawasan Peruntukan permukiman perkotaan terdiri atas :
- Kawasan Perkotaan Kandangan di Kec. Kandangan
  - Kawasan Perkotaan Angkinang di Kec. Angkinang
  - Kawasan Perkotaan Sungai Raya di Kec. Sungai Raya
  - Kawasan Perkotaan Nagara di Kec. Daha Selatan dan Daha Utara
  - Kawasan Perkotaan Simpur di Kec. Simpur
  - Kawasan Perkotaan Loksado di Kec. Loksado
- b. Kawasan Peruntukan permukiman perdesaan mencakup semua permukiman di luar kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten.
10. Kawasan lainnya
- a. Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi :
- Pasar Los Batu Kec. Kandangan
  - Pasar Nagara Kec. Daha Selatan
  - Pasar Hewan Kec. Angkinang
- b. Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas :
- Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Kec. Kandangan
  - Komando Rayon Militer Tersebar di wilayah Kabupaten
  - Kawasan Kepolisian meliputi :
    - Kepolisian Resort berada di Kec. Sungai Raya dan Kec.Loksado
    - Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten

Guna memberikan akses yang lebih cepat dan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat proses pembangunan di Kab. Hulu Sungai Selatan maka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 93 Tahun 2006 tentang Penataan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Secara

administrasi Kab. Hulu Sungai Selatan dibagi atas 11 Kecamatan, 4 Kelurahan dan 144 Desa.

**Tabel 2.7**  
**Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan		Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
	Desa	Kelurahan		
1. Padang Batung	17	-	203,93	11,30
2. Loksado	11	-	338,89	18,78
3. Telaga Langsung	11	-	58,08	3,22
4. Angkinang	11	-	58,40	3,24
5. Kandangan	14	4	106,71	5,91
6. Sungai Raya	18	-	80,96	4,49
7. Simpur	11	-	82,35	4,56
8. Kalumpang	9	-	135,07	7,48
9. Daha Selatan	16	-	322,82	17,88
10. Daha Utara	19	-	268,11	14,85
11. Daha Barat	7	-	149,62	8,29
Hulu Sungai Selatan	144	4	1.804,94	100,00

Sumber : Bagian Tapem Kab. HSS

Dari sebelas kecamatan yang ada, daerah yang paling luas yaitu Kecamatan Loksado mencapai 338,89 km<sup>2</sup> atau 18,78 persen, selanjutnya Kecamatan Daha Selatan 322,82 km<sup>2</sup> (17,8%), Kecamatan Daha Utara 268,11 km<sup>2</sup> (14,85%), Kecamatan Padang Batung 203,93 km<sup>2</sup> (11,30%), sedangkan Kecamatan yang mempunyai luas terkecil yaitu Kecamatan Telaga Langsung hanya 58,08 km<sup>2</sup> atau 3,22 persen luas wilayah Kab. Hulu Sungai Selatan.

### 2.1.1.2. DEMOGRAFIS

#### a. Pemerintahan

Sistem pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpedoman pada azas musyawarah mufakat, sebagaimana tercantum pada motto kabupaten, yaitu "RAKAT MUFAKAT" Rakat artinya persatuan dan Mufakat artinya musyawarah. Masyarakat Hulu Sungai Selatan sangat mengedepankan persatuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, dengan 144 desa dan empat kelurahan. Ibukota Kabupaten ini berada di Kecamatan Kandangan. Untuk menjalankan roda pemerintahan, dibentuklah Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Sampai tahun 2012, Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdiri dari satu Sekretariat Daerah, Satu Sekretariat DPRD, Satu Sekretariat KPUD, Satu Sekretariat Korpri, 14 (empat belas) Dinas, 5 (lima) Badan, 5 (lima) Kantor ditambah dengan 11 (sebelas) Kantor Kecamatan dan 4 (empat) Kelurahan dan 2 Lembaga Teknis Lainnya. Lembaga teknis lain yang mempunyai tugas khusus dan langsung

bertanggung jawab kepada Bupati adalah BLUD Hasan Basery dan PDAM Hulu Sungai Selatan. Terdapat juga sepuluh institusi vertikal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari 4 (empat) Kementerian, Kejaksaan Negeri, Mahkamah Agung, POLRI, dan 3 (tiga) Lembaga Non Departemen.

Aspek Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus mengembangkan pelayanan publik dan melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan baik lembaga- lembaga yang ada di desa maupun lembaga- lembaga pada masyarakat pedalaman pegunungan Meratus, khususnya pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum lainnya

## b. Kependudukan

Jumlah Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 263.909 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebar dalam 11 (sebelas) Kecamatan dimana mayoritas berada pada Kecamatan Kandangan yakni berjumlah 56.716 jiwa dan disusul Daha Selatan dengan jumlah penduduk 48.184 jiwa, sedangkan Kecamatan yang penduduknya paling sedikit dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Kecamatan Kalumpang dengan jumlah penduduk 7.546 jiwa. Adapun jumlah penduduk pada masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**  
**Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Padang Batung	11.684	11.809	23.493
2.	Loksado	5.168	5.016	10.184
3.	Telaga langsung	5.978	5.933	11.911
4.	Angkinang	10.815	10.762	21.577
5.	Kandangan	28.038	28.678	56.716
6.	Sungai Raya	9.619	10.085	19.704
7.	Simpur	8.447	8.713	17.160
8.	Kalumpang	3.836	3.710	7.546
9.	Daha Selatan	24.568	23.616	48.184
10.	Daha Utara	19.718	18.991	38.709
11.	Daha Barat	4.463	4.262	8.725
	Total	132.334	131.575	263.909

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. HSS Tahun 2015.

Sedangkan luas wilayah menurut jumlah penduduk dan berdasarkan Kepala Keluarga Tahun 2015 dapat dirinci berdasarkan tabel berikut :

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Penduduk berdasarkan Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah KK Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk
1.	Padang Batung	203,93	17	7.890	23.493
2.	Loksado	338,89	11	3.085	10.184
3.	Telaga langsung	58,08	11	4.035	11.911
4.	Angkinang	58,40	11	7.200	21.577
5.	Kandangan	106,71	18	18.953	56.716
6.	Sungai Raya	80,96	18	6.953	19.704
7.	Simpur	82,35	11	5.855	17.160
8.	Kalumpang	135,07	9	2.506	7.546
9.	Daha Selatan	322,82	16	15.321	48.184
10.	Daha Utara	268,11	19	11.646	38.709
11.	Daha Barat	149,62	7	2.679	8.725
	<b>Total</b>	<b>1.804,94</b>	<b>148</b>	<b>86.123</b>	<b>263.909</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. HSS Tahun 2015.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ketahun mengalami perubahan kenaikan, pada tahun 2009 ke tahun 2010 naik sebanyak 7.476 atau 3,54%, pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami kenaikan paling tinggi yaitu 17.139 jiwa atau 7,84%. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 kenaikan sebanyak 13.347 jiwa. Dan kenaikannya terus mengalami penurunan yaitu tahun 2013 sebanyak 5.758 jiwa, tahun 2014 sebanyak 5.557 jiwa dan tahun 2015 kenaikan sebanyak 3.373 jiwa. Untuk rincian mengenai perkembangan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.10**  
**Jumlah Penduduk Dari Tahun 2009 – 2015**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2009	211.259
2.	2010	218.735
3.	2011	235.874
4.	2012	249.221
5.	2013	254.979
6.	2014	260.536
7.	2015	263.909

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. HSS Tahun 2015.

Dari Indikator Kependudukan maka dapat dilihat Jumlah Penduduk menurut kecamatan dan agama dianut dapat dilihat pada tabel 2.11, dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada tabel 2.12, rasio jenis kelamin perkecamatan pada tabel 2.13 dan kepadatan penduduk perkecamatan pada tabel 2.14 di bawah ini.

**Tabel 2.11**  
**Indikator Kependudukan**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan & Agama yang Dianut**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2014**

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut (Jiwa)												
	Islam		Protestan		Katolik		Hindu		Budha		Lainnya		
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	
PADANG BATUNG	20.337	20.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOKSADO	4.534	4.667	835	835	81	81	91	91	14	14	3.027	3.027	
TELAGA LANGSAT	9.362	9.493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGKINANG	17.342	17.537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANDANGAN	48.427	49.025	79	79	50	50	15	15	12	12	-	-	
SUNGGAI RAYA	17.002	17.192	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIMPUR	14.311	14.436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KALUMPANG	6.212	6.263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAHA SELATAN	40.823	41.395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAHA BARAT	7.563	7.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAHA UTARA	31470	31947	-	-	15	15	-	-	-	-	-	-	-
HULU SUNGGAI SELATAN	217.383	220.243	926	926	146	146	106	106	26	26	3027	3.027	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

**Tabel 2.12**  
**Indikator Kependudukan**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2011-2014**

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)											
	Laki-laki				Perempuan				Jumlah			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
PADANG BATUNG	9849	10050	10151	10301	9870	10088	10186	10302	19719	20138	20337	20603
LOKSADO	4202	4352	4377	4446	4048	4195	4205	4269	8250	8547	8582	8715
TELAGA LANGSAT	4523	4640	4728	4802	4494	4558	4634	4691	9017	9198	9362	9493
ANGKINANG	8411	8650	8673	8786	8401	8570	8669	8751	16812	17220	17342	17537
KANDANGAN	23062	23661	24053	24395	23496	24118	24530	24786	46558	47779	48583	49181
SUNGGAI RAYA	7952	8135	8312	8429	8271	8383	8702	8775	16223	16518	17014	17204
SIMPUR	6789	6950	6988	7069	7147	7221	7323	7367	13936	14171	14311	14436

KALUMPANG	3025	3006	3122	3154	2984	3116	3090	3109	6009	6122	6212	6263
DAHA SELATAN	19792	20409	20484	20805	19704	20224	20339	20590	39496	40633	40823	41395
DAHA BARAT	3724	3827	3894	3961	3568	3668	3669	3724	7292	7495	7563	7685
DAHA UTARA	15065	15469	15585	15852	15370	15921	15900	16110	30435	31390	31485	31962
HULU SUNGAI SELATAN	106394	109149	110367	112000	107353	110062	111247	112474	213747	219211	221614	224474

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

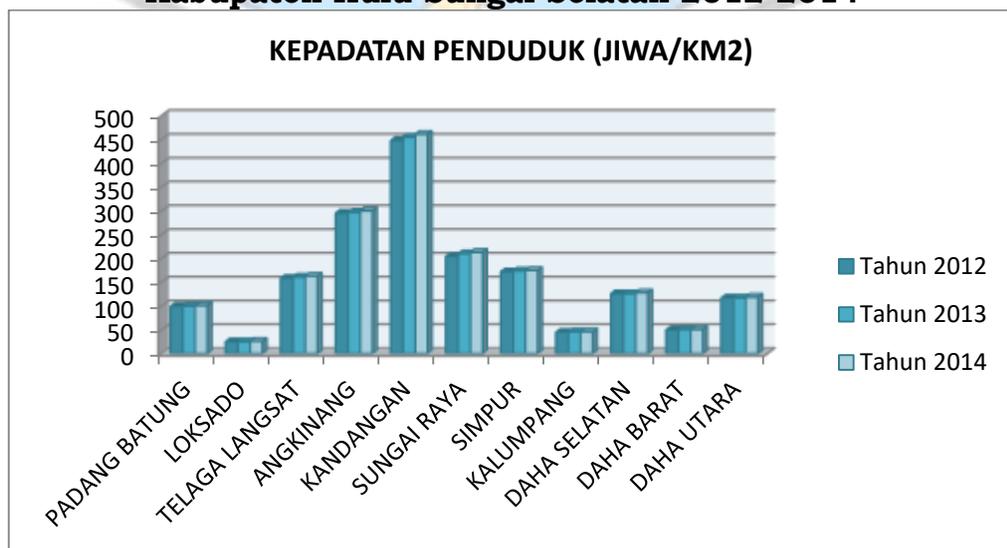
**Tabel 2.13**  
**Indikator Kependudukan**  
**Rasio Jenis Kelamin per Kecamatan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2012-2014**

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin		
	2012	2013	2014
PADANG BATUNG	99.62	99.66	99.99
LOKSADO	103.74	104.09	104.15
TELAGA LANGSAT	101.80	102.03	102.37
ANGKINANG	100.93	100.05	100.40
KANDANGAN	98.11	98.06	98.42
SUNGAI RAYA	97.04	95.52	96.06
SIMPUR	96.25	95.43	95.95
KALUMPANG	96.47	101.04	101.45
DAHA SELATAN	100.91	100.71	101.04
DAHA BARAT	104.33	106.13	106.36
DAHA UTARA	97.16	98.02	98.40
HULU SUNGAI SELATAN	99.17	99.21	99.58

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

**Gambar 2.2**  
**Kepadatan Penduduk per Kecamatan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2012-2014**



**Tabel 2.14**  
**Indikator Kependudukan**  
**Kepadatan Penduduk per Kecamatan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2012-2014**

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )		
	2012	2013	2014
HULU SUNGAI SELATAN	121	123	124
PADANG BATUNG	99	100	101
LOKSADO	25	25	26
TELAGA LANGSAT	158	161	163
ANGKINANG	295	297	300
KANDANGAN	448	455	461
SUNGAI RAYA	204	210	213
SIMPUR	172	174	175
KALUMPANG	45	46	46
DAHA SELATAN	126	126	128
DAHA BARAT	50	51	51
DAHA UTARA	117	117	119

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016  
<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

### c. Ketenaga Kerjaan

Dari sisi persediaan tenaga kerja tahun 2015 di Kab. Hulu Sungai Selatan dapat diketahui dari jumlah pencari kerja yang terdaftar dirinci menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, penempatan pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, indikator ketenagakerjaan menurut jenis kelamin, pencari kerja yang terdaftar menurut lapangan kerja, pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan menurut lapangan kerja, sebagaimana beberapa tabel berikut :

**Tabel 2.15**  
**Pencari Kerja Yang Terdaftar Dirinci Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2015**

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak Tamat SD	5	6	11
2	SD	19	12	31
3	SLTP	56	27	83
4	SLTA	559	215	774

5	D I / II / III	72	121	193
6	S1/DIV	171	186	357
	<b>Jumlah</b>	<b>882</b>	<b>567</b>	<b>1449</b>

Sumber : Dinas Sosial Nakertrans Kab. HSS tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas maka pencari kerja di Kab. Hulu Sungai Selatan didominasi dengan tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 774 orang (53,42%) dan S1/DIV yaitu sebanyak 357 (24,64%), sementara perbandingan antara laki-laki dan perempuan 60,87% : 39,13%. Dari tabel diatas, penempatan pencari kerja yang terdaftar menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin relatif masih kecil, sebagaimana terlihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.16**  
**Penempatan Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2015**

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tidak Tamat SD	2	3	5
2	SD	4	6	10
3	SLTP	141	39	180
4	SLTA	175	75	250
5	D I / II / III	57	54	111
6	S1/DIV	52	49	101
	<b>Total</b>	<b>431</b>	<b>226</b>	<b>657</b>

Sumber : Dinas Sosial Nakertran Kab. HSS tahun 2015

Sementara, berdasarkan indikator ketenagakerjaan menurut jenis kelamin di Kab. Hulu Sungai Selatan masih relatif lebih baik, karena tingkat pengangguran terbuka relatif kecil sementara tingkat partisipasi angkatan kerja relatif besar, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.17**  
**Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin**

No.	Indikator	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	84,55	52,93	68,47
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,53	4,25	5,79

Sumber : Kab. HSS dalam angka tahun 2014

Perbandingan Pencari kerja yang terdaftar menurut lapangan kerja dan penempatan pencari kerja yang terdaftar menurut lapangan kerja tergambar pada dua tabel berikut :

**Tabel 2.18**  
**Pencari kerja yang terdaftar menurut Lapangan Kerja Tahun 2015**

No.	Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tenaga Usaha Pertanian	278	55	333
2.	Tenaga Professional Teknisi	132	27	159
3.	Tenaga Kepemimpinan & Ketatalaksanaan	13	9	22
4.	Pejabat Pelaksana, Tata Usaha	87	75	162
5.	Tenaga Usaha Penjualan	119	141	260
6.	Tenaga Usaha Jasa	107	145	252
7.	Tenaga Produksi dan Tenaga lainnya	144	115	259
	<b>Total</b>	<b>882</b>	<b>518</b>	<b>1.449</b>

Sumber : Dinas Sosial Nakertran Kab. HSS tahun 2015

**Tabel 2.19**  
**Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan Menurut Lapangan Kerja Tahun 2015**

No.	Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tenaga Usaha Pertanian	264	21	285
2.	Tenaga Professional Teknisi	32	17	49
3.	Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	10	7	17
4.	Pejabat Pelaksana, Tata Usaha	34	53	87
5.	Tenaga Usaha Penjualan	42	61	103
6.	Tenaga Usaha Jasa	19	35	54
7.	Tenaga Produksi dan Tenaga lainnya	30	32	62
	<b>Total</b>	<b>431</b>	<b>226</b>	<b>657</b>

Sumber : Dinas Sosial Nakertran Kab. HSS tahun 2015

Berdasarkan kedua tabel diatas, jelas bahwa antara pencari kerja dan penempatannya relatif masih tidak sebanding. Pencari kerja yang terdaftar menurut lapangan kerja berjenis kelamin laki-laki sebanyak 882 orang dan perempuan sebanyak 518 orang, sementara yang ditempatkan menurut lapangan kerja hanya 431 untuk laki-laki dan 226 untuk perempuan. Karenanya, dalam kurun waktu 2014-2018 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus berupaya untuk memperluas kesempatan kerja dan

menciptakan wirausaha-wirausaha baru dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja dan kewirausahaan serta memberikan bantuan peralatan kerja untuk modal usaha. Selain itu dilaksanakan pula kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Melalui upaya tersebut diharapkan angka pengangguran dapat terus dikurangi dan produktifitas masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

**Tabel 2.20**  
**Indikator Ketenagakerjaan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011- 2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Angkatan Kerja	109.536	110.554	108.937	104.579	110.573
Bekerja	102.330	103.410	104.157	100.599	106.300
Pengangguran	7.206	7.144	8.459	3.980	4.273
Bukan Angkatan Kerja	48.510	46.850	40.913	39.819	40.324
Sekolah	15.323	14.522	42.418	8.863	9.232
Mengurus rumah tangga	24.962	24.674	-	24.786	25.583
Lainnya	8.225	7.654		6.170	5.509
Jumlah penduduk 15+	167.040	179.329	159.109	160.225	190.462
TPAK	73,27	68,33	68,47	65,27	58,06
TPT	4,32	4,45	4,42	3,81	3,86

Sumber : Dinas Sosial Nakertran Kab. HSS tahun 2015

#### **d. Budaya, Seni dan Ragam Penganan.**

Budaya yang berkembang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah mitologi suku Dayak Meratus (Dayak Bukit) menyatakan bahwa Suku Banjar (terutama Banjar Pahuluan) dan Suku Bukit merupakan keturunan dari dua kakak beradik yaitu Si Ayuh (Sandayuhan) yang menurunkan suku Bukit dan Bambang Basiwara yang menurunkan suku Banjar. Dalam khasanah cerita prosa rakyat berbahasa Dayak Meratus ditemukan legenda yang sifatnya mengakui atau bahkan melegalkan keserumpunan genetika (sating berkerabat secara geneologis) antara orang Banjar dengan orang Dayak Meratus. Dalam cerita prosa rakyat berbahasa Dayak Meratus dimaksud terungkap bahwa nenek moyang orang Banjar yang bernama Bambang Basiwara adalah adik dari nenek moyang orang Dayak Meratus, bernama Sandayuhan.

Suku bangsa Banjar diduga berasal mula dari penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya, yang membangun tanah air baru di kawasan Tanah Banjar (sekarang wilayah provinsi Kalimantan Selatan) sekitar lebih dari seribu tahun yang lalu. Setelah berlalu masa yang lama sekali akhirnya (setelah bercampur dengan penduduk yang

lebih asli, yang biasa dinamakan sebagai suku Dayak, dan dengan imigran-imigran yang berdatangan belakangan) terbentuklah setidaknya-tidaknya tiga subsuku, yaitu (Banjar) Pahuluan, (Banjar) Batang Banyu, dan Banjar (Kuala).

Kesenian Hulu Sungai Selatan terbentuk tidak terlepas dari pengaruh adat dan budaya yang telah digambarkan di atas sebagai proses asimilasi kedua kebudayaan. Kebudayaan eksotik yang masih bertahan di Hulu Sungai Selatan adalah budaya masyarakat Dayak Loksado. Mereka mendiami kawasan Pengunungan Meratus di Kecamatan Loksado yang membentang dari perbatasan Hulu Sungai Tengah (HST) hingga Tapin dan Kotabaru.

Kegiatan tradisional yang dimiliki oleh orang Dayak Loksado yang masih lestari sampai sekarang yakni:

- Naik dari manau (bersifat ghaib);
- Tari kurung-kurung;
- Basambui (orang sakit diobati secara kebatinan); serta
- Sumbiyang (membuat orang jadi sakit kemudian disembuhkan).

Disamping berbagai kesenian yang khas dari leluhur ada beberapa kesenian lainnya antara lain: Wayang Kulit, Wayang Gong, Musik Panting, Madihin, Bapantulan, Mamanda, Lamut dan lain sebagainya.

Di Kandangan beragam bentuk penganan yang menjadi ciri khas dari daerah ini dan sudah terkenal hampir ke seluruh pelosok negeri bahkan manca Negara yaitu berupa Ketupat, terkenal dengan sebutan “ketupat Kandangan” yang dimakan dengan Gulai Ikan Haruan (gabus), Ragam penganan lainnya selain ketupat kandangan yang telah digambarkan di atas, dapat pula ditemui Dodol Kandangan dengan bahan bakunya dari kelapa dalam, Wajik ketan, kerupuk bamban, apam wasah, mandai, iwak pakasam, iwak wadi, nasi pundut, ampal nyiur, ampal jagung, gaguduh, apam batil, lempeng, lupis, untuk bainti, pais pisang, cincin, puracit, lamang, lapat, tapai gumbili, tapai lakatan, lalampar, kuaci bigi waluh, surabi dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu dalam era kepemimpinan Kepala Daerah periode 2014-2018 terus ditumbuh kembangkan sehingga menjadi potensi daerah sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat.

## **2.2. Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

### **2.2.1. Pendidikan**

#### **a. Pendidikan Formal**

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bisa dicermati dari partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan secara berkelanjutan, baik dari jenjang SD, SMP, maupun SMA. Semakin kecil jumlah penduduk yang mengikuti pendidikan mengindikasikan bahwa kesadaran penduduk di wilayah tersebut

mengenai pendidikan masih rendah. Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk meninjau sejauh mana partisipasi penduduk dalam bidang pendidikan dapat dilihat melalui angka partisipasi sekolah. Dalam hal ini ukuran yang digunakan adalah angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), dan angka partisipasi sekolah (APS). Pengolahan ketiga indikator ini bersumber dari data SUSENAS yang dilakukan BPS.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan sesuai dengan jenjang/tingkatannya. Nilai APK dapat melebihi angka 100% karena dalam penghitungan APK tidak memperhatikan usia sekolah yang sesuai dengan jenjang sekolah yang seharusnya, misalnya jenjang SD usia 7-12 tahun, pada penghitungan APK murid yang berada diluar range usia tersebut tetap dimasukkan dalam penghitungan.

Pada tahun 2014 APK SD Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 112,93 persen. Angka ini menunjukkan persentase murid yang sedang sekolah di jenjang SD/ sederajat. Jika diperhatikan pada grafik dibawah, semakin tinggi jenjang pendidikan terlihat bahwa tingkat partisipasi baik itu APS, APK, dan APM akan cenderung menurun. Bahkan untuk tingkat SMP dan SMA nilai APK di bawah angka 100, hal ini mengindikasikan bahwa hanya sebagian dari anak berusia 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh dua kemungkinan, yang pertama adalah mereka sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan kelompok umur atau kemungkinan yang kedua adalah putus sekolah. Oleh karena itu untuk mempertajam analisis dari indikator APK diperlukan indikator APM dan APS.

**Gambar 2.3**  
**APS,APK,APM Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2011-2014**



Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Angka partisipasi murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya, yaitu tingkat SD usia 7-12 tahun, SMP usia 13-15 tahun, dan SMA pada usia 16-18 tahun sehingga besarnya APM akan selalu lebih kecil daripada APK. Selisih nilai APK dengan APM menunjukkan bahwa terdapat murid yang duduk pada jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan umurnya (bisa lebih tinggi atau lebih rendah). Untuk jenjang SD (7-12 tahun) terlihat bahwa APM 98,73 persen. Ini berarti terdapat 98,73 persen dari total penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah tepat sesuai jenjang SD. Dari sini dapat diketahui pula Selisih antara APK dan APM SD tahun 2014 sebesar 14,10 persen berarti bahwa diantara murid SD/ sederajat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat sebanyak 14,10 persen berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun (tidak sesuai usia jenjang sekolahnya). APM SMP pada 2014 mencapai angka 74,27 persen sedangkan APK mencapai 79,50 persen. Ini artinya hanya 74,27 persen penduduk usia 13-15 tahun yang terserap sebagai siswa SMP, sedangkan sisanya terserap pada jenjang pendidikan selain SMP (SD atau SMU) atau bahkan tidak bersekolah lagi. Selisih antara APM dan APK SMP tahun 2014 adalah 5,23 persen dapat diartikan sebagai persentase banyaknya murid SMP yang berada diluar rentang usia 13-15 tahun.

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menggambarkan berapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Indikator ini terkait dengan program wajib belajar sehingga indikator ini sering digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD lebih dari 95 persen dan APS SMP lebih dari 70 persen. Dari grafik diketahui bahwa Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014, APS untuk usia 7-12 tahun sebesar 99,56 persen, sedangkan untuk APS penduduk usia 13-15 sebesar 99,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa APS SD dan SMP telah mencapai target sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan kebijakan pemerintah tentang Program Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup berhasil.

Angka partisipasi sekolah (APS) menurut tingkat pendidikan sampai dengan tahun 2014, untuk jenjang SD menjadi 99,56 atau mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 99,12, kemudian pada tingkat SMP berada pada angka 95,28 atau naik dibanding tahun sebelumnya yaitu pada angka 85,77, sedangkan pada tingkat SLTA menjadi 61,26 atau naik dari tahun sebelumnya pada angka 53,75. Angka partisipasi sekolah (APS) berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah (lihat tabel 2.21)

**Tabel 2.21**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2011-2014**

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)											
	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
SD	96.09	98.17	100	100	98.74	98	98.39	99.05	97.37	98.09	99.12	99.56
SLTP	76.12	81.59	76.38	89.72	85.33	89.36	97.95	100	80.38	85.94	85.77	95.28
SLTA	50.30	52.18	55.30	59.55	52.95	57.97	51.80	63.41	51.51	55.28	53.75	61.26

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

Angka partisipasi kasar (APK) pada tingkat pendidikan SD yang pada tahun 2013 pada angka 107,12 maka pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 112,93. Pada tingkat SMP pada tahun 2013 pada angka 75,99 pada tahun 2014 naik menjadi 79,50, dan pada tingkat SLTA dimana pada tahun 2014 57,50 pada tahun 2014 naik menjadi 65,51 (lihat tabel)

**Tabel 2.22**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK)**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2011-2014**

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Persen)											
	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
SD	109.05	105.11	112.74	111.57	105.93	107.44	102.41	114.49	107.54	106.15	107.12	112.93
SLTP	72.36	90.02	59.73	69.34	81.95	82.65	97.09	88.13	76.80	85.89	75.99	79.50
SLTA	47.59	53.82	61.39	73.84	61.12	71.20	52.56	55.01	53.80	63.13	57.50	65.51

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

Angka partisipasi murni (APM) berdasarkan tingkat pendidikan SD pada tahun 2013 sebesar 98,06 naik menjadi 98,73 pada tahun 2014. Kemudian ada tingkat SLTP pada tahun 2013 sebesar 73,15 naik menjadi 74,27 pada taun 2014, selanjutnya pada tingkat SLTA pada tahun 2013 sebesar 51,45 naik menjadi 54,48 pada tahun 2014 (lihat tabel)

**Tabel 2.22**  
**Angka Partisipasi Murni (APM)**  
**Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2011-2014**

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Murni (APM) (Persen)											
	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki+Perempuan			
	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
SD	94.61	94.86	100	100	92.99	91.49	96.43	97.28	93.83	93.37	98.06	98.73
SLTP	56.63	68.39	58.54	65.91	64.93	68.07	92.12	81.37	60.47	68.22	73.15	74.27
SLTA	38.57	37.01	53.77	55.41	51.59	53.49	48.50	53.30	44.54	45.84	51.45	54.48

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, yaitu terciptanya kualitas masyarakat yang maju dan mandiri. Bertumpu pada perspektif tersebut, maka upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia jelas sangat strategis. Karena itu, berbagai kebijakan maupun langkah-langkah dalam pendidikan nasional direalisasikan secara benar-benar konseptual konsisten dan konsekuen agar keluaran (*output*) yang diperoleh sungguh-sungguh memiliki kualitas dalam mengantisipasi tantangan terutama dalam era menjelang masyarakat ekonomi Asean (MEA) di tahun-tahun yang akan datang.

### 1. Harapan Lama Sekolah

Secara umum pencapaian EYS Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami peningkatan namun masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2014 nilai EYS Hulu Sungai Selatan sebesar 11,68 tahun ini mengandung arti bahwa penduduk usia 7 tahun ke atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai harapan untuk bersekolah hingga 11,68 tahun lamanya atau bersekolah mencapai kelas dua SLTA.

**Gambar 2.4**  
**Perkembangan Expected Years School (EYS) Kab. HSS**  
**Tahun 2010-2014**



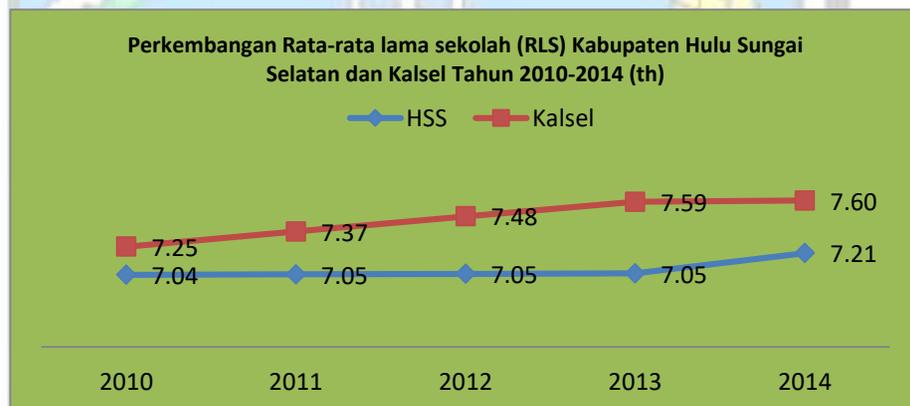
Sumber: BPS Kab.Hulu Sungai Selatan

Semakin tinggi angka EYS suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakatnya. Angka EYS lebih banyak dipengaruhi oleh besarnya angka putus sekolah terutama untuk penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka putus sekolah maka EYS akan cenderung lebih rendah dan sebaliknya.

## 2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah (RLS) dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Dengan konsep ini, RLS lebih banyak memberi gambaran tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar aktif di pasar kerja.

**Gambar 2.5**  
**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kab. HSS**  
**Tahun 2010-2014**



Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan

Secara umum rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Dari tahun 2010 meski perlahan tapi pasti mulai menunjukkan peningkatan namun masih belum beranjak dari kisaran angka tujuh tahun dimana tahun 2014 RLS sebesar 7,21 tahun yang artinya secara rata rata lamanya sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya sekitar tujuh tahun atau hingga kelas satu SLTP.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik yang memadai merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan. Pada tahun 2014 sarana dan prasarana pendidikan baik swasta maupun negeri di kabupaten ini terlihat cukup memadai. Hal ini dapat ditunjukkan melalui indikator pada tabel dibawah ini. Rasio murid-sekolah menunjukkan kemampuan sekolah menampung murid, kemudian

rasio murid kelas menunjukkan kepadatan kelas pada suatu jenjang pendidikan, rasio murid-kelas tahun 2014 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk ukuran yang ideal seperti yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan yaitu dibawah 35 orang per kelas.

**Tabel 2.23**  
**Rasio Murid –Sekolah, Rasio Murid-Kelas, dan Rasio Murid-Guru**  
**Menurut Jenjang Pendidikan**  
**Kab.Hulu Sungai Selatan tahun 2014**

	Rasio Murid Sekolah	Rasio Murid Kelas	Rasio Murid Guru
TK	32,42	17,35	11,25
SD	85,87	13,48	9,5
SMP	163,87	23,73	9,8
SMA	363,23	27,61	11,08

Sumber: Kab.HSS dalam Angka 2014, data diolah.

Sedangkan rasio murid guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar, menurut Departemen Pendidikan ukuran ideal rasio murid guru adalah 20 – 30, indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru. Rasio murid guru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 berada dibawah 20, hal ini menunjukkan bahwa beban guru di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih cukup ringan, hal ini tentunya menjadi harapan semakin meningkatnya pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran di kabupaten ini lebih meningkat.

**Tabel 2.24**  
**Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Dibawah Dinas Pendidikan**  
**Kab.Hulu Sungai Selatan tahun 2014**

Tingkat Pendidikan (Kemendiknas)	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Dibawah Dinas Pendidikan					
	Sekolah		Murid		Guru	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Taman Kanak-kanak	146	144	4477	4669	390	415
Sekolah Dasar (SD)	245	245	21857	21040	2036	2213
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	31	31	4291	5080	490	516
Sekolah Menengah Atas (SMA)	9	9	2682	2845	232	278
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	4	4	1711	1877	136	150

**b. Pendidikan Non Formal**

**1. Pemberantasan Buta Aksara / Keaksaraan Fungsional**

Pemberantasan Buta Aksara merupakan satu kegiatan yang penting dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka meningkatkan penduduk yang melek huruf. Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diupayakan secara maksimal sejak tahun 2006. Kerja keras dalam menangani masalah buta aksara ini telah memberikan hasil yang signifikan kepada sebanyak 17.675 jiwa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk mempertahankan tuntas buta aksara perlu dilakukan kegiatan pembinaan di setiap PKBM (lihat tabel 2.10).

**Tabel 2.25**  
**Realisasi Penuntasan Buta Aksara**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2011 - 2015**

Indikator / Usia	Sasaran	Realisasi				
		2011	2012	2013	2014	2015
15 s.d 44 tahun	17.675 (100%)	1.117 (6,32%)	1.744 (3,61%)	750 (1,53%)	990	1.695

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. HSS

**2. Pendidikan Kesetaraan meliputi : Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan paket C setara SMA**

Pendidikan Kesetaraan program Paket A setara SD dilaksanakan untuk masyarakat yang belum memenuhi pendidikan di SD untuk memiliki ijazah setara SD. Begitu juga paket B dan Paket C, ke dua pendidikan kesetaraan ini dikhususkan bagi warga yang ingin memperoleh pendidikan akan tetapi tidak sempat mengikutinya. Untuk tahun 2014-2018 diharapkan pendidikan kesetaraan lebih kompetitif sesuai dengan perkembangan zaman modern.

**2.2.2 Kesehatan**

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes, klinik bidan praktek swasta, klinik dokter praktek swasta, took obat dan apotek.

Rumah sakit yang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 3 (tiga) buah (1 RS pemerintah dan 2 RS Swasta) namun karena jumlah tempat tidur yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Jumlah Puskesmas Hingga saat ini telah ada 21 unit puskesmas yang tersebar merata di

seluruh kecamatan. Namun yang menjadi kendala adalah kelengkapan prasarana dan sarana serta sumber daya manusia masih belum memenuhi standar baik jumlah maupun kualitasnya, sehingga banyak pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit baik rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun ke luar kabupaten.

Puskesmas Pembantu sebanyak 69 unit, Poskedes sudah tersebar merata di seluruh kecamatan, dengan jumlah total sebanyak 148 unit, sedangkan rumah bidan desa sebanyak 17 unit yang tersebar merata di setiap kecamatan.

Indeks kesehatan terus mengalami perbaikan walaupun berfluktuasi, angka kematian ibu turun dari 205 (per 100.000 KH) pada tahun 2014 menjadi 122,4 pada tahun 2015. Angka kematian bayi dari 15 (per 1000) pada tahun 2014 naik menjadi 21,6 pada tahun 2015. Persentase balita gizi buruk pada tahun 2014 sebesar 0,1% naik menjadi 0,02% ditahun 2015.(lihat tabel 2.26).

**Tabel 2.26**  
**Indeks Kesehatan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 2015**

No	Indikator	Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	222	294	176	262	205	122,4
2	Angka Kematian Bayi (per 1000)	10	13	14	11	15	21,6
3	Persentase balita gizi buruk (%)	0	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02
4	Rasio Puskesmas/ Penduduk	1:11.175	1:10.721	1:10.960	1:10.438	1:10.533	1 : 12.567
5	Rasio Pustu/ Penduduk	1:3.076	1:3.107	1:3.176	1:3.177	1:3.212	1 : 3.824

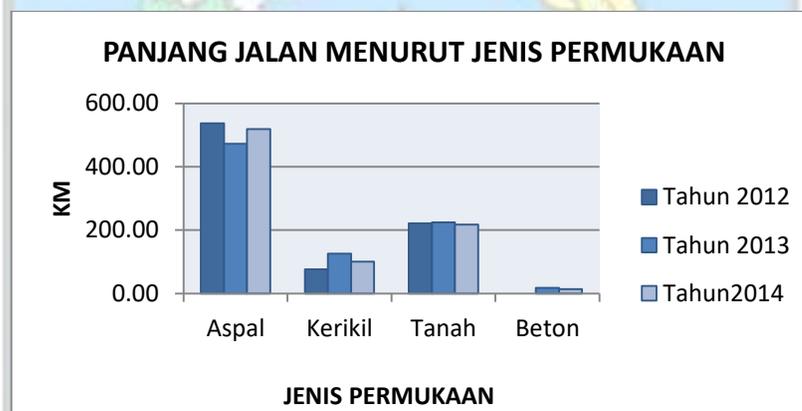
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. HSS Tahun 2015

### 2.2.3 Jaringan Jalan

Jaringan jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2014 berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 2016 <http://hulusungaiselatankab.bps.go.id> menurut jenis permukaan terbagi dari Permukaan Aspal sepanjang 537,450 km, Kerikil sepanjang 75,881 km, dan tanah sepanjang 221,041 km (lihat tabel2.12) pada tahun 2013 panjang jalan aspal (473.070) mengalami penurunan ± 64.380 km yang disebabkan antara adanya perubahan status jalan dari jalan Kabupaten menjadi jalan Provinsi

atau Negara dan sebagian adanya bencana banjir mengakibatkan penggarusan aspal jalan menimbulkan batu/krikil. Pada jalan permukaan krikil mengalami penambahan jalan (2013) 49.856 km. begitu juga jalan permukaan tanah (2013) bertambah 3.242 km sedang jalan permukaan beton (2013) telah sepanjang 17.50 km. Kemudian pada tahun 2014 permukaan aspal bertambah sepanjang 518,70 km, permukaan kerikil mengalami penurunan menjadi 100,45 km, permukaan tanah juga mengalami penurunan menjadi sepanjang 217,31 km dan permukaan beton sepanjang 14,10 km. Dari keseluruhan tahun 2014 mengalami penambahan jalan sepanjang 850,56 km, lihat tabel dibawah.

**Tabel 2.27**  
**Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2012-2014**



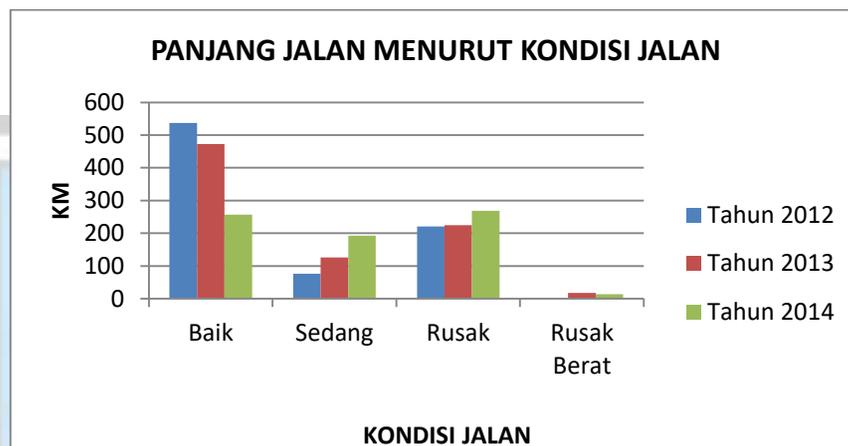
Jenis Permukaan	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (km)		
	2012	2013	2014
Aspal	537.45	473.07	518.70
Kerikil	75.88	125.74	100.45
Tanah	221.04	224.46	217.31
Beton	0.00	17.50	14.10
Jumlah	834.37	840.77	850.56

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016  
<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

Sedangkan menurut kondisi jalan terbagi atas kondisi baik, sedang dan rusak, pada tahun 2012 dimana jalan dalam kondisi baik dari tahun 2012 sepanjang 537,45 km sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 256,45 km, kondisi jalan dalam keadaan sedang dri tahun 2012 sepanjang 75,88 km mengalami peningkatan kondisi menjadi sepanjang 192,04 km, kondisi jalan dalam keadaan rusak pada tahun 2012 sepanjang 221,04 km sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sepanjang 268,45 km dan kondisi jalan dalam keadaan rusak berat

yang pada tahun 2012 0 km pada tahun 2014 menjadi 13,62 km. Dari grafik yang ada panjang jalan menurut kondisi jalan memang mengalami penurunan kondisi. (lihat tabel.2.13)

**Tabel 2.28**  
**Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2012-2014**



Kondisi Jalan	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)		
	2012	2013	2014
Baik	537.45	473.07	256.45
Sedang	75.88	125.74	192.04
Rusak	221.04	224.46	268.45
Rusak Berat	0	17.5	13.62
Jumlah	834.37	840.77	850.56

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016  
<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

#### 2.2.4 Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang berupa masjid di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014 sebanyak 125 mesjid dimana jumlah terbesar pada Kecamatan Padang Batung sejumlah 23 unit dan terendah pada Kecamatan Daha Barat sebanyak 4 unit. Sedangkan untuk langgar/mushala sebanyak 693 mushala, dengan jumlah terbesar dimiliki oleh Kecamatan Kandangan sebanyak 130 unit dan tekecil sebanyak 20 unit dimiliki oleh Kecamatan Loksado. Sedangkan fasilitas peribadatan yang berupa gereja, terdapat 2 gereja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertempat di Kecamatan Loksado. Pada tahun 2003 fasilitas peribadatan balai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya terdapat di Kecamatan Loksado sebanyak 37 unit, tetapi dalam perkembangannya balai adat di loksado ini pada tahun 2015 bertambah menjadi 45 buah.

**Tabel 2.9**  
**Jumlah Tempat Peribadatan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2013-2014**

Kecamatan	Jumlah Tempat Peribadatan												
	Masjid		Mushola		Gereja Protestan		Gereja Katolik		Pura		Vihara		
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	
PADANG BATUNG	23	23	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LOKSADO	11	11	17	20	2	2	-	-	-	-	-	-	-
TELAGA LANGSAT	10	9	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANGKINANG	10	10	57	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KANDANGAN	20	20	128	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUNGAI RAYA	13	14	91	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIMPUR	11	11	69	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KALUMPANG	5	5	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAHA SELATAN	8	8	77	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAHA BARAT	4	4	22	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAHA UTARA	10	10	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HULU SUNGAI SELATAN	125	125	676	693	2	2	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

### 2.2.5 Sistem Sanitasi dan Persampahan

Cakupan pengelolaan limbah cair di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari jumlah penduduk yang ada 249.070 jiwa, sebanyak 82.996 jiwa (33,32%) telah memiliki akses terhadap jamban secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.30**  
**Akses Terhadap Jamban Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Cakupan Akses Sanitasi Layak			Jumlah Jiwa yg Telah Mengakses Sanitasi yg Layak		
Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
33,32%	65,23%	33,03%	82.348	24.632	57.716
Cakupan yg Belum Mendapat Akses Sanitasi Layak					
Total	Perkotaan	Perdesaan			
67,68%	34,77%	66,97%			

Sumber : Diolah dari data Dinas PU dan Dinas Kesehatan, 2014

Pelayanan bidang persampahan/limbah padat hingga saat ini masih terbatas pada wilayah perkotaan yang meliputi penyediaan fasilitas penanganan sampah dan pengelolaan persampahan. Persentase terbesar timbunan sampah dari semua sumber sampah, adalah sampah yang bersumber dari permukiman penduduk, sedangkan terkecil dari perkantoran dari keseluruhan timbunan sampah.

Potensi timbunan sampah yang ada pada kawasan terlayani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2015 adalah sebesar 315,25 m<sup>3</sup>/hari, diantaranya 20,08 m<sup>3</sup> sudah terpilah dan memberi manfaat ekonomis dan ± 184,8 m<sup>3</sup> diangkut dan dibuang ke TPA dan sampah yang tidak terangkut sebesar 62,28 m<sup>3</sup>.

**Tabel 2.32**  
**Data Pengelolaan Persampahan**  
**di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 -2015**

No	Uraian	2010 (m <sup>3</sup> /hari)	2011 (m <sup>3</sup> /hari)	2012 (m <sup>3</sup> /hari)	2013 (m <sup>3</sup> /hari)	2014 (m <sup>3</sup> /hari)	2015 (m <sup>3</sup> /hari)
1.	- Total timbunan sampah pada wilayah terlayani	121,77	124,66	130,28	253	300,23	315,25
2.	- Sampah terpilah	-	11,72	25,95	0,56	20,08	20,08
3.	- Sampah diangkut ke TPA	121,77	112,94	104,32	136	169,2	184,8
4.	- Sampah tidak terangkut	-	-	-	117	110,23	62,28

Sumber : Dinas LH Takodes , 2016

### 2.2.6 Irigasi

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pengembangan sistem Daerah Irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saat ini dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu :

1. DI. Telaga Langsung berada di Kecamatan Telaga Langsung dibangun tahun 1989 mempunyai luas potensial 4.000 ha dan luas fungsionalnya kurang lebih 3.018 hadengan debit maksimum 14,702 m<sup>3</sup>/detik, rata-rata 7,83 m<sup>3</sup>/detik sedangkan debit minimum 0,974 m<sup>3</sup>/detik.
2. DI. Amandit yang berlokasi di Desa Malutu Kecamatan Padang Batung dibangun mulai tahun 2005 dengan menggunakan Loan JBIC IP-505 mempunyai luas kurang lebih 5.472 Ha, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air irigasi dan meningkatkan daerah irigasinya seluas 5400 hektar.

### 2.2.7 Jembatan

Jumlah prasarana jembatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2013 mengalami perubahan jenis jembatan, yaitu jembatan besi tetap sebanyak 8 buah, beton bertambah menjadi sebanyak 116 buah sedangkan Kayu Ulin menurun menjadi sebanyak 376 buah (lihat tabel.2.16), sedangkan jenis kondisi jembatan terbagi atas kondisi baik 89 buah, kondisi sedang 405 buah, kondisi rusak 6 buah dan kondisi rusak berat tidak ada (lihat tabel.2.33)

**Tabel 2.33**  
**Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Bahan Jembatan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Jenis Bahan	STATUS JALAN														
	JALAN NEGARA					JALAN PROPINSI					JALAN KABUPATEN				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1. Besi	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	7	7	8	8	8
2. Beton	9	9	9	9	9	17	30	30	30	30	17	29	39	62	116
3. Kayu	-	-	-	-	-	37	24	24	24	24	474	462	452	430	376
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan (2014).

**Tabel 2.34**  
**Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Kondisi Jembatan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Kondisi Jembatan	STATUS JALAN														
	JALAN NEGARA					JALAN PROPINSI					JALAN KABUPATEN				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1. Baik	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	23	46	50	66	89
2. Sedang	9	9	9	9	9	54	54	54	54	54	452	448	432	411	405
3. Rusak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	13	14	6
4. Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	3	9	-
<b>Jumlah II</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan (2014)

**Tabel 2.35**  
**Banyaknya Jembatan Menurut Jenis Bahan Jembatan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015**

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Beton <i>Concrete</i>	Besi <i>Iron</i>	Kayu <i>Wooden</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Padang Batung	18	3	36	57
2 Loksado	3	-	47	50
3 Telaga Langsung	22	-	38	60
4 Angkinang	10	-	31	41
5 Kandangan	16	3	27	46
6 Sungai Raya	10	-	52	62
7 Simpur	15	-	20	35
8 Kalumpang	6	-	24	30
9 Daha Selatan	17	2	20	39
10 Daha Barat	9	-	32	41
11 Daha Utara	18	-	21	39
Jumlah/Total	144	8	348	500

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan (2015)

### 2.3 Air Minum

Pelayanan air minum untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di wilayah perkotaan dilayani oleh PDAM dan di wilayah perdesaan masih menggunakan air minum non perpipaan dengan sumber air berasal dari sumur, sungai dan mata air lainnya. Sumber air minum rumah tangga yang terbesar adalah bersumber dari air sungai (30,57%), kemudian sumur pompa (28,20%) baru air bersih PDAM sebesar 25,97% (lihat tabel 2.18)

**Tabel 2.36**  
**Persentase Rumahtangga**  
**Menurut Penggunaan Sumber Air Minum**

Sumber Air Minum	Persentase (%)
Air bersih PDAM (meteran & eceran)	25,97
Air sungai	30,57
Mata air tak terlindung	1,33
Mata air terlindung	2,15
Sumur tak terlindung	7,82
Sumur pompa	28,20
Sumur Terlindung	3,01
Air kemasan	0,95

Sumber : BPS Kabupaten HSS, SP 2014

Sesuai dengan data PDAM Kandangan jumlah pelanggan telah mencapai 13.236 sambungan atau melayani 79.416 jiwa (31,88%) dari total penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan untuk sambungan air minum non perpipaan hingga tahun 2013 jumlah penduduk yang dapat mengakses 35.553 jiwa (14,27%).

Sedangkan secara cakupan akses air minum yang layak jika dibagi menurut wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat sebagaimana pada tabel 2.37

**Tabel 2.37**  
**Cakupan Pelayanan Air Bersih Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015**

Cakupan Akses Aman Air Minum (2013)			Jumlah Jiwa yg Telah Mengakses Aman Air Minum (2013)		
Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
62,98%	74,28%	59,30%	141.632	40.980	100.652
Cakupan yg Belum Dilayani					
Total	Perkotaan	Perdesaan			
37,02%	25,72%	40,70%			

Sumber : Diolah dari data PDAM, DPU dan Dinas Kesehatan Kab. HSS, 2015

## 2.4 Transportasi

### a. Sarana Transportasi Darat

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam hal ini infrastruktur dalam bidang perhubungan.

Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Infrastruktur transportasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu mendapat perhatian, dan terus ditingkatkan dalam menuju infrastruktur layak dan standard. Untuk infrastruktur jalan hal ini terlihat dari kondisi jalan dan prasarana keselamatan jalan seperti rambu dan marka yang masih perlu ditingkatkan. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan jumlah panjang jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat mencapai panjang 164.535 Km (39,61%) pada tahun 2014. Kondisi jalan yang kurang ideal tentunya juga menjadi tolak ukur akan sarana keselamatan transportasi yang juga kurang memadai, sehingga tidak bisa dipungkiri akan berdampak pada keselamatan pengguna jalan dan di khawatirkan akan adanya kecelakaan lalu lintas.

Selain infrastruktur jalan, sarana penunjang transportasi lainnya adalah terminal. Terminal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada empat, yaitu : Terminal Bus Kandangan, Terminal Kota Kandangan, Terminal Andi Tajang, dan Terminal Banjar Baru.

Sebagai kawasan yang terletak di perlintasan benua enam, Kota Kandangan mempunyai persoalan dengan terminal, karena kapasitas dan kelayakan prasarana yang belum memadai. Sebagai

contoh terminal bus Kandangan yang merupakan jalur luar antar kota antar provinsi yang dilewati oleh bus dari Banjarmasin ke Balikpapan-Samarinda, Banjarmasin ke Buntok/Muara Teweh atau sebaliknya, dan merupakan jalur transit lintas provinsi antara Kalsel – Kaltim, Kalsel – Kalteng. Secara kuantitas sirkulasi angkutan setiap harinya adalah bus 15 buah dan minibus (colt) 200 buah, dalam segi fasilitas yang tersedia belum lengkap, bersih dan memenuhi standar terminal sehingga para penumpang akan merasa nyaman apabila singgah dan transit di terminal ini.

Berdasarkan pendataan rambu dan marka jalan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2013, maka didapat jumlah seluruh rambu dan marka yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 239 buah, dengan pembagian Kecamatan Kandangan sebanyak 169 buah, Kecamatan Sungai Raya sebanyak 17 buah, Kecamatan Simpur 6 buah, Kecamatan Kalumpang 3 buah, Kecamatan Angkinang 19 buah, Kecamatan Telaga Langsat 10 buah Kecamatan Padang Batung 13 buah, Kecamatan Daha Selatan 2 buah.

Adapun kebutuhan sarana keselamatan transportasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih sangat banyak, hal ini misalnya terlihat dari hasil pendataan kebutuhan rambu dan marka jalan yang dilakukan pada tahun 2017, Kecamatan Loksado diperlukan sebanyak 162 buah, Guard rail sepanjang 240 meter.

#### b. Sarana Transportasi Sungai dan Danau

Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara geografis terdiri dari Pegunungan, datar dan Rawa. Di daerah rawa yang dibalut sungai ini kebanyakan berada di Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat. Dan di daerah inilah peran transportasi sungai sangat besar.

Angkutan sungai merupakan sebagai jembatan “mengapung” yang berfungsi menghubungkan jaringan transportasi darat yang terputus atau menjadi alternatif pilihan transportasi masyarakat. Angkutan sungai dan danau diperlukan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghidupkan perekonomian daerah sungai, serta memberikan aksesibilitas yang lebih baik sehingga dapat mengakomodasi peningkatan kebutuhan mobilitas penduduk, serta juga berfungsi melayani transportasi yang menjangkau daerah terpencil dan daerah pedalaman.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat dua dermaga/pelabuhan yaitu : dermaga/pelabuhan Pasar Senin dan dermaga/pelabuhan Tumbukan Banyu. Kondisi kedua dermaga ini tidak terlalu layak dan kurang memadai. Padahal potensi dan peran strategis dua dermaga ini sangatlah besar untuk kedepannya.

Kondisi dermaga pelabuhan di Hulu Sungai Selatan yang sebagian besar sudah tidak layak sehingga menghambat kelancaran arus barang, menimbulkan inefisiensi, memicu ekonomi biaya tinggi, dan menciptakan iklim usaha tidak kondusif. Kondisi ini membuat biaya distribusi barang cukup tinggi. Kondisi alur sungai yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan alur oleh gulma air

cukup menghambat kelancaran arus lalu lintas air di Hulu Sungai Selatan.

c. Sarana Telekomunikasi dan Informatika

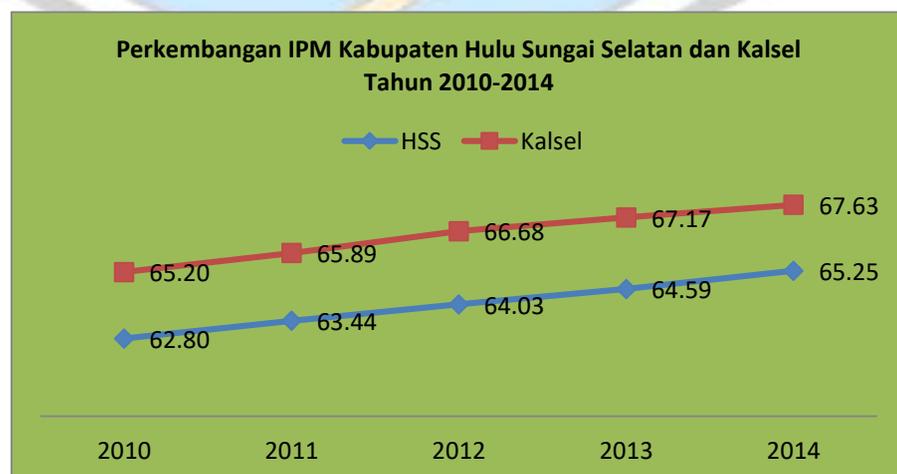
Pelayanan sarana telekomunikasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah terdapat hampir menyeluruh di semua kecamatan yang ada dengan jangkauan pelayanan rumah tangga, instansi pemerintah, dan perkantoran. Keadaan ini juga ditunjang oleh banyaknya menara telekomunikasi (BTS). Jumlah menara telekomunikasi sampai tahun 2015 berjumlah 75 buah yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan . Dan akses internet sudah masuk keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kategori 7 kecamatan menggunakan fasilitas telkom dan 4 kecamatan dengan vsat.

### 2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

#### 2.3.1 Pencapaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang berbasis manusia, dimana manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir dan menuntut adanya pemerataan dalam pembangunan. Seperti yang telah disampaikan pada bab pendahuluan bahwa dampak dari perubahan metodologi diantaranya adalah perubahan nilai IPM itu sendiri menjadi lebih kecil bila dibandingkan metode lama. Hal ini terjadi tidak hanya pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetapi juga pada seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Secara umum angka IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun namun masih berada di bawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.6**  
**Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dan Kalsel Tahun 2010-2014**



Sumber: BPS Kab.Hulu Sungai Selatan

Pencapaian nilai IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014 adalah 65,25 termasuk kedalam klasifikasi IPM sedang ( $60 < IPM < 70$ ), turut juga termasuk kedalam klasifikasi ini adalah IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan 10 kabupaten lain yang ada di Kalimantan Selatan, sedangkan Kota Banjarbaru dan Banjarmasin termasuk dalam klasifikasi IPM tinggi ( $70 < IPM < 80$ ) seperti yang terlihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 2.38**  
**Perbandingan IPM Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan**  
**Tahun 2010-2014**

Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
Tanah Laut	63,56	64,35	65,16	66,11	66,50
Kota Baru	63,64	64,27	64,87	65,41	65,76
Banjar	64,46	64,75	65,04	65,36	65,71
Barito Kuala	60,24	60,93	61,62	62,12	62,56
Tapin	64,89	65,41	65,92	66,48	66,99
<b>Hulu Sungai Selatan</b>	<b>62,80</b>	<b>63,44</b>	<b>64,03</b>	<b>64,59</b>	<b>65,25</b>
Hulu Sungai Tengah	63,49	63,90	64,34	64,63	65,37
Hulu Sungai Utara	58,50	59,24	60,12	60,77	61,32
Tabalong	65,87	66,60	67,36	68,08	68,36
Tanah Bumbu	64,98	65,59	66,13	66,51	66,94
Balangan	62,88	63,28	63,69	64,03	64,44
Kota Banjarmasin	71,01	72,01	73,45	74,59	74,94
Kota Banjar Baru	75,49	76,23	76,67	77,10	77,30
Provinsi KALSEL	<b>65,20</b>	<b>65,89</b>	<b>66,68</b>	<b>67,17</b>	<b>67,63</b>

Sumber: BPS Kab.Hulu Sungai Selatan

### Laju Pertumbuhan Pencapaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Laju Pencapaian IPM digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu. Pada tahun 2013-2014 angka pertumbuhan IPM Hulu Sungai Selatan adalah 1,02. Angka ini lebih besar jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,87. Hal ini menunjukkan kecepatan pembangunan manusia di Hulu Sungai Selatan berjalan dengan relatif cukup baik karena bila dibandingkan pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota lain se kalimantan Selatan, pertumbuhan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan yang paling besar pertumbuhannya setelah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Semakin tinggi nilai pertumbuhannya maka semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

**Tabel 2.39**  
**Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota**  
**Se Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014**

Kabupaten/Kota	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Tanah Laut	1,24	1,25	1,47	0,58
Kota Baru	1,00	0,93	0,84	0,52
Banjar	0,46	0,45	0,48	0,54
Barito Kuala	1,14	1,12	0,81	0,72
Tapin	0,80	0,77	0,85	0,78
<b>Hulu Sungai Selatan</b>	<b>1,02</b>	<b>0,93</b>	<b>0,87</b>	<b>1,02</b>
Hulu Sungai Tengah	0,65	0,68	0,46	1,14
Hulu Sungai Utara	1,27	1,49	1,07	0,91
Tabalong	1,11	1,15	1,06	0,42
Tanah Bumbu	0,93	0,82	0,58	0,64
Balangan	0,64	0,65	0,53	0,64
Kota Banjarmasin	1,41	1,99	1,55	0,48
Kota Banjar Baru	0,99	0,58	0,56	0,26
<b>Provinsi KALSEL</b>	<b>1,05</b>	<b>1,20</b>	<b>0,74</b>	<b>0,68</b>

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan

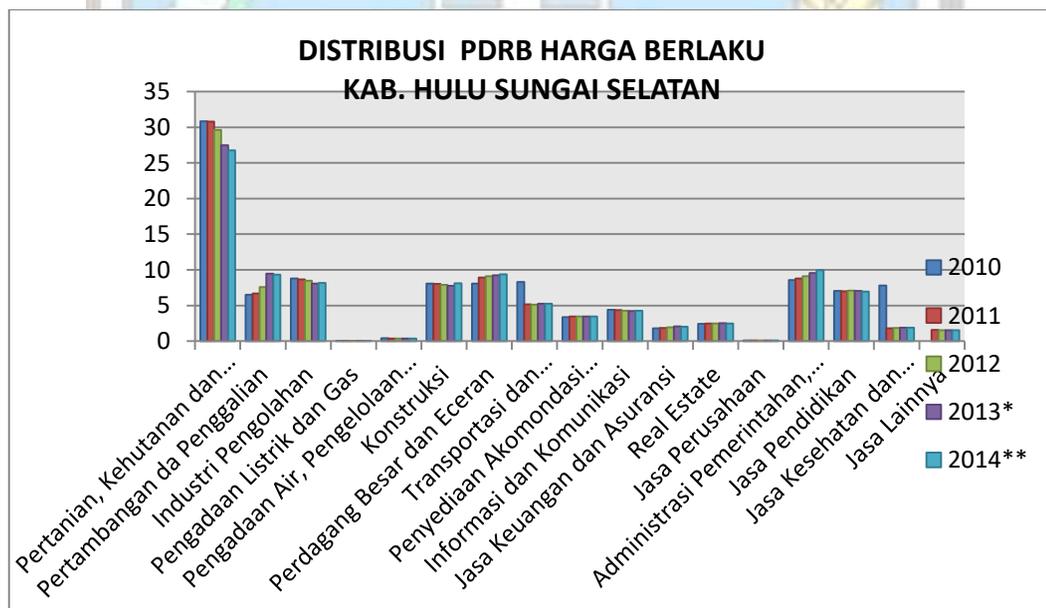
Meskipun pembangunan Manusia di Hulu Sungai Selatan menunjukkan arah yang positif dimana akselerasinya terus meningkat dari tahun ke tahun, namun demikian capaian pembangunan manusia masih belum maksimal karena adanya beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi. Pencapaian IPM yang ada saat ini memang masih jauh dari sempurna, namun hal ini sudah seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia karena pembangunan manusia tidak hanya ditekankan pada level pencapaian tetapi juga pada kecepatannya. Dalam pembahasan berikut ini akan dianalisis lebih lanjut terhadap permasalahan yang terjadi pada masing – masing dimensi pembentuk IPM.

### 2.3.1. Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Hulu Sungai Selatan (PDRB)

Postur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebelum dan sesudah perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010, menunjukkan bahwa corak perekonomian masih berada pada tipe agraris. Hal ini terlihat dari besarnya dominasi kategori lapangan usaha pertanian yang menyumbang 26,74% dari total PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014. Hal ini juga menunjukkan eksploitasi sumber daya dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung di sektor pertanian lebih tinggi untuk dapat tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain. Namun pada perjalanannya, besaran kontribusi kategori lapangan usaha

pertanian sejak tahun 2010 hingga 2014 terus berangsur mengalami penyusutan, dari yang sebelumnya sebesar 30,85% di tahun 2010 menjadi 26,74% ditahun 2014. Disisi lain terjadi peningkatan kontribusi yang signifikan antara lain terjadi pada kategori lapangan usaha pertambangan, perdagangan besar dan eceran, serta administrasi pemerintahan waktu 4 tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah menambah dominasi dari ketiga kategori di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penciptaan nilai tambah. Pada tahun dasar 2010 ini, kategori lapangan usaha pertambangan menjadi salah satu sektor penyumbang nilai tambah terbesar dimana hal ini menjadi gebrakan baru dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara global. Sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi tersebut diekspor ke Cina dan India. Sedangkan dominasi kategori perdagangan dan administrasi pemerintah masih sama besarnya seperti yang terjadi sebelum perubahan tahun dasar dalam dalam membentuk struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 2.40**  
**Distribusi PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014**



NO	Sektor/Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,85	30,8	29,65	27,49	26,74
2	Pertambangan dan Penggalian	6,51	6,66	7,6	9,48	9,31
3	Industri Pengolahan	8,8	8,65	8,46	8,05	8,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,41	0,38	0,37	0,35	0,35
6	Konstruksi	8,05	8,01	7,87	7,78	8,13

7	Perdagang Besar dan Eceran	8085	8,91	9,12	9,25	9,37
8	Transportasi dan Pergudangan	8,31	5,16	5,13	5,24	5,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,38	3,47	3,46	3,44	3,47
10	Informasi dan Komunikasi	4,4	4,34	4,26	4,2	4,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,8	1,83	1,93	2,06	2,03
12	Real Estate	2,44	2,49	2,48	2,51	2,45
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	8,57	8,78	9,09	9,54	9,96
15	Jasa Pendidikan	7,03	6,99	7,07	7,06	6,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,82	1,79	1,82	1,88	1,88
17	Jasa Lainnya	1,62	1,59	1,55	1,52	1,53
	Total	100	100	100	100	100

**Sumber : PDRB Kab. HSS Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (tahun dasar 2010)**

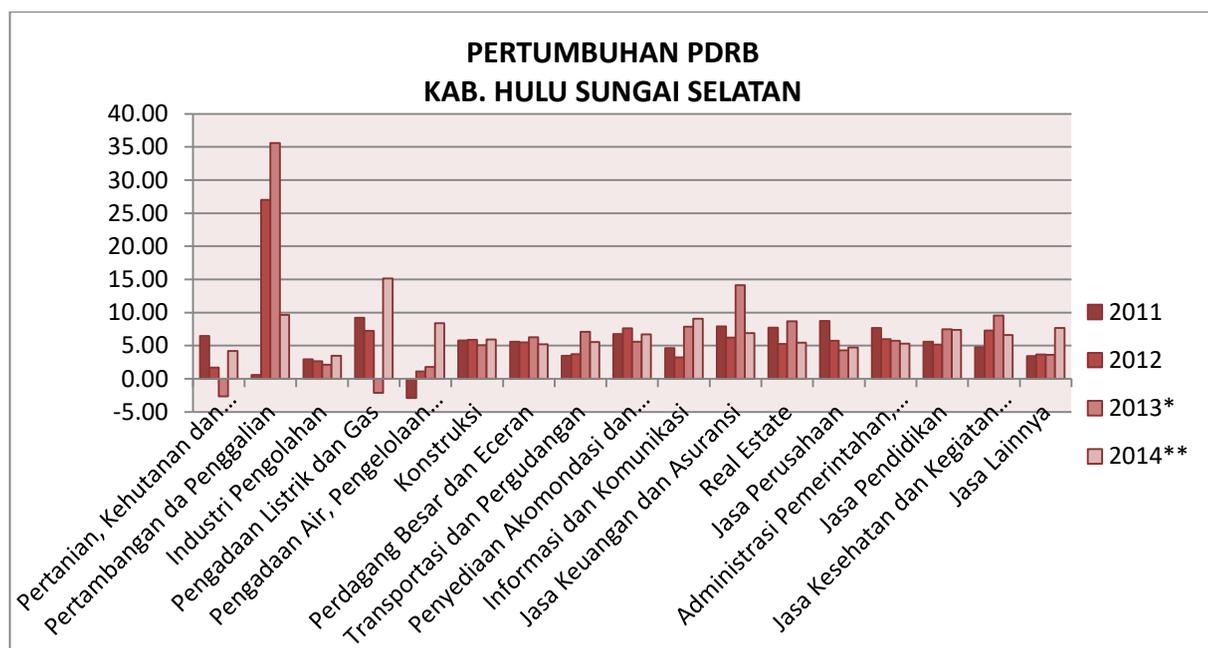
**\*\*) Angka diperbaiki**

**\*) Angka sementara**

Secara agregat perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2011 hingga 2014 cenderung stabil meski agak sedikit melambat ditahun 2010 menjadi 5,33% dari 5,04% pada tahun 2011. Namun pada periode berikutnya, laju pertumbuhan ekonomi terus merangkak naik menjadi 5,80% pada tahun 2014. Salah satu faktor yang menyebabkan percepatan ini adalah diakibatkan karena meningkatnya produksi dan eksploitasi batubara di kategori lapangan usaha pertambangan serta membaiknya pertumbuhan di kategori pertanian tanaman pangan (peningkatan produksi padi) yang menjadi sumber pertumbuhan selama ini.

Padahal pada tingkat makro dan global, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun belakangan terlihat melemah akibat dari menurunnya produksi pertambangan batubara yang disupply dari beberapa kabupaten serta perlambatan ekonomi di dunia yaitu krisis eropa yang tidak kunjung reda, Namun akibat dari krisis tersebut tidak berdampak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 2.41**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Menurut Harga Konstan 2010**



No	Sektor/Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,47	1,69	-2,63	4,22
2	Pertambangan dan Penggalian	0,58	27,01	35,61	9,66
3	Industri Pengolahan	2,96	2,63	2,12	3,46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,20	7,23	-2,12	15,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	-2,89	1,12	1,77	8,39
6	Konstruksi	5,81	5,91	5,07	5,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5,59	5,51	6,27	5,20
8	Transportasi dan Pergudangan	3,45	3,73	7,09	5,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,74	7,61	5,62	6,69
10	Informasi dan Komunikasi	4,61	3,24	7,87	9,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,92	6,21	14,14	6,91
12	Real Estate	7,70	5,25	8,68	5,44
13	Jasa Perusahaan	8,73	5,74	4,30	4,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,66	5,96	5,76	5,31
15	Jasa Pendidikan	5,62	5,18	7,46	7,38

16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,76	7,30	9,56	6,61
17	Jasa Lainnya	3,44	3,67	3,60	7,68
	Total	5,40	5,33	5,68	5,80

Sumber : PDRB Kab. HSS Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (tahun dasar 2010)

\*\*) Angka diperbaiki

\*) Angka sementara

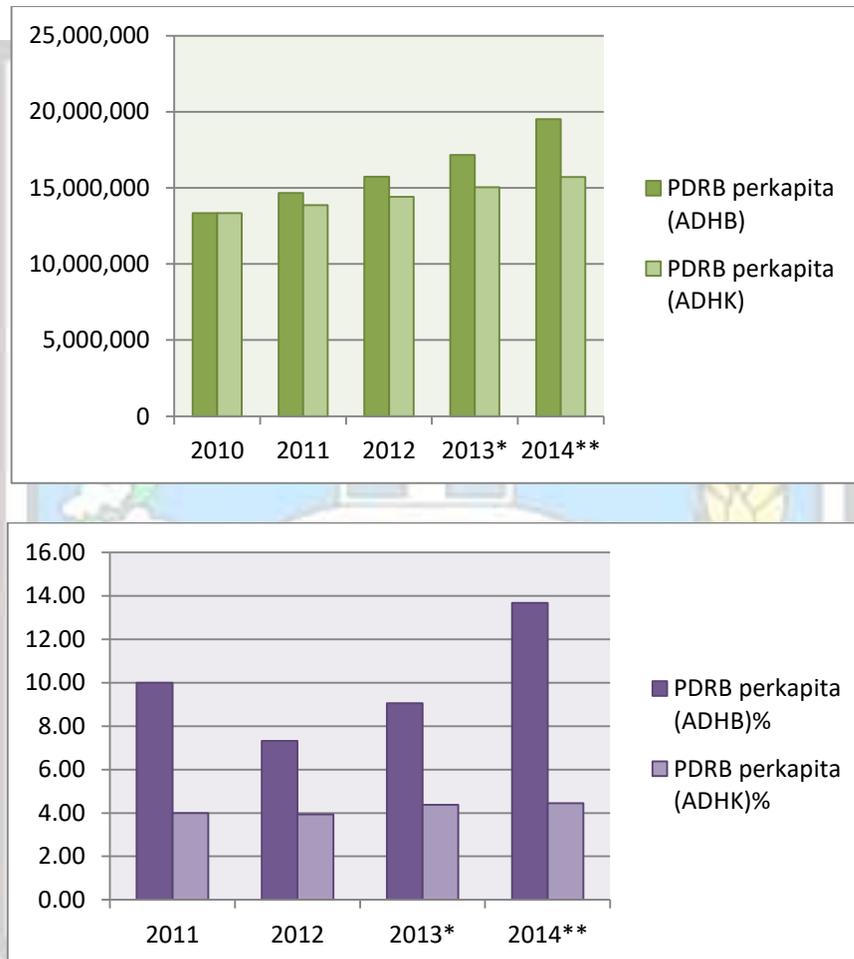
PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Negara yang sudah maju, rata-rata memiliki PDRB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Menurut klasifikasi world bank, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.045 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan rendah. Sementara negara yang berpendapatan perkapita antara \$. 1.045-\$4.125 termasuk negara berpendapatan menengah kebawah (lower middle income), negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$4.125-\$12.746 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi (upper middle income), negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$4.125-\$12.746 dikategorikan sebagai negara yang memiliki pendapatan menengah tinggi (upper middle income). Sedangkan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.746 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan hanyalah sasaran antara (syarat perlu) bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, tujuan pembangunan akan sulit terwujud. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator komperhensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakanginya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah. Selama kurun waktu 2010-2014 nilai nominal PDRB perkapita atas dasar harga berlaku semakin meningkat setiap tahunnya dari 13,3 juta rupiah pada tahun 2010 menjadi 19,5 juta rupiah pada tahun 2014. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkaipita Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih termasuk dalam kategori berpendapatan menengah kebawah. Dari sisi PDRB perkapita konstan, PDRB perkapita Hulu Sungai Selatan sempat tumbuh melambat di tahun

2012 sebesar 3,93% dari yang sebelumnya tumbuh 4% ditahun 2011. Namun pada tahun berikutnya pertumbuhan PDRB per kapita terlihat membaik hingga tahun 2014 tumbuh sebesar 4,45%. Kondisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (lihat tabel 2.42).

**Tabel 2.42**  
**PDRB Perkapita Kabupaten HSS Tahun 2010-2014**



NO	PDRB	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	PDRB perkapita (ADHB)	13.336.030	14.669.092	15.743.437	17.168.890	19.518.042
2	PDRB perkapita (ADHK)	13.336.030	13.869.014	14.413.916	15.045.210	15.715.367
	<i>pertumbuhan</i>	-				
3	PDRB perkapita (ADHB)%	-	10,00	7,32	9,05	13,68
4	PDRB perkapita (ADHK)%	-	4,00	3,93	4,38	4,45

Sumber : PDRB Kab. HSS Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (tahun dasar 2010)

\*\*) Angka diperbaiki

\*) Angka sementara

Jika dilihat dari distribusi pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menggunakan koefisien gini pada tahun 2007 nilai koefisiennya 0,22 dan 40% pendapatan yang dinikmati oleh penduduk pendapatan rendah 26,15% dari total pendapatan, kemudian pada tahun 2011 sebesar 0,34 dan mendapatkan bagian pendapatan 19,41% (tabel 2.43) yang berarti pembagian pendapatan semakin tidak merata, atau bisa juga dikatakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi semakin tidak berkualitas. Pada tahun 2012 nilai koefisien gini 0,34 maka pada tahun 2013 nilai koefisiennya mengalami penurunan menjadi 0,25 .

**Tabel 2.43**  
**Distribusi Koefisiin Gini /Pendapatan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2002 - 2013**

Kabupaten	Gini Ratio											
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
HULU SUNGAI SELATAN	0.24	0.25	0.3	0.29	0.25	0.22	0.26	0.32	0.23	0.34	0.33	0.25

Tahun	Koefisien Gini	40% Pendapatan yang Dinikmati oleh Penduduk Pendapatan Rendah
2007	0,22	26,15
2008	0,26	22,04
2009	0,32	20,43
2010	0,33	25,33
2011	0,34	19,41
2012	0,33	-
2013	0,25	-

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016  
BPS , data diolah

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

### 2.3.2 Kemiskinan

Meskipun perekonomian terus tumbuh, namun pertumbuhan tersebut berbanding terbalik dengan jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan dilihat dari tren hasil perhitungan BPS, maka setiap tahunnya mengalami kenaikan ditahun 2013 sebanyak 332.312 orang dan ditahun 2014 di survey sebanyak 351.691 orang di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.(lihat tabel)

**Tabel 2.44**  
**Jumlah Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**2007-2014**



Kabupaten	Garis Kemiskinan							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
HULU SUNGAI SELATAN	166,073	223,000	225,737	256,878	279,594	305,283	332,312	351,691

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Untuk tahun 2014, angka kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan beberapa sebab diantaranya: tenaga kerja dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sebelumnya merantau dan bekerja pada sektor usaha kehutanan (pengolahan kayu) pada kabupaten tetangga kembali ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut banyak yang merumahkan tenaga kerjanya. Berkurangnya penghasilan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan akibat harga komoditas perkebunan (khususnya karet) mengalami penurunan yang relatif tajam serta curah hujan yang tinggi pada tahun 2014 sehingga berdampak pada ketidakmaksimalan panen. Selain itu dampak krisis ekonomi global walaupun kecil tetapi cukup mempengaruhi perekonomian di Kabupten Hulu Sungai Selatan.

Permasalahan yang dihadapi dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain adalah karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersifat unik dikarenakan sumber mata pencaharian dari sebagian besar penduduk bersifat musiman, peningkatan angka kemiskinan secara umum didominasi oleh komposisi dari penduduk dengan kriteria hampir miskin sehingga apabila terjadi sedikit gejolak atau fenomena sosial, penduduk yang hampir miskin ini akan masuk dalam kriteria miskin. Selain itu indikator dan instrumen

kemiskinan yang diperluas pada tahun 2014 juga menambah jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## 2.4 Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

### 2.4.1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebar di 11 kecamatan, dengan mayoritas jenis komoditas pertanian yang dikembangkan adalah komoditas padi. Adapun beberapa komoditi pertanian yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

- Padi diusahakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Jagung dikembangkan di Kecamatan Kandangan, Simpur dan Kalumpang;
- Ubi Kayu diusahakan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Kalumpang, Daha Utara, Daha Barat dan Daha Selatan;
- Ubi Jalar dikembangkan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Kandangan, Sungai Raya, dan Kecamatan Kalumpang. Sebagai sentra tanaman ubi jalar (gumbili nagara) adalah di Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Daha Barat;
- Kacang Hijau dikembangkan di Kecamatan Telaga Langsung, Angkinang, dan Kandangan;
- Kedelai dikembangkan di Kecamatan Kalumpang dan Kandangan; serta
- Kacang Tanah diusahakan pada lahan kering terutama Kecamatan Loksado, Padang Batung, Telaga Langsung dan Sungai Raya.

Pada tabel 2.27 terlihat bahwa produksi padi mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2013 produksi padi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 210.225 ton gabah kering giling, dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 8.934 ton gabah kering giling dengan total produksi 219.159 ton.

Demikian pola pada tahun 2015 produksi padi juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2014. Berdasarkan angka sementara yang dikeluarkan BPS produksi padi tahun 2015 sebesar 232.950 ton atau mengalami kenaikan 13.791 ton (6,3 %).

Kenaikan produksi ini didukung oleh :

- Adanya perbaikan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)
- Bantuan dan Penggunaan Alsintan seperti Handtraktor, Pompa Air, Power Thresher dan lain-lain.
- Penyediaan benih dan pupuk bersubsidi
- Kegiatan Optimasi Lahan
- Peningkatan Luas Tanam terutama di daerah lebak sebagai dampak elnino.
- Perbaikan cara bercocok tanam oleh petani.

Untuk komoditas lainnya mengalami perkembangan yang fluktuatif, hal ini terkait dengan kondisi/anomali iklim yang kurang mendukung. Data Produksi Tanaman Pangan dapat dilihat pada tabel 2.45

**Tabel 2.45**  
**Produksi Padi Dan Tanaman Pangan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2015**

No	Komoditas Pertanian TPH	Produksi (Ton)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
1.	Padi sawah	159.070	210.881	223.625	191.985	219.159	232.950
2.	Padi Ladang	19.988	19.173	19.228	18.240	-	-
3.	Jagung	479	2.500	4.659	844	1.334	5.093
4.	Ubi Kayu	2.777	1.984	1.913	1.753	1.864	1.174
5.	Ubi Jalar	9.400	10.472	7.928	4.846	6.214	5.944
6.	Kacang Tanah	902	646	634	512	578	447
7.	Kedelai	3	75	248	19	19	36
8.	Kacang Hijau	16	17	8	5	25	26

Sumber :Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab HSS

Pembinaan lembaga distribusi pangan yang peduli terhadap kebutuhan pangan masyarakat dan menjaga kestabilan pangan saat panen raya terutama komoditi padi. Kegiatan yang telah dilaksanakan penyaluran dana talangan LUEP APBD I, APBD II dan PL-DPM dana Bansos APBN (lihat tabel) .

**Tabel 2.46**  
**Lembaga Distribusi Pangan**

No.	Nama Gapoktan, Desa,Kecamatan	Jumlah dana (Rp)	Tahun
1.	Banua Jaya, Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan	225.000.000	2009 & 2010 (APBN)
2.	Bangun Banua, Desa Bamban Kec. Angkinang	225.000.000	2010 &2011 (APBN)
3.	Barakat Desa Amparaya Kecamatan Simpur	225.000.000	2013 & 2014 (APBN)
4.	Gutami Desa Madang Kec. Padang Batung	150.000.000	2015 (APBN)
5.	Poktan Suka Damai Desa Loksado Kec.Loksado	50.000.000	2013 (APBD I)
6.	Poktan Mutu Usaha Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara	50.000.000	2013 (APBD I)
7.	Poktan Harapan Indah Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan	50.000.000	2013 (APBD I)
8.	Poktan Murung Raya, Bajayau Tengah Kecamatan Daha Barat	50.000.000	2013 (APBD I)

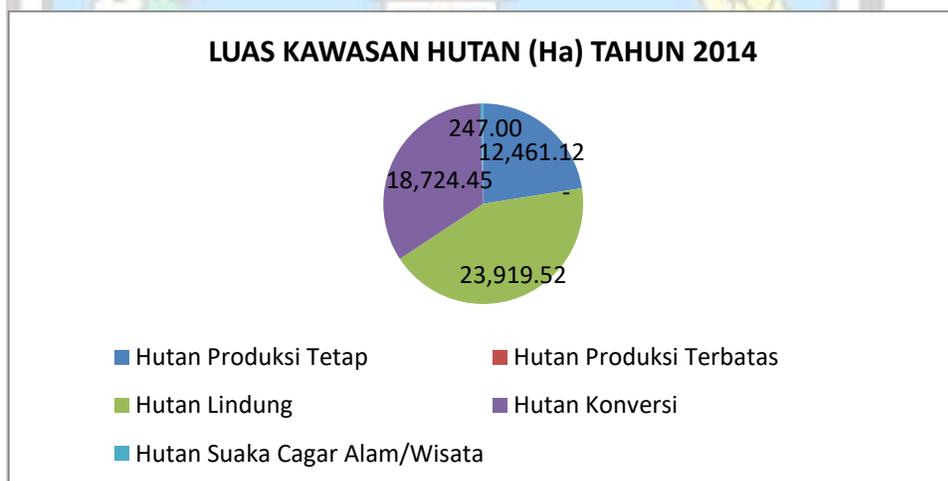
Sumber: Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kab. HSS

2.4.2. Sektor Kehutanan dan Perkebunan

a. Kehutanan

Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kawasan hutan yang tersebar secara tidak merata pada wilayah kecamatan. Sebagian kawasan hutan ini ada di bagian pinggiran atau pedalaman, diantara kawasan hutan ini masih ada yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Kawasan hutan yang terletak pada kawasan budidaya adalah kawasan hutan produksi konversi dan kawasan hutan produksi terbatas yang terletak pada kawasan hutan produksi. Jenis hutan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didominasi oleh kawasan hutan lindung seluas 23.918,0 Ha dan hutan produksi konversi dengan luas 18.722,0 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.30 berikut:

**Tabel 2.47**  
**Kawasan Hutan Di Kabupaten HSS Tahun 2014**



Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan (Hektar)	Luas (%)
	2014	
Hutan Produksi Tetap	12,461.12	22,5
Hutan Produksi Terbatas	-	-
Hutan Lindung	23,919.52	43,2
Hutan Konversi	18,724.45	33,8
Hutan Suaka Cagar Alam/Wisata	247.00	0,4
Jumlah	55,352.09	

Sumber : Badan Pusat Statistik,2016  
<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

Salah satu hasil kehutanan yang dikelola oleh rakyat dan bernilai ekonomis adalah berupa Kayu Manis. Kayu manis yang merupakan hasil hutan bukan kayu merupakan hasil unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikembangkan di Kecamatan Padang Batung dan Loksado, kayu manis tersebut sudah dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, yaitu serbuk kayu manis dan sirup kayu manis. Adapun luas areal yang dikembangkan untuk tanaman kayu manis adalah sebagaimana pada table 2.31

**Tabel 2.48**  
**Luas Areal Pengembangan Kayu Manis**  
**Di Kabupaten HSS Tahun 2011-2015**

No	Komoditas HHBK	Jumlah									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Areal (Ha)	Produksi (ton)								
1	Kayu Manis	2.585,38	1.391,00	2.552,38	1.391,00	2.585,38	1.391,00	2.550	1.468	2.571	1.536

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS Tahun 2015

b. Perkebunan

Perkebunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebar secara tidak merata pada tiap-tiap kecamatan yang ada. Jenis komoditi perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diantaranya adalah

- Perkebunan Rakyat Karet dikembangkan di Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Sungai Raya dan Kecamatan Simpur;
- Perkebunan Rakyat Kelapa dikembangkan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat;
- Perkebunan Rakyat Cengkeh dikembangkan di Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Kandangan dan Sungai Raya;
- Perkebunan Rakyat Kapuk dikembangkan di Kecamatan Kandangan dan Sungai Raya;
- Perkebunan Rakyat Lada dikembangkan di Kecamatan Padang Batung, Loksado, Angkinang dan Sungai Raya;
- Perkebunan Rakyat Kopi dikembangkan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat;
- Perkebunan Rakyat Coklat dikembangkan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kecuali Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat; dan
- Perkebunan Rakyat Kemiri dikembangkan di Kecamatan Padang Batung, Loksado, dan Telaga Langsat.

Luas areal perkebunan beberapa komoditi terus mengalami peningkatan, seperti karet pada tahun 2007 baru 10.803,00 ha meningkat menjadi 15.250.00 ha pada tahun 2014, kelapa sawit tahun 2012 hanya 6.800 Ha naik menjadi 9.786.70 Ha. Disusul

kelapa dalam yang tetap bertahan tahun 2009 8.298.38 mengalami kenaikan menjadi 8.604.36 tahun 2014 diiringi luas areal seperti kayu manis, aren dan beberapa komoditi lain (lihat tabel 2.49).

**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Luas Areal Perkebunan Rakyat**  
**Tahun 2009-2014**

No	Komoditas Perkebunan	Luas Areal (Ha)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Karet	12,986.03	13,906.03	14,711.01	14.943,00	15.250,00	15.373
2	Kelapa Dalam	8,435.38	8,535.38	8,565.38	8.806,86	8.604,36	8.652
3	Kemiri	1,838.33	1,811.33	1,825.33	1.824,43	1.824,43	1.820
4	Kakao	363.30	346.30	339.30	290,55	259,55	376
5	Kopi	238.61	243.61	243.61	175,50		178
6	Aren	174.73	179.64	253.64	249,26	247,26	249
7	Sawit/PR	2,084.00	2,234.00	3,034.00	2.977,50	2.982,50	2.985
8	Pinang	110.69	78.69	85.00	82,69	82,69	83
9	Lada	14.69	10.44	10.44	6,18	5,68	6
10	Sawit/PBS	-	-	6,800.00	9.039,61	9.786,70	10.716,77

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS Tahun 2015

Luas areal perkebunan beberapa komoditi terus mengalami peningkatan, seperti karet pada tahun 2010 baru seluas 12.986,03 Ha meningkat menjadi seluas 15.373,00 Ha pada tahun 2015, kelapa sawit milik Perkebunan Besar Swasta (PBS) tahun 2012 hanya seluas 6.800 Ha naik menjadi seluas 10.716,77 Ha. Disusul kelapa dalam yang tetap bertahan tahun 2010 seluas 8.435.38 Ha mengalami kenaikan menjadi 8.652 Ha tahun 2015 diiringi luas areal seperti kayu manis, aren dan beberapa komoditi lain (lihat tabel 2.50).

**Tabel 2.50**  
**Perkembangan Produksi Perkebunan Rakyat Tahun 2010-2015**

No	Komoditas Perkebunan	Produksi (Ton)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Karet	4,854.08	6,213.70	7,206.92	7.983,24	8.278,39	9.008
2	Kelapa Dalam	5,726.32	6,016.96	6,123.66	6.387,48	6.385,99	6.392
3	Kemiri	841.35	843.49	892	895,00	895,00	841,2
4	Kakao	20.49	18.09	27.1	52,73	39,59	24,4
5	Kayu Manis	1,283.66	1,391.00	1,436.53	1.457,43	1.466,36	1.536
6	Kopi	16.32	27.27	27.84	3,75	3,40	3,2
7	Aren	136.7	153.49	163.8	163,46	163,46	151,4
8	Pinang	8.8	6.79	21,00	23,00	23,00	18,5
9	Lada	2.07	2.47	3,00	1,40	1,40	0,9
10	Sawit/PBS	-	-	-	-	-	-
	- CPO	-	-	550	-	-	8.932,45
	- Inti Sawit	-	-	150	-	12.155,00	-
	- TBS	-	-	-	7.045,00	-	64.453,6
11	Sawit/PR	4,854.60	3,723.00	-	-	-	-
	- CPO	-	-	2,063.00	-	-	7.302
	- Inti Sawit	-	-	563,00	-	-	-
	- TBS	-	-	-	6.969,50	7.055,49	-

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. HSS Tahun 2015

**Tabel 2.51.**  
**Luas Tanam dan Produksi**  
**Menurut Komoditi dan Produksi, 2013**

Kecamatan	Jenis Pengusahaan (Ha)			Produksi (Ton)
	Rakyat	PBS	PTP	
1 Karet	14,943	-	-	7.98
2 Kelapa Sawit	2,975	9,451.62	-	6.97
3 Kelapa Dalam	8,588	-	-	6.39
4 Kopi	176.70	-	-	3.80
5 Kakau	314	-	-	0.05
6 Lada	6.55	-	-	1.39
7 Cengkeh	64.72	-	-	5.18
8 Kemiri	1,824	-	-	0.03
9 Kapuk	11.41	-	-	0.04
10 Aren	250.94	-	-	0.16
11 Kayu Manis	2,551.38	-	-	1.46

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

### 2.4.3. Perikanan dan Peternakan

#### a. Perikanan

Sektor perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Perikanan darat (air tawar), terbagi atas usaha perikanan budidaya dan usaha perikanan tangkap. Usaha perikanan budidaya meliputi kegiatan budidaya ikan (pembenihan dan pembesaran) dengan sistem pemeliharaan di kolam, karamba/jaring apung, dan minapadi. Sedangkan usaha perikanan tangkap merupakan kegiatan penangkapan ikan di perairan umum rawa dan sungai (tabel 2.52)

**Tabel 2.52**  
**Potensi Jenis Usaha Perikanan**  
**Di Kabupaten HSS**

No	Jenis Usaha Perikanan	Lokasi
1	Kolam	Loksado (0,75 ha), Padang Batung (2,39 ha), Telaga Langsung (4,48 ha), Angkinang (3,56 ha), Sei Raya (0,19 ha) Kandangan (0,99 ha), Kelumpang (0,25 ha), Daha Selatan (4,42 ha), Daha Barat (0,07 ha) dan Daha Utara (0,14 ha).
2	Karamba	Daha Selatan (2.350), Daha Utara (1.250), Kalumpang (48), Simpung (32), Kandangan (477), dan Daha Barat (1.125).
3	Minapadi	Angkinang (1 ha), Telaga Langsung (2 ha), Padang Batung (1,58 ha) dan Daha Utara (114,35 ha) dan Sungai Raya.

4	Penangkapan	Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Simpur, Daha Barat, Angkinang dan Kandangan
---	-------------	--

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS, 2015

Perkembangan produksi hasil budidaya perikanan mengalami fluktuasi, contoh produksi ikan mas pada tahun 2011 naik menjadi 77,25 ton dan pada tahun 2012 tidak menghasilkan lagi, fluktuasi ini terjadi karena dalam beberapa tahun terakhir terjadi wabah *Koi Herves Virus (KHV)* yang menyerang jenis ikan Koi (ikan mas) di hampir seluruh perairan di dunia, tidak terkecuali Kabupaten Hulu Sungai Selatan kemudian ditahun 2013 kembali produksi masih dalam skala kecil 1,9 ton(2013). Ke depannya diharapkan dengan kerjasama semua pihak komoditas ikan mas ini dapat dikembangkan karena merupakan ikan konsumsi masyarakat dan bernilai jual tinggi.

Produksi ikan nila mengalami perkembangan yang sangat baik, pada tahun 2011 baru 168,04 ton naik terus dan menjadi 1.064,84 ton pada tahun 2012, ikan patin pada tahun 2007 baru 435,65 ton juga terus naik menjadi 1.306,85 ton pada tahun 2012, ikan tauman pada tahun 2007 baru 130,52 ton, terus naik menjadi 1.645,67 ton pada tahun 2012. pada 2013 hanya beberapa jenis ikan yang terus dibudidayakan seperti ikan mas, nila, patin, tauman, lele, papuyu dan bawal air tawar (lihat tabel 2.53). Produksi benih ikan sejak tahun 2010 ada kecenderungan mengalami penurunan.

**Tabel 2.53**  
**Keadaan Produksi Budidaya Perikanan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011-2015**

No	JENIS IKAN	Produksi (Ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Ikan Mas	77,25	-	1,9	-	6,0
2	Ikan Nila	168,04	1.064,84	240,7	319,9	307,1
3	Patin	1.241,10	1.306,85	4.383,8	-	4462,5
4	Gabus	23,20	-	-	319,9	324
5	Tauman	1.331,50	1.645,67	2.928,70	3270,3	3270
6	Sepat Siam	-	-	-	-	-
7	Lele	34,18	532,42	15	47,3	47,8
8	Betok/Papuyu	34,68	290,41	6,20	9,3	9,3
9	Bawal Air Tawar	210,05	-	0,6	162,0	-
	<b>Total</b>	<b>3.671,05</b>	<b>4.840,19</b>	<b>7.641,05</b>	4.128,7	8.426,7

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS, Tahun 2015

**Tabel 2.54**  
**Keadaan Produksi Benih Ikan pada UPTD BBI**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011-2015**

No	Jenis Ikan	Produksi (ekor)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Mas	2.000		-	137.230	157.730
2.	Nila	270.000	200.000	410.00	102.500	205.400
3.	Patin	110.000	140.000	225.000	54.550	75.400
4.	Lele	-	-	190.000	11.500	18.000
<b>Total</b>		<b>392.000</b>	<b>340.000</b>	<b>825.000</b>	305.780	456.530

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS, Tahun 2015

**Tabel 2.55**  
**Keadaan Produksi Tangkap Perikanan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010-2015**

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Baung	112,80	109,80	135,52	125,43	132,4	239,10
2	Gabus	1138,5	1.126,70	1.105,52	1.162,39	1.184,6	980,00
3	Lais	181,9	177,00	218,38	202,30	213,7	125,30
4	Tauman	177,4	175,90	166,8	178,99	181,5	262,90
5	Sepat Siam	1452,3	1.436,10	1.418,1	1.381,8	408,5	1.403,50
6	Tambakan	497,3	492,70	474,00	504,7	512,3	483,60
7	Udang Galah	21,8	23,20	26,23	24,28	25,6	19,70
8	Lampan	254,7	247,80	306,0	283,22	2,99	186,50
9	Lele	49,4	49,20	43,95	-	39,6	51,60
10	Betok	1246,2	1.232,50	1.219,4	1.275,99	1.302,2	1.541,60
11	Ketik	102,5	101,90	92,26	101,76	102,5	98,60
12	Sepat Rawa	1670,6	1.773,40	1.779,9	1.689,24	1.728,8	2.212,70
13	Lainnya (puyau,dll)	319,9	316,80	307,15	325,22	330,9	376,50
		7.225,30	7.263,00	7.293,21	7.254,10	7.462,0	7.981,70

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS, Tahun 2015

**Tabel 2.56**  
**Target Produksi Perikanan 2013-2018**

No	Produksi Perikanan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Budidaya (ton)	4.766	6.998	8.499	9.348	10.283	11.312	12.443
2.	Tangkap(Ton)	7.293	7.512	7.737	7.969	8.208	8.454	8.708
3.	Benih Ikan :							
	1. Nila (ekor)	200.000	220.000	225.000	250.000	275.000	300.000	325.000
	2. Patin (ekor)	140.000	150.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
	3. Lele (ekor)	-	-	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000
	4. Betok (ekor)	20.000	-	275.000	300.000	325.000	350.000	375.000

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS, Tahun 2015

b. Peternakan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat beberapa kecamatan yang memiliki potensi pengembangan peternakan baik ternak besar maupun ternak kecil. Khusus untuk Sapi dan kerbau dikembangkan di beberapa kecamatan dan seperti Kecamatan Sungai Raya,

Kandangan, Padang Batung, Telaga Langsung dan Kalumpang. Untuk ternak dalam kategori kecil seperti kambing terdapat di Kecamatan Padang Batung, Kandangan dan Kalumpang.

Populasi hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan domba cenderung mengalami penurunan. Populasi ternak sapi pada tahun 2011 sebesar 4.035 ekor kemudian pada tahun 2015 menjadi 4.836 ekor, ternak kerbau pada tahun 2011 sebesar 1.041 ekor turun menjadi 910 ekor pada tahun 2015, ternak kambing pada tahun 2011 sebesar 3.694 ekor turun menjadi 2.727 ekor pada tahun 2015, ternak domba pada tahun 2011 sebesar 125 ekor namun pada tahun 2015 sudah tidak berproduksi lagi. Tetapi untuk ternak ayam ras pedaging, ayam buras dan itik Alabio terus mengalami peningkatan populasinya (lihat tabel 2.46).

Sedangkan populasi ternak unggas (Ayam ras pedaging, Ayam Buras dan Itik) semuanya mengalami peningkatan. Untuk ternak ayam pedaging pada tahun 2011 dari jumlah 1.262.664 ekor turun menjadi 1.072.115 ekor pada tahun 2015. Ternak ayam buras Tahun 2011 dari jumlah 2.796.881 ekor turun menjadi 1.140.600 ekor pada tahun 2015. Sementara itu untuk ternak itik yang menjadi unggulan pada Tahun 2011 dari jumlah 1.323.874 ekor turun menjadi 609.487 ekor.

**Tabel 2.57**  
**Banyaknya Populasi Komoditas Peternakan Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Komoditas Peternakan	Banyaknya Hewan Ternak (Ekor)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sapi	4.035	4.630	4.550	4.689	4.836
2.	Kerbau	1.041	779	844	892	910
3.	Kambing	3.694	2.733	2.750	2.795	2.727
4.	Domba	124	40	53	0	0
5.	Ayam Ras Pedaging	1.262.664	1.371.292	1.094.813	1.228.501	1.072.115
6.	Ayam Buras	2.796.881	2.723.958	2.633.249	1.304.888	1.140.600
7.	Itik Alabio	1.323.874	970.687	973.972	789.031	609.487

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS Tahun 2015

Produksi daging ayam ras pedaging pada tahun 2011 baru 772.448 kg kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 765.487 kg, produksi daging ayam buras pada tahun 2011 sebesar 126.657 kg kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 176.222 kg, dan produksi telur ayam buras pada tahun 2011 sebesar 2.288.284 kg kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 1.067.602 kg, produksi daging itik pada tahun 2011 baru 116.393 kg kemudian pada tahun 2013 turun menjadi 13.933 kg, produksi telur itik pada tahun 2011 sebesar 9.077.993 kg kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 5.410.498 kg (lihat tabel 2.40).

Produksi peternakan berupa daging untuk ternak sapi dan kambing mengalami peningkatan dari tahun 2011 – 2013. Produksi daging berhubungan langsung dengan jumlah pemotongan ternak

baik yang dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun di tempat lain pada saat hari Qurban atau Aqiqah, akan tetapi tidak terkait langsung dengan jumlah populasi ternak yang ada secara keseluruhan. Dengan demikian meskipun jumlah ternak cenderung mengalami penurunan akan tetapi produksi daging terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsumsi daging oleh masyarakat.

**Tabel 2.58**  
**Produksi Peternakan Unggas Tahun 2011-2015**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Komoditas Peternakan	Besarnya Produksi				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Ayam Ras Pedaging (kg)	722.448	765.494	765.487		
2.	Ayam Buras (kg)					
	- Daging	126.657	165.036	176.222		
	- Telor	2.288.284	2.228.639	2.154.476	1.067.636	1.067,602
3.	Ayam ras petelur (kg)	0	0	0		
4.	Telur Itik Alabio (kg)					
	- Daging	116.393	106.709	13.933		
	- Telor	9.077.993	6.656.139	6.678.665	5.410.498	5.410,498

Sumber : Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS Tahun 2015

Produksi daging sapi potong pada tahun 2009 sebesar 231.822 kg kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 380.876 kg, produksi daging kerbau pada tahun 2009 sebesar 42.363 kg kemudian pada tahun 201 turun menjadi 13.492 kg, produksi daging kambing pada tahun 2009 sebesar 13.339 kg kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 26.751 kg, dan tahun 2014 turun menjadi 24.579 kg. sedangkan produksi daging domba dan daging babi sangat berfluktuasi.

Untuk ternak kerbau dan kambing cenderung mengalami penurunan, hal ini lebih disebabkan oleh masyarakat yang mengkonsumsi daging tersebut lebih terbatas dibanding dengan daging sapi dan kambing. Dengan demikian permintaan masyarakat akan daging kerbau dan domba cenderung menurun setiap tahunnya, selain itu untuk ternak domba berkaitan dengan resiko penyakit apabila berdampingan dengan ternak sapi, sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selain ternak itik ada juga ternak sapi sebagai unggulan oleh karena itu diharapkan ternak domba tidak berkembang pesat.

**Tabel 2.59**  
**Produksi Peternakan Besar dan Kecil Tahun 2011-2015**

No	Komoditas Peternakan	Besarnya Produksi (Kg)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Sapi Potong	247.005	315,835	363,232	389,880	440,333

2.	Kerbau	31,772	12,386	26,542	13,492	21.675
3.	Kambing	24.096	26.488	14.025	12.886	13.032
4.	Domba	1,188	906	102	396	0
5.	Babi	7.979	7.181	7.469	7,813	7.239

Sumber :Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. HSS Tahun 2015

#### 2.4.4. Sektor Perindustrian

Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada dasarnya memiliki beberapa potensi sektor industri yang dapat dikembangkan, namun tidak terdapat industri besar, tenaga kerja lebih atau sama dengan 100 orang. Sedangkan industri sedang/menengah dengan tenaga kerja antara 20-99 orang terdapat di Kecamatan Kandangan dan Sungai Raya. Industri kecil dengan tenaga kerja antara 5-19 orang yang berjumlah 116 buah terbanyak terdapat di Kecamatan Kandangan dan Sungai Raya masing-masing sebanyak 19 buah. Pada tahun 2008 jumlah industri formal dan sebanyak 11.078 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 23.900 orang dan pada tahun 2013 naik menjadi 11.782 unit usaha dan menyerap tenaga kerja sebanyak 25.738 orang (lihat tabel 2.42). Sebagian besar usaha yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah usaha kecil (lihat tabel 2.43). Komoditi unggulannya adalah ikan kering, kerupuk, gerabah, dodol, profeller, perhiasan imitasi dan mandau.

**Tabel 2.60**  
**Industri Kecil / Menengah**  
**di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011-2015**

No	Jenis Industri	Jumlah														
		2011			2012			2013			2014			2015		
		Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)
<b>A</b>	<b>FORMAL</b>															
1	IKM Pangan	67	411	17.043.250	68	421	27.043.250	69	431	27.043.250	74	472	28.358.260	74	472	28.358.260
2	IKM Sandang	5	15	1.255.500	5	15	1.255.500	5	15	1.255.500	5	15	1.255.500	5	15	1.255.500
3	IKM Kimia dan Bahan Bangunan	62	623	18.512.500	62	623	18.512.500	63	626	19.012.500	66	649	19.837.000	66	649	19.837.000
4	IKM Logam dan Elektronika	88	516	6.821.300	88	516	6.821.300	88	516	6.821.300	96	570	8.602.850	96	570	8.602.850
5	IKM Kerajinan dan Umum	25	157	4.47.250	26	165	6.547.250	26	165	6.547.250	27	175	6.785.250	27	175	6.785.250
<b>B</b>	<b>INFORMAL</b>															
1	IKM Pangan	4.325	11.143	9.151.950	4.325	11.143	9.151.950	4.339	11.188	9.668.450	4.357	11.233	9.668.450	4.369	11.258	9.853.450
2	IKM Sandang	175	268	997.250	175	268	997.250	175	268	997.250	176	268	997.250	176	268	997.250
3	IKM Kimia dan Bahan Bangunan	562	1.375	6.377.500	562	1.375	6.377.500	564	1.375	6.377.500	564	1.375	6.377.500	564	1.375	6.377.500
4	IKM Logam dan Elektronika	714	2.135	10.026.230	715	2.139	10.226.230	719	2.140	10.526.230	719	2.140	10.526.230	719	2.140	10.526.230
5	IKM Kerajinan dan Umum	5.366	8.001	4.859.660	5.367	8.003	5.009.660	5375	8.003	5.009.660	5.375	8.003	5.009.660	5.394	8.021	5.133.660
	<b>TOTAL</b>	<b>11.389</b>	<b>24.644</b>	<b>79.092.390</b>	<b>11.393</b>	<b>24.668</b>	<b>91.942.390</b>	<b>11.423</b>	<b>24.727</b>	<b>93.258.890</b>	<b>11.459</b>	<b>24.900</b>	<b>97.417.950</b>	<b>11.489</b>	<b>24.943</b>	<b>97.726.950</b>

Sumber :Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS Tahun 2015

**Tabel 2.61**  
**Usaha Mikro Kecil & Menengah**  
**di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011-2015**

No	Jenis Usaha	Jumlah									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Unit Usaha	Tenaga Kerja								
1	Usaha Kecil	38.766	33.576	40.036	41.875	40.036	42.750	41.046	44.175	43.046	46.305
2	Usaha Menengah	58	168	60	177	60	250	60	385	60	404
3	Usaha Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>38.824</b>	<b>33.744</b>	<b>40.096</b>	<b>42.052</b>	<b>40.096</b>	<b>43.000</b>	<b>41.106</b>	<b>44.560</b>	<b>41.106</b>	<b>46.709</b>

Sumber :Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS Tahun 2015

#### 2.4.5. Sektor Koperasi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jumlah penduduk 249.073 jiwa pada tahun 2012 memiliki lebih dari 7.000 orang pencari kerja yang berpotensi menjadi pengusaha kecil dalam naungan koperasi.

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2015 berjumlah 159 unit yang terdiri dari koperasi produsen, jasa, fungsional, strategis dan konsumen. Keberadaan koperasi tersebar di 11 kecamatan se Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 2.62**  
**Jumlah Koperasi dan Anggota**  
**di Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2016**

Bentuk Koperasi	Jumlah (Unit)	Anggota (Orang)
1. Koperasi Unit Desa (KUD)	27	7498
2. Koperasi Pertanian (KOPTAN)	18	1158
3. Koperasi Peternakan	1	35
4. Koperasi Perkebunan (KOPBUN)	10	1305
5. Koperasi Pesantren (KOPPONTREN)	7	394
6. Koperasi Pegawai Negeri (KPRI)	34	5047
7. Koperasi Karyawan (KOPKAR)	6	1308
8. Koperasi TNI	1	175
9. Koperasi POLRI	1	324
10. Koperasi Serba Usaha (KSU)	27	1362
11. Koperasi Pasar (KOPPAS)	2	136
12. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	6	1433
13. Koperasi Angkutan Darat	1	88
14. Koperasi Wanita (KOPWAN)	12	998
15. Koperasi Pensiunan	2	289
16. Koperasi Pemuda/Pramuka	2	64
17. Koperasi Syari'ah	1	23

18. Koperasi Lain-Lain	1	21
<b>JUMLAH</b>	<b>159</b>	<b>21658</b>

Sumber :Dinas Perindagkop & UKM Kab. HSS Tahun 2015

#### 2.4.6. Sektor Pariwisata

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan wilayah potensial untuk pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah tujuan wisata unggulan Kalimantan Selatan maupun Nasional karena keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya. Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini meliputi keseluruhan potensi atraksi atau sumberdaya wisata, baik berupa sumberdaya wisata alam (antara lain: hutan, air terjun, sungai, pegunungan, flora, dan sebagainya) maupun budaya (antara lain: bangunan bersejarah, makam, adat-istiadat dan tradisi, dan sebagainya), serta potensi lainnya yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara.

Berdasarkan karakteristik daya tarik wisatanya, maka Daya Tarik Wisata (DTW) di kabupaten ini terbagi dalam tiga jenis, yaitu:

- A. Daya Tarik Wisata Alam (*natural attractions*)  
yaitu daya tarik yang berhubungan dengan lingkungan alam, termasuk di dalamnya adalah iklim, pemandangan alam, pantai dan laut, flora, dan fauna. Fenomena alamiah lain (pegunungan, fenomena geologis, gua, aktivitas vulkanologis, sumber air panas dan lainnya), taman dan area konservasi (taman nasional, cagar alam), wisata kesehatan (tempat-tempat dengan sumber air panas, dan lainnya);
- B. Daya Tarik Wisata Budaya (*cultural attractions*)  
yaitu daya tarik yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Atraksi-atraksi yang termasuk di dalamnya adalah situs arkeologis, sejarah, dan budaya (monumen, bangunan/kota/daerah bersejarah, bangunan ibadah), budaya, tradisi, gaya hidup yang unik (kebiasaan, pakaian, upacara, cara hidup, kepercayaan/agama), kesenian dan kerajinan, aktivitas ekonomi, kawasan perkotaan, museum dan fasilitas budaya lainnya, festival budaya, keramahan penduduk, dan lainnya;
- C. Daya Tarik yang Bersifat Khusus (*special types of attractions*)  
yaitu daya tarik wisata yang tidak termasuk dalam kategori daya tarik wisata alam dan budaya, yang diciptakan secara arti (buatan), mencakup di dalamnya antara lain taman bertema, gedung konvensi, fasilitas rekreasi dan hiburan, fasilitas belanja/shopping, serta fasilitas olahraga.

Potensi keanekaragaman Daya Tarik Wisata (DTW) yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat dalam table-tabel dibawah ini tabel 2.45 berikut:

**Tabel 2.63**  
**Potensi Keanekaragaman DTW**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2015)**

JENIS DTW	NAMA OBYEK	LOKASI	DAYA TARIK WISATA	
<b>DTW Alam</b>	1 Air Terjun Uring	Desa Kemawakan Kec Loksado	Air terjun bertingkat tiga	
	2 Air Terjun Haratai	Desa Haratai Kec Loksado.	Ditempuh dengan jalan kaki dari Balai Haratai ± 15 menit melewati hutan bambu, perkebunan karet, dan kayu manis. Air terjun tersebut bertingkat tiga dengan ketinggian masing-masing ± 15 meter	
	3 Air Terjun Tangkaramin	Desa Malinau Kec Loksado.	Air terjun bertingkat tiga	
	4 Air Terjun Tinggiran Hayam	Desa Kamawakan Kec.Loksado	Air terjun bertingkat tiga	
	5 Air Terjun Kilap Api	Desa Tanuhi Kec. Loksado	Air terjun bertingkat	
	6 Riam Anai	Desa Lok Lahung Kec.Loksado	Air terjun bertingkat satu	
<b>DTW Budaya</b>	7 Goa Berangin/Batu Laki	Desa Malutu Kec. Padang Batung	Terdapat goa-goa lainnya	
	8 Goa Batu Bini	Desa Batu Bini Kec. Padang Batung	Terdapat goa-goa lainnya	
	9 Goa Mandala	Desa Mandala Kec. Telaga Langsat	Terdapat goa-goa lainnya	
	10 Sumber Air Panas Batu Bini	Desa Batu Bini Kec. Padang Batung	Sumber air panas bumi	
	11 Sumber Air Panas Tanuhi	Desa Tanuhi Kec.Loksado	Sumber air panas alami dan ada cottage peristirahatan; Kurang lebih 8 Km sebelum. Terdapat 10 unit (untuk 20 orang) cottage dengan arsitektur unik yang dilengkapi dengan kolam renang, kolam air panas berendam, kolam air panas gelembung, cafetaria, kantor pengetota, jalan dan jembatan, sanitasi, dan loket pos jaga (security), lapangan tenis, serta tempat santai/istirahat. Keunggulan yang dapat dirasakan di sini adalah selain menikmati air panas, berenang, berolahraga, juga dengan leluasa dapat memandangi alam Loksado yang dikelilingi dengan pegunungan	
	12 Gunung Kantawan	Desa Muara Hatip	Cagar alam <i>tracking</i> dengan pemandangan alam pegunungan	
	13 Telaga Bidadari	Kec. Sungai Raya	Telaga di komplek permukiman dengan kepercayaan khusus	
	14 Danau Bangkau	Kec.Kandangan		
	15 Delta dan Dam Sungai Amandit	Desa Malutu Kec.Padang Batung		
	<b>A. Industri/Kerajinan</b>			
	1. Industri Dodol	Kec. Kandangan/ Sungai Raya	Pengolahan dodol dengan cara tradisional	
	2. Kerajinan Logam/ Kuningan	Kec. Daha Utara / Daha Selatan	Cara pembuatan logam	
	3. Pembuatan Badan Kapal	Kec.Daha Utara / Daha Selatan	Industri pembuatan kapal	

JENIS DTW	NAMA OBYEK	LOKASI	DAYA TARIK WISATA
	4. Kerajinan Aksesoris Perhiasan	Kec. Daha Selatan	Cara pembuatan aksesoris
	5. Kerajinan Mandau	Kec. Daha Selatan	Cara pembuatan mandau
	6. Industri Kerupuk	Desa Bamban Kec. Angkinang	Pembuatan krupuk dari ubi kayu
	7. Kerajinan Gerabah	Kec. Daha Selatan	Pembuatan gerabah dari tanah liat
	<b>B. Balai/Rumah Adat</b>		
	1 Rumah Adat Banjar	Desa Tibung Raya Kec. Kandangan	Bangunan rumah adat Khas Banjar
	2 Rumah Adat Banjar Gajah Menyusu	Desa Amawang, Kec. Kandangan	Rumah adat
	3 Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi	Desa Habirau, Kec. Daha Selatan	Rumah adat
	4 Rumah Toko Terapung	Kec. Daha Utara	Rumah adat
	5 Baiai/Rumah Adat Bukit/Dayak	Kec. Loksado	Rumah adat yang digunakan dalam kegiatan adat/ kepercayaan
	Kalang Kerabau	Desa Pandak Daun Kec. Daha Utara	
	<b>C. Festival/Event</b>		
	1. Festival Pengantin Balantiing	Kec. Loksado	Festival pasangan pengantin yang diarak menyusuri sungai dengan rakit lengkap dengan para pengaraknya, bebunyian, dan hiasan bak pawai di jalan raya
	2. Festival Lanting	Kec. Loksado	Festival Lanting dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan
	3. Upacara Aruh Ganal	Kabupaten HSS	Aruh Ganal artinya Kenduri Besar, dilaksanakan secara besar-besaran oleh seluruh warga kampung dan dihadiri oleh warga kampung lainnya, dalam rangka ungkapan rasa syukur atas karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sekaligus memohon hasil tahun ke depan mendapat panen yang melimpah, dijauhkan dari bahaya dan makhluk perusak tanaman
	4. Seni Tradisional	Kabupaten HSS	-
	5. Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga)	Kecamatan Daha Selatan	-
	6. Olahraga Tradisional	Kabupaten HSS	-
	7. Kalang Hadangan	Kecamatan Daha Utara	-
	<b>D. Minat Khusus</b>		
	1. Tracking dan Arung Jeram (bamboo rafting)	Kec. Loksado	Jelajah dan rafting khusus menggunakan rakit bambu menelusuri keindahan di sepanjang sungai Amandit
	2. Tracking dan Perahu/Jukung	Sei Negara Kec. Daha Selatan	Jelajah di area rawa dengan menggunakan perahu/jukung
	3. Kawasan Perikanan/ Pemanangan	Kec. Kandangan/ Daha Utara/ Selatan/	Minat khusus wisata pemancingan di area rawa

JENIS DTW	NAMA OBYEK	LOKASI	DAYA TARIK WISATA
	4. Kerbau Rawa	Kalumpang Desa Pandak Daun Kec. Daha Utara	Obyek wisata satwa kerbau yang ditenakkan masyarakat sehari-hari berenang di rawa-rawa. Obyek wisata ini dapat ditemui di sebuah danau kecil di Desa Pandak Daun, sekitar 4 Km dari Nagara. Kawasan tersebut juga merupakan kawasan pemancingan tradisional, lahan terbuka yang sunyi dapat memunculkan inspirasi. Untuk mencapai ke tempat tersebut, sangatlah mudah dengan naik( klotok hanya membutuhkan waktu ± 20 menit. Waktu yang tepat pergi kesana adalah jam 6 sore. Keistimewaan dari pengembangbiakan Kerbau Kalang ini adalah kandang-kandangannya dibangun diatas tumpukan batangbatang yang tersusun menyilang mencapai ketinggian 2-3 meter
	5. Areal Hutan Kota di Komplek RSUD	Kec. Kandangan	Merupakan area hijau terbuka yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai RTH Publik kota
<b>DTW Sejarah Perjuangan</b>	1. Monumen 17 Mei 1949	Kec. Kandangan	Monumen bernilai sejarah perjuangan nasional
	2. Gedung Juang	Desa Hamalau Kec Padang Batung	Museum sejarah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan
	3. Situs Benteng Madang	Desa Madang Kec. Padang Batung	Benteng bersejarah dengan anak tangga lebih dari 400 buah dan dapat dijelajahi dengan menggunakan mobil dengan jarak + 8 Km dari Kota Kandangan
	4. Situs Amuk Hantarkurung	Desa Hantarkurung Kecamatan Simpur	-
	5. Makam Tumpang Talu	Kandangan Barat Kecamatan Kandangan	-
	6. Kubur Anam	Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya	-
	7. Makam Singakarsa	Jl. Singakarsa Kec. Kandangan	-
	8. Makam Aluh Idut	Jl. Aluh Idut Kec. Kandangan	-
	9. Makam Ning Bulang	Desa Hantarkurung Kecamatan Simpur	-
	10. Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV	Kecamatan Telaga Langsat	-
	11. Tugu Peringatan Peristiwa Pemencaran Pasukan ALRI Divisi IV 10 Mei 1949	Pagat Batu Desa Batu Bini Kec. Padang Batung	-
	12. Tugu Gencatan Senjata Antara Gubernur Tentara ALRI Divisi IV dengan NICA	Kecamatan Sungai Raya	-
	13. Monumen	Desa Mandapai	Upacara HUT ke IV RI 17 Agustus 1949

JENIS DTW	NAMA OBYEK	LOKASI	DAYA TARIK WISATA
	Mandapai	Kec. Padang Batung	
	14. Tugu Palagan Negara 2 Januari 1949	Desa Hakurung Kec. Daha Utara	-
	15. Tugu Garis Demarkasi	Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung	-
	16. Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan	Desa Jelatang kec. Padang Batung	-
DTW Religius	1. Mesjid Su'ada	Desa Wasah Hilir Kec. Simpung	Wisata area masjid
	2. Makam Keramat Datu Taniran	Desa Taniran Kec. Angkinang	Makam bersejarah, berjarak ± 8 km dari ibukota kabupaten; nama sebenarnya dari obyek ini adalah Makam Al Allamah Syekh H. Sa'dudin.
	3. Makam Keramat Datu Ahmad	Desa Balimau, Kec. Kalumpang	Makam bersejarah; berjarak ± 15 km dari ibukota kabupaten; nama sebenarnya dari obyek ini adalah Makam Al Allamah Syekh Ahmad
	4. Makam Keramat Datu H. Rais	Desa Loknyur Kec. Angkinang	Makam keramat
	5. Makam Tumpang Talu	Desa Hantarukung	Makam bersejarah; berjarak ± 7 km dari ibukota kabupaten; meliputi Makam Kusuma Bangsa Bukhari, H. Matamin, Landuk dan Pangeran Yuya
	6. Makam H.M.Said	Desa Simpung Kec. Simpung	Makam keramat
	7. Makam Datu H. Abbas	Desa Simpung Kec. Simpung	Makam keramat
	8. Kubah Datu Durabu	Desa Kalumpang Kec. Kalumpang	Makam keramat
	9. Makam Datu Daha	Kecamatan Daha Utara	Makam keramat
	10. Makam Surgi Tuan	Desa Pasungkan Kec. Daha Utara	Makam keramat
	11. Makam Habib Iberahim	Desa Mandala Kec. Daha Utara	Makam keramat
	12. Makam Tuan Guru Haji Ali	Desa Pandan Sari Kec. Daha Selatan	Makam keramat
	13. Makam Habib Lumpangi	Desa Laumpangi Kec. Loksado	Makam keramat

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. HSS 2015

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan baru tersedia 14 buah hotel yang terdapat di Kecamatan Loksado 5 buah hotel dan jumlah kamarnya 66 dan di Kecamatan Kandangan 9 buah hotel dan jumlah kamarnya 135 buah (Tabel 2.46)

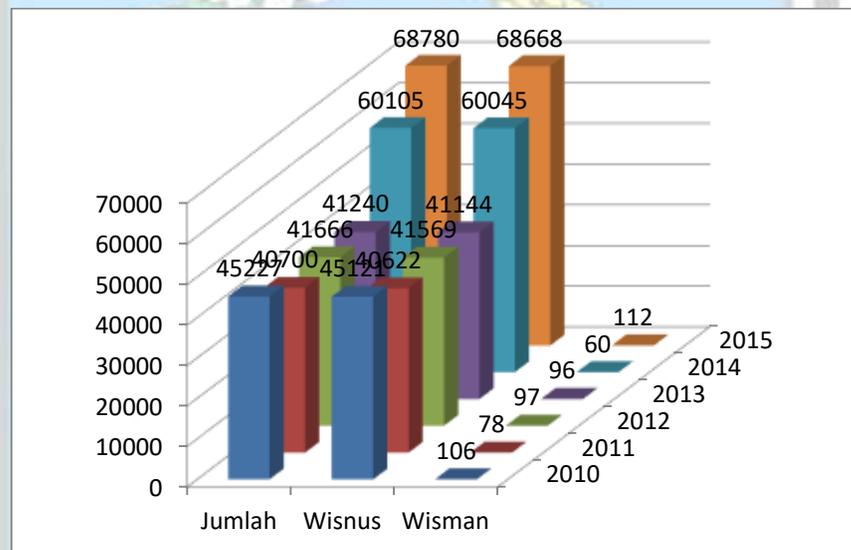
**Tabel 2.64**  
**Banyaknya Hotel Dan Jumlah Kamar Menurut Kecamatan Tahun 2016**

Kecamatan	Hotel	Jumlah kamar
Loksado	5	66
Kandangan	9	135
Jumlah	14	206

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. HSS 2016

Jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan setiap tahunnya selalu menunjukkan kenaikan, dari data tahun 2012 jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 41.666 orang dan terakhir untuk tahun 2015 bertambah menjadi 60.102 orang (lihat tabel 1.33). Perkembangan jumlah kunjungan tersebut tentunya harus diiringi pula dengan peningkatan fasilitas penunjang lainnya antara lain berupa hotel serta sarana transportasi yang memadai.

**Tabel 2.65**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan**  
**Tahun 2010 - 2015**



NO	TAHUN	WISMAN	WISNUS	JUMLAH	KET
1	2010	106	45.121	45.227	-
2	2011	78	40.622	40.700	Menurun
3	2012	97	41.569	41.666	Meningkat
4	2013	96	41.144	41.240	Menurun
5	2014	60	60.045	60.105	Meningkat
6	2015	112	68.668	68.780	Meningkat

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. HSS 2016

#### 2.4.7. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

##### a. Sektor Energi

Dalam sektor energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai potensi yang besar dalam penyediaan tenaga listrik terutama yang berasal dari tenaga air dan tenaga surya. Dari tahun 2007 hingga 2015 telah dikembangkan pembangkit listrik tenaga air

mikro hidro dan tenaga surya di beberapa lokasi sebagaimana pada tabel 1.34. Dengan pembangunan PLTMH dan PLTS tersebut diharapkan dapat membantu menerangi desa-desa terpencil yang belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN.

**Tabel. 2.66**  
**Lokasi, Jumlah dan Daya Terpasang PLTMH dan PLTS**  
**Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

NO	JENIS	LOKASI	KAPASITAS	SUMBER DANA	TAHUN PEMBANGUNAN
<b>A</b>	<b>PLTMH</b>				
1	PLTMH Paniungan	Ds. Malilingin Kec. Padang Batung	5 KVA	APBD	2007
2	PLTMH Ulang	Ds. Ulang Kec. Loksado	40 KVA	APBN & APBD	2008
3	PLTMH Malinau	Ds. Malinau Kec. Loksado	10 KVA	APBD	2008
4	PLTMH Haratai I	Ds. Haratai Kec. Loksado	20 KVA	APBN	2009
5	PLTMH Haratai II	Ds. Haratai Kec. Loksado	7 KVA	LSM	2009
5	PLTMH Datar Kedayang	Ds. Haratai Kec. Loksado	5 KVA	Swadaya Masyarakat	2011
<b>B</b>	<b>PLTS</b>				
1	PLTS	Ds. Badaun Kec. Daha Barat	20 x 50 Watt	APBN	2007
2	PLTS	Ds. Siang Gantung Kec. Daha Barat	15 x 50 Watt	APBN	2007
3	PLTS	Ds. Bajayau Lama Kec. Daha Barat	13 x 50 Watt	APBN	2007
4	PLTS	Ds. Hulu Banyu Kec. Loksado	20 x 50 Watt	APBN	2007
5	PLTS	Ds. Tumingki Kec. Loksado	42 x 50 Watt	APBN	2007
6	PLTS	Ds. Loklahong Kec. Loksado	15 x 50 Watt	APBN	2007
7	PLTS	Ds. Halunuk Kec. Loksado	15 x 50 Watt	APBN	2007
8	PLTS	Ds. Kamawakan Kec. Loksado	15 x 50 Watt	APBN	2007
9	PLTS	Ds. Malinau Kec. Loksado	15 x 50 Watt	APBN	2007
10	PLTS	Ds. Malinau Kec. Loksado	16 x 50 Watt	APBN	2007
11	PLTS	Ds. Muning Dalam Kec. Daha Selatan	29 x 50 Watt	APBN	2007
12	PLTS	Ds. Pantai Ulin Kec. Simpur	62 x 50 Watt	APBN	2009

NO	JENIS	LOKASI	KAPASITAS	SUMBER DANA	TAHUN PEMBANGUNAN
13	PLTS	Ds. Muning Dalam Kec. Daha Selatan	62 x 50 Watt	APBN	2009
14	PLTS	Ds. Baru Kec. Daha Barat	10 x 50 Watt	APBN	2009
15	PLTS	Ds. Bajayau Tengah Kec. Daha Barat	11 x 50 Watt	APBN	2009
16	PLTS	Ds. Bajayau Kec. Daha Barat	7 x 50 Watt	APBN	2009
17	PLTS	Ds. Bajayau Lama Kec. Daha Barat	16 x 50 Watt	APBN	2009
18	PLTS	Ds. Siang Gantung Kec. Daha Barat	11 x 50 Watt	APBN	2009
19	PLTS	Ds. Hamak Utara Kec. Telaga Langsat	15 x 50 Watt	APBN	2009
20	PLTS	Ds. Hulu Banyu Kec. Loksado	39 x 50 Watt	APBN	2009
21	PLTS	Ds. Tumingki Kec. Loksado	80 x 50 Watt	APBN	2009
22	PLTS	Ds. Pantai Langsat Kec. Loksado	22 x 50 Watt	APBN	2009
23	PLTS	Ds. Ulang Kec. Loksado	7 x 50 Watt	APBN	2009
24	PLTS	Ds. Bago Tanggul Kec. Kalumpang	69 x 50 Watt	APBN	2009
25	PLTS	Ds. Malilingin Kec. Padang Batung	69 x 50 Watt	APBN	2009
26	PLTS	Kec. Kalumpang Bago Tanggul	69 x 50 Watt	APBD Prov.	2011
27	PLTS	Kec. Pd. Batung Malilingin	69 x 50 Watt	APBD Prov.	2011
28	PLTS	Karang Bulan dan Bago Tanggul Kec. Kalumpang	35 x 50 Watt	APBD Kab.HSS	2013
29	PLTS	Tumingki Kec. Loksado	15 KW/100 x 150 Watt	APBN	2013
30	PLTS	Desa Ulang Kec. Loksado	25 x 50 Watt	APBD Kab.HSS	2014
31	PLTS	Desa Sirih Kec. Kalumpang	20 x 50 Watt	APBD Kab.HSS	2015
32	PLTS	Desa Balanti Kec. Kalumpang	9 x 50 Watt	APBD Kab.HSS	2015
33	PLTS	Desa Hamak Utara Kec. Telaga Langsat	6 x 50 Watt	APBD Kab.HSS	2015

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten HSS Tahun 2015

c. Sumber Daya Mineral

Pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah ada yang diproduksi dan belum diproduksi. Produksi batubara pada tahun 2009 baru 692.275.33 M3 ton kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 4.797.083.00 M3 ton .

Produksi bahan tambang lainnya berupa galian berupa tanah, pasir pasang, kerikil, batu kali, batu pecah, sirtu, batu gunung, dan pasir urug. Produksi tambang/ galian terus mengalami peningkatan, yang meningkat signifikan, sedangkan bahan tambang/ galian lainnya kenaikan/penurunannya berfluktuasi sebagaimana terlihat tabel 2.49

**Tabel 2.67**  
**Produksi Bahan Tambang Dan Galian**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Tahun 2010- 2014 (M3)**

No	Jenis Tambang / galian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Tanah	36.340,81	128.2212.23	109.207.46	256.210.21	494.433.94
2	Pasir pasang	20.053,23	14.551.96	26.052.54	22.587.53	64.261.53
3	Basalt	-	-	-	19.246.30	19.246.30
3	Kerikil	11.784,50	13.960.50	4.318.67	11.437.62	26.088.56
4	Batu kali	7.177,00	11.915.00	12.383.40	13.048.58	37.982.79
5	Batu pecah	3.213,26	3.231.64	37.252.70	11.730.56	20.152.32
6	Sirtu	23.344,40	43.466.38	44.021.27	42.511.61	135.412.11
7	Batu gunung	3.012,50	1.157.75	2.003.74	3.500.40	7.238.90
8	Pasir urug	2.296,24	4.692.68	2.642.00	3.914.19	11.248.19
9	Batu bara (M ton)	513.196,10	3.277.947.68	3.277.947.68	4.089.889.00	4.797.083.00

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten HSS Tahun 2015

2.4.4. Listrik

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pelayanan listrik di kelola oleh PLN dan non PLN. Distribusi pelayanan listrik di beberapa kecamatan telah mencapai daerah pedesaan melalui proyek listrik masuk desa. Peningkatan pelayanan listrik nampak selalu mengalami kenaikan baik jumlah pelanggan maupun distribusi jaringannya.

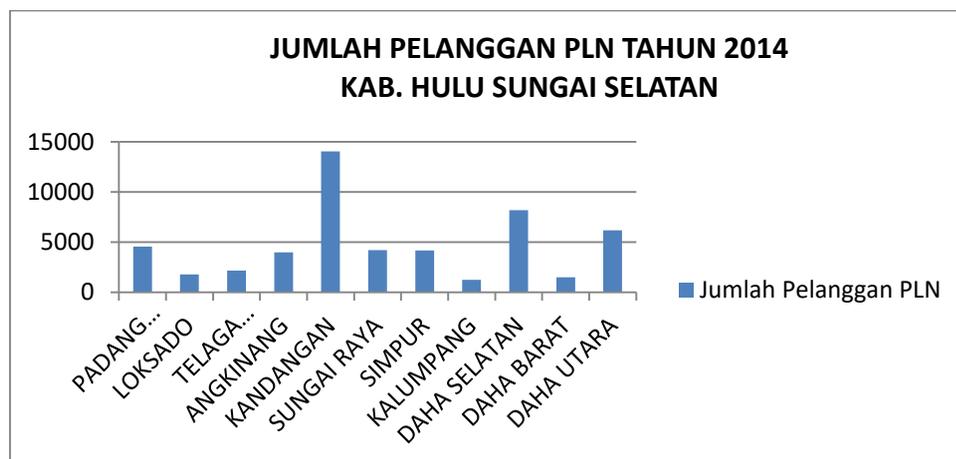
**Tabel 2.68**  
**Data Jumlah Pelanggan PLN, Kwh Terjual dan Daya Tersambung**  
**Tahun 2011-2014**

NO	URAIAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan listrik PLN di Kab. HSS				
	450 VA	31.137	31.340	31.427	31.160
	900 VA	7.522	10.196	13.204	15.436
	1.300 VA	861	954	1.165	1.182
	2.200 VA	225	258	355	381
	> 2.200 VA	19	21	32	33

2	Pengguna listrik PLN selain Rumah Tangga	3.124	3.392	3.686	3.993
3	Jumlah Rumah Tangga yang belum menggunakan listrik PLN di Kab. HSS (belum pelanggan)	15.072	12.650	9.808	8.470
4	Daya listrik terpasang di Kab. HSS	26.830.73	32.464.38	37.272.68	40.150.48
		5	5	5	5
5	Jumlah Kebutuhan listrik di Kab. HSS	49.423.06	55.384.89	61.982.26	69.281.77
		8	6	5	8

Sumber: PLN Kandangan Tahun 2015

**Tabel 2.69**  
**Data Jumlah Pelanggan PLN Tahun 2014**



Kecamatan	Jumlah Pelanggan PLN
	2014
PADANG BATUNG	4,547
LOKSADO	1,777
TELAGA LANGSAT	2,175
ANGKINANG	3,971
KANDANGAN	14,061
SUNGAI RAYA	4,189
SIMPUR	4,177
KALUMPANG	1,225
DAHA SELATAN	8,175
DAHA BARAT	1,507
DAHA UTARA	6,172
HULU SUNGAI SELATAN	51,976

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

<http://hulusungaiselatankab.bps.go.id>

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

### 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan

### 2.2.2. Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Sasaran Kebijakan Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015, yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD periode 2014 -2018 dapat digambarkan pada table berikut ini

**Tabel 2.70**  
**Pencapaian Indikator Sasaran Tahun Ke - II**

No	Sasaran	Sasaran Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2015		Target 5 Tahunan		Keterangan Per Tahun
					Target 2015	Capaian Tahun II 2015	Target 5 Tahun	Capaian s.d Tahun 2018	
1.	Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	12	13,100	8,88 (67,78)	15,680	56,632	
2.	Meningkatnya fasilitas beras untuk orang miskin (raskin)	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin	%	25	40	89,56 (223,9)	100	89,56	
3	Meningkatnya fasilitas sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah	Suasana kondusif kehidupan beragama	%	100	100	100 (100)	100	100	
4	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	a. Jembatan dalam kondisi baik	%	99	99,28	99,49 (100,21)	100	99,49	
		b. Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	60	61	61,21 (100,34)	62,5	97,93	
5	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pendidikan	b. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/	%	47	59,63	54,02 (90,59)	79,2	68,20	
		a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs MA	%	79	83,96	86,48 (103)	91,2	94,82	
		c. Angka Partisipasi Sekolah (APS)SD/MI	%	98	98,75	96,05 (97,26)	100	96,05	
6	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Jmlah kunjungan & layanan pasien di Puskesmas	%	100	100	100 (100)	100	100	
7	Meningkatnya kemandirian & partisipasi masyarakat dlm pembangunan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	50	58	60 (103,44)	70	85,71	

8	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Menurunnya angka kriminalitas	kasus	282	262	395 (145,22)	232	170,26	
9	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Ketersediaan pangan utama	%	308	309,82	310 (100,05)	312,82	99,09	
10	Meningkatnya ketersediaan bibit bagi petani	Nilai tukar petani	%	100	100,49	99,77 (99,28)	100,56	99,21	
11	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	Pencari kerja yang ditempatkan	%	32	35,92	33,84 (94,20)	41,61	121,37	
12	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	Nilai tukar petani	%	100	100,49	99,77 (99,28)	100,56	99,21	
13	Meningkatnya pembinaan untuk 5.000 pengusaha kecil produktif	Pembinaan UMKM	unit	40.096	43.096	43.096 (100)	45.096	92,75	
14	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pemukiman	Terciptanya rumah yang layak huni dan terjangkau	%	84	90,57	85,83 (94,76)	100	35,49	
15	Meningkatnya pendapatan perkapita	PDRB per kapita (harga konstan)	Ribuan rupiah (000)	5.301	6.141	15.715 (255,90)	6.856	229,21	
16	Meningkatnya produksi hasil pertanian	Produktivitas padi per hektar	ton/hektar	5	5.705	4.506 (78,98)	7.205	62,53	
17	Menurunnya persentase kemiskinan	Tingkat kemiskinan	%	7	5,490	5,87 (106,92)	4,5	130,44	
18	Terciptanya peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	7	6,9	7,65 (110,86)	6,9	110,86	
19	Terciptanya struktur ekonomi yang kuat dgn tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	Laju pertumbuhan ekonomi	%	6	6,18	5,80 (93,85)	6,6	87,87	
20	Terlindungnya sumber daya hayati dan sumber daya alam yg terkelola dgn sangat memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal	Menurunnya jumlah kerusakan kawasan hutan	hektar	13,661	12.410,83	12.446,51 (100,28)	11,231	112,02	
21	Terpenuhinya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan & perkebunan	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	49	55,44	63,64 (114,79)	64,98	97,93	
22	Tersedianya bus untuk pelajar dan guru	Peningkatan kualitas belajar mengajar berupa bis sekolah	Unit	0	2	0(0)	4	25	
23	Tersedianya dana jaminan bagi lansia, anak yatim/piatu dan penyandang cacat	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Orang	1,536	2.424	4.380 (180,69)	2,424	180,69	

24	Tersedianya fasilitas penerangan/ listrik tempat peribadatan	Tempat ibadah yg menggunakan listrik	%	96	97	98,1(101,13)	100	96	
25	Tersedianya fasilitas sosial untuk alim ulama/ tokoh agama/ tokoh adat.	Pemuka/tokoh agama yang mendapatkan jaminan sosial	Orang	100	100	150 (150)	100	100	
26	Tersedianya Kartu Hulu Sungai Selatan sehat	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin / kartu HSS sehat	%	100	100	100 (100)	100	100	
27	Tersedianya sarjana pendamping desa sejahtera	Ketersedian sarjana pendamping desa	%	0	50	100(200)	100	33,78	
28	Terwujudnya fasilitas teknologi & informasi, serta penguasaan Iptek yang ramah lingkungan.	Jaringan komunikasi publik	%	0	50	66,67 (133,34)	100	66,67	
29	Terwujudnya Hulu Sungai Selatan sebagai daerah oksigen	a. Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wil berHPL/HGB untuk RTH private (2,593 Ha)	%	5	8	8,56 (107)	11	0	
		b. Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wil berHPL/HGB untuk RTH Publik (5,815 Ha)	%	25	27	27,26 (100,96)	30	90,86	
30	Terwujudnya kehidupan yang kondusif bagi umat beragama.	Suasana kondusif kehidupan beragama	%	100	100	100 (100)	100	100	
31	Terwujudnya Kota Kandungan dan sekitarnya menjadi kota kuliner.	Kota kuliner	Kegiatan	0	30	26(86,66)	30	86,66	
32	Terwujudnya Kota Kandungan dan sekitarnya menjadi kota seni & olahraga	Jumlah kelompok seni	Buah	58	62	67 (108,06)	70	95,71	
		Jumlah Gedung Olah Raga	Buah	1	2	2 (100)	1	100	
33	Terwujudnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75	78	79,54 (101,97)	81	98,19	
34	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani.	Opini audit BPK	0	0	0	1 (100)	1	100	
35	Trwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa.	Suasana kondusif kehidupan beragama	%	100	100	100 (100)	100	100	
36	Terwujudnya perbaikan tunjangan aparatur pemerintahan	Peningkatan kesejahteraan aparatur	ada/tidak ada	0	0	ada	0	0	





### BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi, sistem dan mekanisme suatu kegiatan perekonomian daerah merupakan faktor yang penting dari motor penggerak roda pembangunan daerah, namun guna mencapai keberhasilan pembangunan suatu daerah, faktor ekonomi tersebut bukanlah faktor yang independen karena masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu diantaranya faktor pendidikan dan faktor kesehatan. Ketiga faktor tersebut mempunyai korelasi hubungan yang linear dan saling menunjang, dimana manakala suatu sistem perekonomian daerah hendak ditingkatkan faktor pendidikan dan kesehatan juga perlu ditingkatkan, karena tidak mungkin suatu perekonomian bisa ditingkatkan kalau Sumber Daya Manusianya (tingkat pendidikan dan kesehatan) masih rendah, begitu pula halnya kalau tingkat pendidikan dan kesehatan suatu masyarakat hendak ditingkatkan tentunya perlu mendapat dukungan ekonomi yang memadai. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah dukungan faktor infrastruktur daerah, baik infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya, serta faktor pelengkap lainnya yang merupakan satu kesatuan dalam *life cycle* suatu sistem pembangunan daerah.

#### **A. KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN TAHUN 2017**

Keberhasilan suatu pembangunan dan kemakmuran suatu masyarakat merupakan cita-cita semua pemerintahan, dan pada umumnya untuk melihat keberhasilan pembangunan dan kemakmuran suatu masyarakat salah satunya dilihat dari tingkat PDRB suatu masyarakat, namun tinggi rendahnya PDRB tersebut tidak lepas dari aktivitas kegiatan perekonomian masyarakatnya (makro ekonomi).

Perkembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum dapat dibagi kedalam 2 (dua) kondisi, yaitu :



**Pertama**, selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2009 dipandang relatif sangat stabil, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat rata-rata pertumbuhan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selalu berada diatas tingkat rata-rata inflasi Banjarmasin. Artinya bahwa laju pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada diatas laju pertumbuhan rata-rata inflasi Provinsi yang mengindikasikan bahwa setiap tahunnya terjadi perkembangan tingkat kesejahteraan rata-rata tiap penduduk. Dari ilustrasi tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dengan kultur budaya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang di dominasi oleh sektor riel dalam hal ini pertanian sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam daerah sendiri, ternyata lebih mampu menahan dampak krisis keuangan global.

**Kedua**, kurun waktu 2010 – 2014 sangat berfluktuasi namun ada kecendrungan ke arah kondisi yang lebih baik, dengan tingkat rata-rata inflasi yang terjadi dan diwakili oleh tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Selatanberbanding dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menggambarkan bahwa tingkat inflasi tersebut ternyata masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi, namun kondisi tersebut masih lebih baik apabila dibandingkan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2010 dimana pada tahun tersebut tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada titik terendah selama 10 tahun terakhir.

Gambaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara makro ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain adalah:

### 1. Perekonomian Kalimantan Selatan

Gambaran tentang perkembangan tingkat inflasi suatu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan termasuk salah satunya Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara akurat memang belum bisa di sajikan, namun untuk menjawab permasalahan diatas secara umum tingkat inflasi tiap-tiap



kabupaten yang berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan akan diwakili oleh rata-rata tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dimungkinkan karena pengambilan analisa data perhitungan inflasi adalah dengan mengambil sampel dari perkembangan rata-rata variabel komponen harga yang diperhitungkan pada semua wilayah bersangkutan.

### **Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2015**

Pada triwulan IV-2015 perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 4,14% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,92% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV-2015 didorong oleh meningkatnya aktivitas investasi sehubungan dengan masih dipandang positifnya prospek ekonomi ke depan, yang tercermin pula pada meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi. Permintaan domestik yang relatif baik turut mendorong meningkatnya sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor transportasi dan komunikasi. Di sisi lain, sektor utama lainnya yakni sektor pertambangan dan sektor pertanian kembali tumbuh melambat. Melambatnya sektor pertambangan karena masih terus menurunnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok maupun harga batubara. Sedangkan melambatnya sektor pertanian karena puncak efek positif El Nino yang hanya berlangsung pada triwulan III-2015 dan baru memasuki masa tanam pada triwulan IV-2015.

Dengan demikian perekonomian Kalimantan Selatan secara keseluruhan tahun 2015 tumbuh sebesar 3,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2014 (4,85% yoy). Secara tahunan, perlambatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan bersumber dari melambatnya kinerja sektor utama khususnya pertambangan, disebabkan perlambatan



ekonomi Tiongkok dan terus turunnya harga batubara, meskipun pertumbuhan ekonomi India dan negara mitra lainnya meningkat.

### **Perkembangan laju inflasi di Kalimantan Selatan sampai dengan triwulan IV 2015**

Pergerakan inflasi tahunan Kalimantan Selatan pada akhir triwulan IV-2015 menurun dari triwulan sebelumnya. Laju inflasi tahunan pada triwulan laporan tercatat sebesar 5,14% (yoy), menurun signifikan dari triwulan III-2015 (7,03%, yoy) maupun inflasi 2014 (7,28%, yoy). Penurunan inflasi tahunan disebabkan oleh meredanya tekanan inflasi yang berasal dari komoditas volatile foods di sepanjang tahun 2015 didukung produksi yang meningkat, pasokan yang terjaga dengan baik, koreksi harga bahan bakar minyak (BBM) seiring tren penurunan harga minyak internasional serta penyelesaian proses konversi bahan bakar gas elpiji 3 kg di lima kabupaten pada akhir tahun. Secara triwulanan, inflasi triwulan IV-2015 sedikit meningkat yang dipicu oleh kenaikan permintaan masyarakat pada akhir tahun seiring dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Natal dan Tahun Baru 2016.

### **Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2016**

Pada triwulan I-2016 perekonomian Kalimantan Selatan diprakirakan tumbuh meningkat sejalan dengan membaiknya sektor pertanian dan pertambangan. Peningkatan sektor pertanian didorong oleh meningkatnya produksi tabama dan komoditas perkebunan sedangkan peningkatan sektor pertambangan didorong oleh potensi meningkatnya permintaan khususnya dari Tiongkok sehubungan perayaan Imlek. Sementara itu dari sisi permintaan, peningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh meningkatnya ekspor sejalan dengan peningkatan ekspor batubara serta meningkatnya konsumsi RT sejalan dengan perbaikan kinerja sektoral. Secara keseluruhan di tahun 2016, perekonomian Kalimantan Selatan berpotensi tumbuh meningkat, didorong oleh perbaikan kinerja di semua



sektor utama yakni sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Perbaikan kinerja sektoral khususnya sektor pertambangan dan industri pengolahan akan mendorong peningkatan ekspor. Sejalan dengan kondisi sektoral yang membaik, investasi swasta akan meningkat. Investasi pemerintah juga akan kembali mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan berlanjutnya pembangunan sejumlah infrastruktur sehingga investasi secara keseluruhan akan meningkat. Perbaikan kondisi sektoral yang tercermin pada kondisi korporasi akan berdampak pada kondisi RT sehingga konsumsi RT diperkirakan juga akan tumbuh meningkat.

### **Proyeksi Inflasi Kalimantan Selatan Tahun 2016**

Dari sisi perkembangan harga, dengan memperhatikan laju inflasi pada triwulan laporan, tingkat inflasi Kalimantan Selatan pada akhir triwulan I-2016 diperkirakan mengalami peningkatan yang bersifat temporer pada kisaran 5,3% - 5,5% (yoy) yang disebabkan oleh tekanan harga sejumlah komoditas pangan di awal tahun seiring dengan berlangsungnya musim tanam padi serta cuaca yang kurang kondusif di tengah-tengah musim penghujan. Pada akhir tahun, inflasi berangsur menurun ke sasaran target inflasi 4+1%.. (Sumber : Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Selatan, Triwulan IV, Bank Indonesia 23 Pebruari 2016).

## **2. Tinjauan Ekonomi**

### **a. Struktur Ekonomi**

Postur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebelum dan sesudah perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010, menunjukkan bahwa corak perekonomian masih berada pada tipe agraris. Hal ini terlihat dari besarnya dominasi kategori lapangan usaha pertanian yang menyumbang 26,74% dari total PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014. Hal ini juga menunjukkan eksploitasi sumber daya dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung di sektor



pertanian lebih tinggi untuk dapat tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain. Namun pada perjalanannya, besaran kontribusi kategori lapangan usaha pertanian sejak tahun 2010 hingga 2014 terus berangsur mengalami penyusutan, dari yang sebelumnya sebesar 30,85% di tahun 2010 menjadi 26,74% di tahun 2014. Disisi lain terjadi peningkatan kontribusi yang signifikan antara lain terjadi pada kategori lapangan usaha pertambangan, perdagangan besar dan eceran, serta administrasi pemerintahan waktu 4 tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah menambah dominasi dari ketiga kategori di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penciptaan nilai tambah. Pada tahun dasar 2010 ini, kategori lapangan usaha pertambangan menjadi salah satu sektor penyumbang nilai tambah terbesar dimana hal ini menjadi gebrakan baru dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara global. Sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi tersebut diekspor ke Cina dan India. Sedangkan dominasi kategori perdagangan dan administrasi pemerintah masih sama besarnya seperti yang terjadi sebelum perubahan tahun dasar dalam membentuk struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 3.1.**  
**Distribusi PDRB Kab. Hulu Sungai Selatan**  
**Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014**

NO	Sektor/Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,85	30,8	29,65	27,49	26,74
2	Pertambangan dan Penggalian	6,51	6,66	7,6	9,48	9,31
3	Industri Pengolahan	8,8	8,65	8,46	8,05	8,14
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	0,41	0,38	0,37	0,35	0,35
6	Konstruksi	8,05	8,01	7,87	7,78	8,13
7	Perdagang Besar dan Eceran	8085	8,91	9,12	9,25	9,37



8	Transportasi dan Pergudangan	8,31	5,16	5,13	5,24	5,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,38	3,47	3,46	3,44	3,47
10	Informasi dan Komunikasi	4,4	4,34	4,26	4,2	4,27
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,8	1,83	1,93	2,06	2,03
12	Real Estate	2,44	2,49	2,48	2,51	2,45
13	Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	8,57	8,78	9,09	9,54	9,96
	Jasa Pendidikan	7,03	6,99	7,07	7,06	6,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,82	1,79	1,82	1,88	1,88
17	Jasa Lainnya	1,62	1,59	1,55	1,52	1,53
	Total	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kab. HSS Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (tahun dasar 2010)

\*\*) Angka diperbaiki

\*) Angka sementara

Dilihat dari gambaran pada tabel diatas untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2014, berdasarkan distribusi sektor PDRB Kabupaten HSS yang menjadi 3 (tiga) sector kontributor utama adalah yaitu :

1. Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
2. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib
3. Sektor Pedagang Besar dan Eceran.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi

Secara agregat perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2011 hingga 2014 cenderung stabil meski agak sedikit melambat ditahun 2010 menjadi 5,33% dari 5,04% pada tahun 2011. Namun pada periode berikutnya, laju pertumbuhan ekonomi terus merangkak naik menjadi 5,80% pada tahun 2014. Salah satu faktor yang menyebabkan percepatan ini adalah diakibatkan karena meningkatnya produksi dan eksploitasi batubara di kategori lapangan usaha pertambangan serta membaiknya pertumbuhan di kategori pertanian tanaman pangan (peningkatan produksi padi) yang menjadi sumber pertumbuhan selama ini.

Padahal pada tingkat makro dan global, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dalam beberapa tahun belakangan



terlihat melemah akibat dari menurunnya produksi pertambangan batubara yang disupply dari beberapa kabupaten serta perlambatan ekonomi di dunia yaitu krisis eropa yang tidak kunjung reda, Namun akibat dari krisis tersebut tidak berdampak langsung terhadap perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 3.2.**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan**  
**Menurut Harga Konstan 2010**

No	Sektor/Lapangan Usaha	2011	2012	2013*	2014**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,47	1,69	-2,63	4,22
2	Pertambangan dan Penggalian	0,58	27,01	35,61	9,66
3	Industri Pengolahan	2,96	2,63	2,12	3,46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,20	7,23	-2,12	15,15
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	-2,89	1,12	1,77	8,39
6	Konstruksi	5,81	5,91	5,07	5,94
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5,59	5,51	6,27	5,20
8	Transportasi dan Pergudangan	3,45	3,73	7,09	5,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,74	7,61	5,62	6,69
10	Informasi dan Komunikasi	4,61	3,24	7,87	9,09
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,92	6,21	14,14	6,91
12	Real Estate	7,70	5,25	8,68	5,44
13	Jasa Perusahaan	8,73	5,74	4,30	4,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,66	5,96	5,76	5,31
	Jasa Pendidikan	5,62	5,18	7,46	7,38
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,76	7,30	9,56	6,61
17	Jasa Lainnya	3,44	3,67	3,60	7,68
	Total	5,40	5,33	5,68	5,80

Sumber : PDRB Kab. HSS Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (tahun dasar 2010)

\*\*) Angka diperbaiki

\*) Angka sementara

### c. PDRB Perkapita

PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Negara yang sudah maju, rata-rata memiliki PDRB



perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Menurut klasifikasi world bank, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.045 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan rendah. Sementara negara yang berpendapatan perkapita antara \$. 1.045-\$4.125 termasuk negara berpendapatan menengah kebawah (lower middle income), negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$4.125-\$12.746 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi (upper middle income), negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$4.125-\$12.746 dikategorikan sebagai negara yang memiliki pendapatan menengah tinggi (upper middle income). Sedangkan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.746 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja. Akan tetapi terdapat banyak dimensi yang dicakup dan target yang ingin dicapai dengan tujuan utama mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan hanyalah sasaran antara (syarat perlu) bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, tujuan pembangunan akan sulit terwujud. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator komperhensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakanginya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah. Selama kurun waktu 2010-2014 nilai nominal PDRB perkapita atas dasar harga berlaku semakin meningkat setiap tahunnya dari 13,3juta rupiah pada tahun 2010 menjadi 19,5 juta rupiah pada tahun 2014. Namun demikian, apabila diukur dalam USD, PDRB perkaipta Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih termasuk dalam kategori berpendapatan menengah kebawah. Dari sisi PDRB perkapita konstan, PDRB perkapita Hulu Sungai Selatan sempat tumbuh melambat di tahun 2012 sebesar 3,93% dari yang sebelumnya tumbuh 4% ditahun 2011. Namun pada



tahun berikutnya pertumbuhan PDRB per kapita terlihat membaik hingga tahun 2014 tumbuh sebesar 4,45%. Kondisi tersebut juga sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 3.3**  
**PDRB Perkapita Kabupaten HSS Tahun 2010-2014**

NO	PDRB	2010	2011	2012	2013*	2014**
1	PDRB perkapita (ADHB)	13.336.030	14.669.092	15.743.437	17.168.890	19.518.042
2	PDRB perkapita (ADHK)	13.336.030	13.869.014	14.413.916	15.045.210	15.715.367
	<i>pertumbuhan</i>	-				
3	PDRB perkapita (ADHB)%	-	10,00	7,32	9,05	13,68
4	PDRB perkapita (ADHK)%	-	4,00	3,93	4,38	4,45

**Sumber : PDRB Kab. HSS Menurut Lapangan Usaha 2010-2014 (tahun dasar 2010)**

**\*\*) Angka diperbaiki**

**\*) Angka sementara**

Arah kebijakan tahun 2017 merupakan penyesuaian terhadap berbagai tujuan dan target pembangunan 5 tahun RPJMD. Pada tahun 2017 dalam pelaksanaan RPJMD lebih melihat pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya guna memastikan tercapainya visi dan misi serta target capaian indikator kinerja dalam RPJMD 2014 - 2018.

Kebijakan yang dilaksanakan di tahun 2017 masih terarah pada peningkatan tata kelola pemerintahan, mewujudkan terlaksananya program-program ekonomi kerakyatan, peningkatan pendidikan masyarakat baik formal maupun informal serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pada aspek ekonomi dan sosial, pelaksanaan berbagai program harus benar-benar terfokus dalam upaya mengurangi kemiskinan. Meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan kerja dan perbaikan terhadap masalah



ketenagakerjaan. Pada aspek infrastruktur wilayah diarahkan pada semakin meningkatnya perwujudan perluasan Kota Kandangan, penyediaan infrastruktur perekonomian guna lebih memantapkan mobilitas perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan masyarakat, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan guna menunjang tercapainya sumberdaya manusia yang lebih berkualitas dan mandiri. Selanjutnya pada aspek lingkungan diarahkan pada semakin meningkat dan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup, menjaga keseimbangan fungsi ekosistem baik kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.

Kebijakan pembangunan dalam kerangka ekonomi daerah secara makro Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan PDRB yang berkualitas dengan lebih diupayakan melalui perbaikan manajemen usaha yang lebih mengarah pada semua bidang.
2. Meningkatkan PDRB perkapita masyarakat Kabupaten HSS, yakni dengan meningkatkan kualitas SDM yang terampil dan inovatif di sektor primer yang mengarah pada sekunder.
3. Meratanya distribusi pendapatan dengan membaiknya distribusi pendapatan Kab. HSS. Yakni mendistribusi pendapatan secara adil sesuai dengan hasil usaha masing-masing individu dan memberikan proteksi terhadap mereka yang mengalami cacat dan ketidakberdayaan lainnya.
4. Pencapaian peningkatan skala ekonomi (PDRB) yang diikuti pula dengan peningkatan semangat agamis, sehingga mampu menciptakan keseimbangan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang substansi dan hakiki.

## **B. SASARAN PEMBANGUNAN EKONOMI 2017**

Sesuai dengan sasaran pembangunan ekonomi makro Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018, maka ditetapkanlah sasaran khusus pembangunan ekonomi makro tahun 2017 yang meliputi 4 aspek dengan asumsi *ceteris paribus*, yaitu :



1) Pertumbuhan Ekonomi.

Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk tahun 2017 dengan 6,46% pertahun.

2) Koefisien Gini.

Koefisien gini sebagai ukuran kesenjangan antara yang memiliki pendapatan rendah dengan yang memiliki pendapat tinggi ditargetkan tetap yaitu 0,25%.

3) Indeks daya beli.

Indeks daya beli yang diartikan sebagai ukuran kemampuan daya beli masyarakat ditargetkan meningkat menjadi 70,16%

4) Meningkatkan PDRB.

PDRB harga konstan atau pendapatan perkapita penduduk menurut harga konstan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkualitas meningkat secara merata di semua wilayah dengan sasaran besaran Rp. 6.608.000,-.

## **C. PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI APBD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 2017**

### **1. PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH**

Proyeksi Pendapatan daerah TA. 2016 mengalami kenaikan sebesar 4,68 % menjadi menjadi Rp. 1.062.969.623.050,00 (TA. 2015 sebesar Rp. 1.013.172.561.052,00). Kontribusi terbesar berdasarkan besaran adalah :

- a. Pos Dana Perimbangan sebesar Rp. 746.432.892.000,00 (1,09%),
- b. Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.233.015.050.360,00 (16,35%).
- c. Pendapatan Asli Daerah Rp. 83.521.680.690,00 (8,45%)

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat seperti yang telah disampaikan pada forum musrenbang nasional oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan bahwa khusus pendanaan pembangunan bersifat baseline (mendasar), sehingga untuk proyeksi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperkirakan tidak mengalami perubahan. Secara rinci proyeksi pendapatan daerah



Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Target Pendapatan Tahun 2016 dan Proyeksi Tahun 2017**

NO	Uraian	STRUKTUR RAPBD		NAIK/ TURUN %
		2016	PROYEKSI 2017	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,073,862,413,000.00</b>	<b>1,094,138,392,000.00</b>	<b>1.89</b>
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>80,383,188,000.00</b>	<b>76,762,523,000.00</b>	<b>(4.50)</b>
1.1.1	Pajak daerah	9,360,523,000.00	8,360,523,000.00	<b>(10.68)</b>
1.1.2	Retribusi daerah	8,025,194,000.00	8,785,000,000.00	<b>9.47</b>
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5,221,700,000.00	5,732,000,000.00	<b>9.77</b>
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	57,775,771,000.00	53,885,000,000.00	<b>(6.73)</b>
<b>1,2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>755,932,892,000.00</b>	<b>753,574,869,000.00</b>	<b>(0.31)</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	207,463,325,000.00	221,412,479,000.00	<b>6.72</b>
1.2.2	Dana alokasi umum	482,751,537,000.00	532,162,390,000.00	<b>10.24</b>
1.2.3	Dana alokasi khusus	65,718,030,000.00	-	<b>(100.00)</b>
<b>1,3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>237,546,333,000.00</b>	<b>263,801,000,000.00</b>	<b>11.05</b>
1.3.1	Hibah	7,450,000,000.00	4,700,000,000.00	<b>(36.91)</b>
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	82,192,460,000.00	79,558,000,000.00	<b>(3.21)</b>
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	147,903,873,000.00	179,543,000,000.00	<b>21.39</b>
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0.00	0,00	0,00

Sumber : DPPKAD Kab. HSS tahun 2016

### 3. PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN 2017

Kebijakan Belanja Daerah mempertimbangkan pada besarnya kekuatan penerimaan Pendapatan Daerah. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang diatur pada. Belanja daerah diprioritaskan untuk alokasi Belanja Pegawai dan Belanja



penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Pengelolaan Belanja Daerah dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja (**performance budgeting system**). Penganggaran mengaitkan setiap setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

Pada Belanja Tidak Langsung Belanja, belanja pegawai menjadi prioritas, karena penting untuk mendukung kelancaran tugas umum pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan. Selain itu, belanja ditujukan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemandirian desa dan tanggap darurat. Belanja pegawai dialokasikan yang disediakan untuk gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan PNS serta penambahan PNS sesuai kebutuhan daerah. Alokasi belanja tidak langsung diproyeksikan untuk terus dilakukan efisiensi dan efektifitasnya seperti pada biaya rutin yaitu belanja pegawai yang mengalami kenaikan sebesar 2,98% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan belanja hibah turun 38,58% dan bantuan sosial mengalami kenaikan 10,57%. Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan diproyeksikan naik secara berfluktuasi sedangkan belanja bantuan tidak terduga diproyeksikan tidak berubah.

Alokasi Belanja langsung diproyeksikan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang merupakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2017 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan sebesar 9,43% menjadi Rp.403.108.960,520,00. Secara rinci proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 terlihat pada Tabel 3.5 berikut ini.



**Tabel 3.5**  
**Target Belanja Tahun 2016 dan proyeksi Belanja Tahun 2017**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No.	Uraian	STRUKTUR RAPBD		NAIK/ TURUN %
		Target 2016	Proyeksi TA 2017	
<b>2.1</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>708,349,413,000.00</b>	<b>773,435,524,000.00</b>	<b>9.19</b>
2.1.1	Belanja pegawai	552,738,229,000.00	569,234,000,000.00	<b>2.98</b>
2.1.3	Belanja Subsidi	4,428,000,000.00	5,428,000,000.00	<b>22.58</b>
2.1.4	Belanja hibah	9,768,750,000.00	6,000,000,000.00	<b>(38.58)</b>
2.1.5	Belanja bantuan sosial	22,915,212,000.00	25,337,712,000.00	<b>10.57</b>
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1,750,000,000.00	1,714,553,000.00	<b>(2.03)</b>
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	113,749,222,000.00	162,721,259,000.00	<b>43.05</b>
2.1.8	Belanja tidak terduga	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	<b>0.00</b>
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>445,066,000,000.00</b>	<b>403,108,960,520.00</b>	<b>(9.43)</b>
2.2.1	Belanja pegawai	23,267,780,000.00	28,852,350,000.00	<b>24.00</b>
2.2.2	Belanja barang dan jasa	216,010,507,000.00	199,058,578,389.00	<b>(7.85)</b>
2.2.3	Belanja modal	205,787,713,000.00	175,198,032,131.00	<b>(14.86)</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,153,415,413,000.00</b>	<b>1,176,544,484,520.00</b>	<b>2.01</b>

Sumber : DPPKAD Kab. HSS Tahun 2016

Proyeksi belanja sebesar Rp. 1.176.544.484.520.00,- mengakibatkan defisit anggaran yang disebabkan oleh alokasi pembiayaan belanja daerah lebih besar daripada kemampuan penerimaan pendapatan daerah. Proyeksi besarnya defisit anggaran tahun 2017 bertambah menjadi Rp. 82,406,092,520,00,- dari tahun 2016 atau 3,59%. sebagaimana tabel 3.4.



**Tabel 3.6**  
**Proyeksi Surplus/(Defisit)**  
**Tahun Anggaran 2016 & 2017**

No.	Uraian	STRUKTUR RAPBD	
		Target 2016	Proyeksi TA 2017
1	Pendapatan Daerah	1,073,862,413,000.00	1,094,138,392,000.00
2	Belanja Daerah	1,153,415,413,000.00	1,176,544,484,520.00
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(79,553,000,000,00)</b>	<b>(82,406,092,520,00)</b>

Sumber : DPPKAD Kab. HSS Tahun 2016

### 3. PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN 2017

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan karena lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah penyertaan modal (investasi) daerah. Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 terlihat pada Tabel 3.7 berikut ini.

**Tabel 3.7**  
**Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2017**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No.	Uraian	Jumlah		%
		Target 2016	Proyeksi TA 2017	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	103,277,000,000.00	94,906,092,520.00	(8.11)
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	99,053,000,000.00	90,406,092,520.00	(8.73)
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan	0,00	0,00	0,00



	daerah yang dipisahkan			
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	4,224,000,000.00	4,500,000,000.00	6.53
3.16	Penerimaan Piutang daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	<b>23,724,000,000.00</b>	<b>12,500,000,000.00</b>	<b>(47.31)</b>
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	18,724,000,000.00	7,500,000,000.00	<b>(59.94)</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>79,553,000,000.00</b>	<b>82,406,092,520.00</b>	<b>3,59</b>

Sumber :DPPKAD Kab. HSS tahun 2016

Pada tabel 3.7 dapat dilihat proyeksi pembiayaan daerah tahun 2017 dengan selain sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) yang sebesar Rp. 90.406.092.520,00 alokasi penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.500.000.000,00,-. Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi daerah) tersebut dalam rangka menutupi defisit anggaran.

#### **4. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PAD.**

Pengelola pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber pendapatan daerah dengan upaya intensifikasi pendapatan daerah. Intensifikasi lebih ditujukan pada sumber pendapatan yang sudah ada namun belum optimal pemungutannya, sedangkan ekstensifikasi lebih ditujukan pada sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan, yang di sesuaikan dengan potensi daerah.

Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah meliputi:

1. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pembinaan secara rutin terhadap Wajib pajak dan wajib retribusi.
2. Meningkatkan peran BUMD dan pemanfaatan aset daerah dalam memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah.



3. Peningkatan kualitas Pelayanan publik antara lain peningkatan peran Pemerintah daerah dalam bidang perizinan.
4. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak (PPh perorangan, PBB, dan PKB-BBNKB).
5. Meningkatkan sistem koordinasi dan informasi penerimaan daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai.

#### D. PERKIRAAN PENDANAAN PEMBANGUNAN 2017

Proyeksi pagu indikatif berdasarkan rekapitulasi usulan Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 untuk sumber dari belanja dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 403.108.960.520,00 yang tersebar pada 45 SKPD termasuk di dalamnya 11 Kecamatan dan 4 kelurahan termasuk dalam 1 Kecamatan (Kecamatan Kandangan Kota).

Uraian lengkap pagu indikatif yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

**TABEL 3.8**  
**REKAPITULASI PAGU INDIKATIF ANGGARAN PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 2017**

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu
1	Dinas Pendidikan	19.993.976.000
2	Dinas Kesehatan	35.115.000.000
3	RSUD Hasan Basry	69.075.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	104.458.957.000
5	Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan	28.809.084.000
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.112.028.083
7	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	3.366.000.000
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.190.000.000
9	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	3.311.000.000



10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.237.484.000
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.299.999.400
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.567.108.000
13	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik	2.828.999.225
14	Satuan Polisi Pamong Praja	1.749.000.000
15	Sekretariat Daerah	12.971.039.000
16	Sekretariat Bagian Tata Pemerintahan	13.694.999.959
17	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	720.641.000
18	Sekretariat Daerah Bagian Kesra	5.200.000.000
19	Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi dan Pembangunan	3.647.187.250
20	Sekretariat Daerah Bagian Humas	5.126.773.000
21	Sekretariat Daerah Bagian Umum	2.968.456.000
22	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	860.373.000
23	Sekretariat DPRD	14.204.499.000
24	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.999.563.000
25	Inspektorat Kabupaten	3.282.553.000
26	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	11.285.974.000
27	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	562.625.000
28	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	3.095.000.000
29	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah	1.098.000.000
30	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	7.793.360.000
31	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.837.955.800
32	Dinas Pertambangan dan Energi	2.800.000.000
33	Dinas Perikanan dan Peternakan	5.269.349.803
34	Kantor Pengelola Pasar	1.244.000.000
35	Kec. Kandangan	586.724.000
	- Kel. Kandangan Kota	318.680.000
	- Kel. Kandangan Utara	213.080.000
	- Kel. Kandangan Barat	250.630.000
	- Kel. Jambu Hilir	322.680.000
36	Kec. Padang Batung	960.480.000
37	Kec. Loksado	919.934.000
38	Kec. Sungai Raya	510.128.000
39	Kec. Simpur	1.025.480.000



40	Kec. Kalumpang	686.970.000
41	Kec. Angkinang	698.220.000
42	Kec. Telaga Langsung	499.900.000
43	Kec. Daha Utara	885.000.000
44	Kec. Daha Selatan	742.696.000
45	Kec. Daha Barat	712.374.000
-	<b>Total</b>	<b>403.108.960.520</b>

Sumber : Rekapitulasi Renja Akhir SKPD, Bappeda HSS, 2016





## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini dikemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2017 sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Kab. HSS tahun 2014-2018 serta diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang harus diatasi dan dihadapi. Dengan keterbatasan sumber daya dan mengacu pada prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, maka prioritas-prioritas pembangunan tahun 2017 adalah prioritas yang terfokus sebagai upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014- 2018 telah dijabarkan rencana pembangunan lima tahun sesuai masa bakti kepala daerah terpilih yaitu 2014-2018 dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam dokumen RPJMD terkandung berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi kepala daerah sebagai bentuk pendekatan politis dari kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, yang seiring tahun berjalan dilakukan penyempurnaan dengan perubahan sasaran dan indikator sasaran pembangunan tanpa mengubah esensi yang terdahulu yang dilakukan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hubungan tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 4.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan**

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Visi : Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif (SEHATI)			
Meningkatkan Kehidupan Beragama	Mewujudkan Nilai-Nilai Agamis sebagai sumber dalam kehidupan sehari-hari	Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama	Tidak terjadi konflik antar umat beragama
		Mewujudkan tatanan sosial keagamaan	Persentase kelulusan Khatam Al-quran
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani	Opini Audit Eksternal
			Predikat akuntabilitas kinerja
Meningkatnya pelayanan publik yang prima		Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	
		Prosentase penduduk yang memiliki KTP	
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	
Meningkatkan dan Mengembangkan potensi daerah	Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan	Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama proses perijinan
			Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
			APK PAUD
			APK SD/MI
			APK SMP/MTs
			APK SMA/SMK
			Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI
			Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts
			Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK
			Persentase Angka Kelulusan (AL) SMK
			Angka Partisipasi Murni SD/MI
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs



		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK
		Persentase lulusan yang diserap dunia kerja
	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Tidak terjadi konflik sosial
		Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)
	Meningkatnya fasilitasi sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV
		Persentase Guru SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1/D IV
		Persentase Guru SMA/SMK memenuhi kualifikasi S1/D IV
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase penurunan angka kematian ibu melahirkan
		Persentase angka kematian bayi
		Persentase penurunan kematian neonatal
		Persentase penurunan balita gizi kurang
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin



		Persentase penurunan angka kesakitan akibat demam berdarah dengue
		Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB
		Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas
		Persentase puskesmas dengan score $\geq 80$
		Persentase penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan (Kartu Hulu Sungai Selatan Sehat)
		Persentase desa dengan kategori siaga aktif pertama
		Persentase KK yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan
		Persentase KK menggunakan jamban sehat
Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil dan pariwisata	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan
	Menjadikan kota kandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olahraga	Persentase pelestarian budaya lokal
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
		Persentase fasilitas dan prasarana semua cabang olahraga yang berstandar nasional
	Menurunnya persentase kemiskinan	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang telah tersedia sarana pendamping desa sejahtera
		Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
		Persentase desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan



		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (daerah)
		Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah bebas oksigen	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB
			a. RTH Publik
			b. RTH Privat
			Jumlah hari dalam setahun dengan kualitas udara baik
		Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak yatim/piatu dan penyandang cacat	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu	Meningkatkan struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	Pertumbuhan PDRB (Laju pertumbuhan ekonomi)
		Meningkatnya pendapatan perkapita	PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000)
		Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase peningkatan produksi padi pertahun
	Persentase peningkatan produksi karet		
	Persentase peningkatan produksi kayu manis		
	Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	Pencari kerja yang ditempatkan
			Penurunan tingkat pengangguran terbuka
			Tingkat partisipasi angkatan kerja
		Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase peningkatan koperasi aktif
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		
	Meningkatnya pembinaan untuk 5000 pengusaha kecil produktif	Pembinaan UMKM	
Meningkatnya pendapata, sumber keuangan daerah	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	



	dan perekonomian masyarakat	Lainnya	Persentase retribusi pasar terhadap PAD
Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informatika	Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana wilayah	Meningkatkan infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	Persentase kinerja sistem irigasi
			Persentase penanganan daya rusak air
		Meningkatkan jangkauan penggunaan teknologi informasi	Persentase kecamatan yang telah mendapat fasilitas internet gratis
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	Persentase jalan dalam kondisi baik
			Peningkatan persentase konektivitas wilayah
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	
		Persentase kawasan yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	
	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya Sumberdaya hayati dan sumber daya alam yang terkelola memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan
			Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan
Persentase penurunan kasus ilegal logging			
			Persentase penurunan kebakaran hutan/titik api

## 4.2 Prioritas dan Pembangunan

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Prioritas Pembangunan tahun 2017 pada dasarnya adalah prioritas pembangunan yang diambil dari prioritas tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab.



HSS dan prioritas tahun ke 3 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. HSS Than 2005-2025.

Sebagaimana tema pembangunan tahun 2017 yang diangkat yaitu **Akurasi Sasaran Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Perencanaan Yang Efektif.**

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017 dalam Dokumen RPJMD 2014-2018 diamanahkan arah kebijakan yang diambil tetap mengacu pada arah kebijakan tahun sebelumnya, namun lebih tertuju pada upaya peningkatan hasil yang diperoleh pada tahun 2015. Prioritas Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Perbaikan pada tata kelola pemerintahan
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c. Peningkatan Produktivitas Daerah
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Prioritas tersebut ditetapkan dalam rangka upaya mencapai target-target sasaran dari visi dan misi Bupati Kab. HSS pada tahun perencanaan 2017, rincian sasaran dan target indikatornya seperti pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Sasaran dan Indikator Pembangunan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2017
1	Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama	Tidak terjadi konflik antar umat beragama	Terjadi (1 kejadian)	Tidak terjadi
2	Mewujudkan tatanan sosial keagamaan	Persentase kelulusan Khatam Al-quran	100%	0
3	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani	Opini Audit Eksternal	WDP	WTP
		Predikat akuntabilitas kinerja	CC	A
		Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	31% gaji pokok	ada peningkatan
4	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	80
		Prosentase penduduk yang memiliki KTP	92,86%	100%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	33,21%	90%



		Rata-rata lama proses perijinan	≥ 2 hari	2 hari
5	Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan	Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,47%	100%
		APK PAUD	47,61%	70,80%
		APK SD/MI	107,87%	100%
		APK SMP/MTs	91,45%	97,49%
		APK SMA/SMK	59,78%	79,72%
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	98,20%	100%
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK	100%	100%
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SMK	99,51%	100%
		Angka Partisipasi Murni SD/MI	94,60%	98,91%
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	69,21%	78,78%
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	43,96%	65,54%
		Persentase lulusan yang diserap dunia kerja	50,00%	65%
		APK PAUD	47,61%	70,80%
6	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	48,6% (1:296 RT)	100% (609 RT)
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	33,33% (1kali patroli dlm sehari)	100%
		Tidak terjadi konflik sosial	5 kejadian	Tidak terjadi
		Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	40 ormas	40 ormas
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	68,89%	79%
7	Meningkatnya fasilitasi sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	36	100%
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	853 / 47%	89,4%
		Persentase Guru SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1/D IV	392 / 78%	95,60%
		Persentase Guru SMA/SMK memenuhi kualifikasi S1/D IV	371 /91,98%	98,40%
8	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase penurunan angka kematian ibu melahirkan	262	40%
		Persentase angka kematian bayi	11,8	
		Persentase penurunan kematian	39	25%



		neonatal		
		Persentase penurunan balita gizi kurang	11,18%	25%
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	89,10%	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	4,30%	100%
		Persentase penurunan angka kesakitan akbibat demam berdarah dengue	0,096	80%
		Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	11	1%
		Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas	100%	100%
		Persentase puskesmas dengan score $\geq 80$	0	95%
		Persentase penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan (Kartu Hulu Sungai Selatan Sehat)	100%	100%
		Persentase desa dengan kategori siaga aktif pratama	50%	45%
		Persentase KK yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan	71,35%	80%
		Persentase KK menggunakan jamban sehat	55%	73%
9	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan	0,70%	0,92%
10	Menjadikan kota kandungan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olahraga	Persentase pelestarian budaya lokal	70%	78%
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	41.240 wisatawan	12,5%
		Persentase fasilitas dan prasarana semua cabang olahraga yang berstandar nasional	10 buah	46%
11	Menurunnya persentase kemiskinan	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	66,7%	4,810%
12	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masy dalam pembangunan	Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	0%	660%
		Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	45%	65%
		Persentase desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	57%	68%
13	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (daerah)	11.250 ton /307,82%	311,82%
14	Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah bebas oksigen	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB		
		a. RTH Publik	25%	29%
		b. RTH Privat	(5.5.185Ha)	
		c. RTH Privat	5%	10%
		d. RTH Privat	(2.593Ha)	
		Jumlah hari dalam setahun dengan kualitas udara baik	0	75%
15	Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	19,34% (1.536 orang)	50% (4025 orang)



	yatim/piatu dan penyandang cacat			
16	Meningkatkan struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	Pertumbuhan PDRB (Laju pertumbuhan ekonomi)	5,60%	6,46%
17	Meningkatnya pendapatan perkapita	PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000)	10.196	6.608
18	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase peningkatan produksi padi pertahun	188.674 ton	11,62% 267.119 ton
		Persentase peningkatan produksi karet	7.206,9 ton	10,1% (728,17 ton)
		Persentase peningkatan produksi kayu manis	1436,53 ton	6,03% (86,65 ton)
19	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	Pencari kerja yang ditempatkan	4,74%	38,42%
		Penurunan tingkat pengangguran terbuka	4,22%	3,15%
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,82%	65,62%
20	Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase peningkatan koperasi aktif	70 (105 koperasi aktif)	(138 KA)
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,04%	14,250%
21	Meningkatnya pembinaan untuk 5000 pengusaha kecil produktif	Pembinaan UMKM	88,91% ( 40.096 UMKM yang terbina)	0 (45.096 UMKM yang terbina)
22	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	13,41%	27,86%
		Persentase retribusi pasar terhadap PAD	3%	3%
23	Maningkatkan infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian , perikanan, peternakan dan perkebunan	Persentase kinerja sistem irigasi	48,08%	80%
		Persentase penanganan daya rusak air	30%	30%
24	Meningkatkan jangkauan penggunaan teknologi informasi	Persentase kecamatan yang telah mendapat fasilitas internet gratis	18,18% (3 titik wifi di 2 kec)	100% 4 titik
25	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	Persentase jalan dalam kondisi baik	60,00%	74%
		Peningkatan persentase konektivitas wilayah	90%	100%
26	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	34,33%	71,97%
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	34,33%	61,5%
		Persentase kawasan yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	33,60%	50%
		Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	57,59%	20%
27	Meningkatnya Sumberdaya hayati dan sumber daya alam yang dikelola memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	(504,53 Ha)	2,56% (350 Ha)
		Persentase penurunan kasus ilegal logging	12 kasus	16,67% (2 kasus)
		Persentase penurunan kebakaran hutan/titik api	44 titik api	11,36% (16 titik api)



#### **4.2.3 Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. HSS Tahun 2017**

Penyusunan RKPD Tahun 2017 tidak hanya mengacu pada RPJMD tetapi juga mengacu pada RKP dan RKPD Prov. Kalsel tahun 2017, prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Prov. Kalsel harus diperhatikan dan di jabarkan dengan prioritas pemerintah Kab. HSS

##### **1. Prioritas Pembangunan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang diteapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Kab. HSS Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 atau arah pembangunan nasional disusun berdasarkan Nawacita yang terdiri atas :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penenggalan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;



8. Melakukan revolusi mental; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

### **1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017**

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2017 (RPJMN 2015-2019) : “MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH”, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1% dengan sasaran wilayah Kalimantan sebesar 6,1%;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,5%-8,5% dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Kalimantan sebesar 5,4%;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 5,2%-5,5% dengan sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Kalimantan sebesar 4,2%; dan
4. Laju inflasi sebesar 4,0.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3(tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari :
  - a). revolusi mental;
  - b). pembangunan pendidikan;
  - c). pembangunan kesehatan; dan
  - d). Pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari :
  - a). kedaulatan pangan;
  - b). kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;
  - c). Kemaritiman dan kelautan;
  - d). Pariwisata;
  - e) Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari :
  - a). pemerataan
  - b). Perbatasan negara dan daerah tertinggal;
  - c). Pembangunan perdesaan dan perkotaan;
  - d). Pengembangan konektivitas nasional.



## 1.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

### 1. Bidang Pendidikan.

- a. Pendidikan menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- b. Pendidikan Khusus; merupakan Warga Negara Indonesia usia 4 s.d 18 tahun yang berkebutuhan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

### 2. Bidang Kesehatan.

- a. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
- b. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
- c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- d. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- e. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
- f. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
- g. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
- h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- i. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- j. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
- k. Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna nazpa



dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

1. Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - a. Setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih.
  - b. Setiap warga negara berhak memperoleh akses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Penyediaan tempat tinggal korban bencana; setiap korban bencana berhak memperoleh tempat tinggal sesuai dengan standar tempat tinggal.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
  - a. Setiap warga negara yang menjadi korban yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar.
  - b. Setiap warga negara yang menjadi korban dan berdampak kebakaran memerlukan pertolongan.
  - c. Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar.
  - d. Setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan).
  - e. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum.
  - f. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas.
6. Bidang Sosial
  - a. Pemberdayaan sosial terhadap warga komunitas adat terpencil (KAT); setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
  - b. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga; setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.



- c. Rehabilitasi sosial lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- d. Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga.
- e. Rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikologi sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

**Tabel 4.3**  
**Program Prioritas Daerah**  
**Yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2017**



No	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang	12	87	8.945.014.100	2.22%
2	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	37	499	140.738.557.350	34.91%
3	Pembangunan Ekonomi	30	113	21.695.263.850	5.38%
4	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	6	19	5.713.237.500	1.42%
5	Pembangunan Politik	5	16	12.067.384.200	2.99%
6	Pembangunan Pertahanan dan Keamanan	7	22	2.444.294.000	0.61%
7	Hukum dan Aparatur	14	824	109.851.722.737	27.25%
8	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	9	71	11.770.025.633	2.92%



No	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Rp	%
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana	14	49	75.849.308.800	18.82%
10	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	11	23	14.034.152.350	3.48%
-	TOTAL	145	1.723	403.108.960.520	

## 2. Prioritas Pembangunan Kalimantan Selatan

### 2.1 Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Pembangunan Kalimantan Selatan pada RKPDP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017, merupakan tahapan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 “

“MEMBANGUN DAYA SAING DAERAH MENUJU KALSEL MANDIRI, TERDEPAN DAN BERKELANJUTAN.”

### 2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil proses politik yang dilaksanakan melalui Pemilukada tahun 2015, visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera,  
Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing**

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung Kalimantan Selatan yang mapan (Mandiri dan Terdepan) terdapat empat elemen utama pembangunan yaitu aspek kesejahteraan, aspek keadilan, aspek mandiri dan aspek berdaya saing.

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 memuat 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi.

**Tabel 4.4**  
**Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**  
**Provinsi Kalimantan Selatan**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat dan terampil	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja
2	Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal,	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
			Menurunnya jumlah masyarakat miskin



	dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Meningkatnya daya saing perekonomian	Meningkatnya nilai tambah produk daerah dan investasi dalam aktivitas perekonomian Meningkatnya kontribusi sektor pertanian
		Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan asri	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan
3	Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya	Meningkatkan pemertaan pembangunan seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang	Terwujudnya pembangunan dan sarana prasarana penunjang kehidupan dasar secara merata dan kontinyu
4	Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal	Meningkatkan kualitas kehidupan berbudaya lokal	Meningkatnya penyelenggaraan festival budaya
5	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis, bersih dan bebas KKN Meningkatnya kualitas layanan publik

### 2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai dengan kerangka prioritas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, terdapat 13 prioritas pembangunan pada tahun 2017 yang terdiri atas :

1. Menuju Kalsel Cerdas
2. Menuju Kalsel Sehat
3. Menuju Kalsel Terampil
4. Menuju Kalsel Beriman
5. Menuju Kalsel Sentra Pangan
6. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
7. Kalsel Menuju Daerah Industri Perdagangan dan Jasa
8. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas
9. Menuju Kalsel dengan Infrstruktur Berkualitas
10. Menuju Kalsel Berbudaya
11. Menuju Kalsel Aman
12. Kalsel menuju Tuan Rumah PON
13. Menuju Kalsel dengan Pemerintah Daerah Berkinerja Baik



**Tabel 4.5**  
**Program Prioritas Daerah**  
**Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi Tahun 2017**



No	Prioritas Provinsi Kalsel	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Menuju Kalsel Cerdas	5	88	12.345.452.700	3.06%
2	Menuju Kalsel Sehat	15	361	81.623.238.800	20.25%
3	Menuju Kalsel Terampil	13	42	5.845.680.850	1.45%
4	Menuju Kalsel Beriman	0	0	0	0.00%
5	Menuju Kalsel Sentra Pangan	13	63	14.605.355.000	3.62%
6	Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional	3	5	889.316.500	0.22%
7	Kalsel Menuju Daerah Industri Perdagangan dan Jasa	13	41	5.556.466.600	1.38%
8	Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas	7	19	16.737.211.300	4.15%
9	Menuju Kalsel dengan Infrastruktur Yang Berkualitas	23	74	86.085.704.500	21.36%
10	Menuju Kalsel Berbudaya	8	22	3.472.980.350	0.86%
11	Menuju Kalsel Aman	10	30	2.609.623.500	0.65%
12	Kalsel Menuju Tuan Rumah PON	1	1	35.935.000.000	8.91%
13	Menuju Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik	34	977	137.402.930.420	34.09%
-	TOTAL	145	1.723	403.108.960.520	

**a. Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017**

Dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan prioritas pembangunan Provinsi Kalsel yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel Tahun 2017, serta



berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Tahun 2015, maka ditetapkan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan

Melaksanakan berbagai urusan wajib dan urusan pilihan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, perbaikan kinerja pemerintah dengan melakukan peningkatan terhadap kompetensi aparatur, pembinaan kelembagaan pemerintah, peningkatan kinerja untuk menggali sumber pendapatan daerah dan memelihara kerukunan hidup dalam suasana keagamaan.

2. Produktifitas

Melakukan pengembangan potensi lahan, meningkatkan inovasi masyarakat dalam sector pertanian dan industry pengolahan khususnya produk andalan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan pembinaan terhadap lembaga ekonomi yang ada di kecamatan maupun pedesaan.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Melakukan perbaikan terhadap mutu dan layanan pendidikan dan kesehatan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan baik secara social maupun ekonomi, meningkatkan peran perempuan, perlindungan dan pembinaan anak terlantar, membina penyandang masalah social dalam upaya menumbuhkan kemandirian.

4. Lingkungan Hidup

Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem, pengendalian bencana alam serta perbaikan/rehabilitasi terhadap dampak pembangunan yang berpengaruh terhadap lingkungan.

Berdasarkan dengan 4 (empat) prioritas pembangunan tersebut diatas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 diatas masih tidak berbeda terlalu jauh dari prioritas pembangunan tahun sebelumnya, maka dapat diperjelas lagi kebijakan dan sasarannya sasarannya dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :



a. Pemerintahan

1. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka upaya Perbaikan tata kelola pemerintahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pembangunan diarahkan pada :

- a. Peningkatan kompetensi aparatur.
- b. Meningkatkan fungsi pemerintahan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- c. Meningkatnya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- d. Peningkatan dan Sumber Pendapatan Daerah.
- e. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis
- f. Meningkatkan layanan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah Terciptanya reformasi birokrasi, dapat diperinci lagi terdiri dari :

- a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah
- b. meningkatnya kualitas fungsi pemerintahan dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan.
- c. meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
- d. meningkatnya kualitas institusi pemberi layanan langsung dan layanan dasar kepada masyarakat
- e. meningkatnya kualitas aparat pemberi layanan
- f. terlaksananya sinergi pemerintah dengan masyarakat dan swasta pada proses pembangunan
- g. meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- h. terselenggaranya sosialisasi produk hukum daerah dan aturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Meningkatnya penggalan terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan daerah
- j. kondusifnya kehidupan masyarakat yang agamis
- k. Meningkatnya layanan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan

b. Produktivitas

1. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan produktivitas di Kab. HSS adalah



- a. Mendorong peran sektor industri, sektor perdagangan, serta sektor jasa swasta
  - b. Mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dengan penyediaan pasar baik di daerah maupun luar daerah
  - c. Mendorong Kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat tani/nelayan
  - d. Pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas lokal
  - e. Mendorong investasi dan permodalan
  - f. Meningkatkan produktivitas pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan ketahanan pangan
  - g. Menciptakan peluang usaha dan revitalisasi terhadap unit-unit usaha strategis yang dapat menyerap tenaga kerja
  - h. Melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, manajerial usaha dan pemasaran produk
  - i. Mengupayakan SDM kalangan muda sebagai tenaga kerja potensial/siap kerja
  - j. Meningkatkan pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur lainnya.
  - k. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana permukiman, kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya
  - l. Pengembangan wilayah Kota Kandangan
2. Sasaran
- Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produktifitas, dapat diperinci lagi terdiri dari:
- a. Meningkatnya perekonomian daerah dan kesejahteraan Masyarakat
  - b. Meningkatnya peran sektor industri, sektor perdagangan, serta sektor jasa swasta
  - c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dengan penyediaan pasar baik di daerah maupun luar daerah
  - d. Meningkatnya Kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat tani/nelayan
  - e. Meningkatnya perkembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas lokal
  - f. Meningkatnya investasi dan permodalan
  - g. Meningkatnya produktivitas pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan ketahanan pangan
  - h. Meningkatnya peluang usaha dan revitalisasi terhadap unit-unit usaha strategis yang dapat menyerap tenaga kerja



- i. Meningkatnya pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, manajerial usaha dan pemasaran produk
  - j. Meningkatnya SDM kalangan muda sebagai tenaga kerja potensial/siap kerja
  - k. Meningkatnya pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur lainnya.
  - l. Meningkatnya pengembangan sarana prasarana permukiman, kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya
  - m. Meningkatnya Pengembangan wilayah Kota Kandungan
- c. Pembangunan Sumber Daya Manusia
1. Arah Kebijakan  
Kebijakan yang ditempuh adalah :
    - a) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidik serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil
    - b) Menyediakan sarana pendidikan yang lebih bermutu dan memadai
    - c) Menyediakan pendidikan gratis untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMU/ sederajat berasal dari keluarga kurang mampu.
    - d) Menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu yang berasal dari daerah
    - e) Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan
    - f) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
    - g) Meningkatkan sistem jaminan kesehatan dan pengobatan gratis di RSUD H.Hasan Basry
    - h) Menjadikan RSUD H.Hasan Basry sebagai rumah sakit rujukan Banua Enam
    - i) Meningkatkan transparansi dalam pelayanan di RSUD H.Hasan Basry
    - j) Meningkatkan Puskesmas di semua kecamatan untuk melayani rawat inap dengan skala prioritas.
    - k) Meningkatkan perkembangan sektor sektor ekonomi produktif daerah
    - l) Meningkatkan implementasi rencana aksi daerah dalam menanggulangi kemiskinan.
    - m) Meningkatkan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial
    - n) Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana



- o) Meningkatkan peran pemuda dan mengembangkan keolahragaan dalam pembangunan
- p) Melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya daerah
- q) Mendorong peran perempuan
- r) Melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera

## 2. Sasaran

Adapun Sasaran yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan adalah Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, dapat diperinci lagi terdiri dari :

- a) Meningkatnya kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidik serta meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil
- b) Tersedianya sarana pendidikan yang lebih bermutu dan memadai
- c) Terselenggaranya pendidikan gratis untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMU/ sederajat berasal dari keluarga kurang mampu.
- d) Tersedianya beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu yang berasal dari daerah
- e) Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan
- f) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
- g) Tersedianya sistem jaminan kesehatan dan pengobatan gratis di RSUD H.Hasan Basry
- h) Meningkatkan status RSUD H.Hasan Basry menjadi rumah sakit rujukan Banua Enam
- i) Meningkatnya transparansi dalam pelayanan di RSUD H.Hasan Basry
- j) Meningkatnya status Puskesmas di semua kecamatan untuk melayani rawat inap dengan skala prioritas.
- k) Meningkatnya perkembangan sektor ekonomi produktif daerah
- l) Terlaksananya implementasi rencana aksi daerah dalam menanggulangi kemiskinan.
- m) Meningkatkan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial
- n) Terselenggaranya penanganan dan penanggulangan bencana
- o) Meningkatnya peran pemuda dan mengembangkan keolahragaan dalam pembangunan



- p) Terlaksananya pelestarian dan perkembangan seni dan budaya daerah
- q) Meningkatnya peran perempuan
- r) Terlaksananya program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

d. Lingkungan Hidup

1. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh yaitu :

- a. mendorong kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan
- b. Mewujudkan penataan ruang yang sesuai dan mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian
- c. Mendorong pengembangan dan konservasi sumberdaya air untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan lahan

2. Sasaran

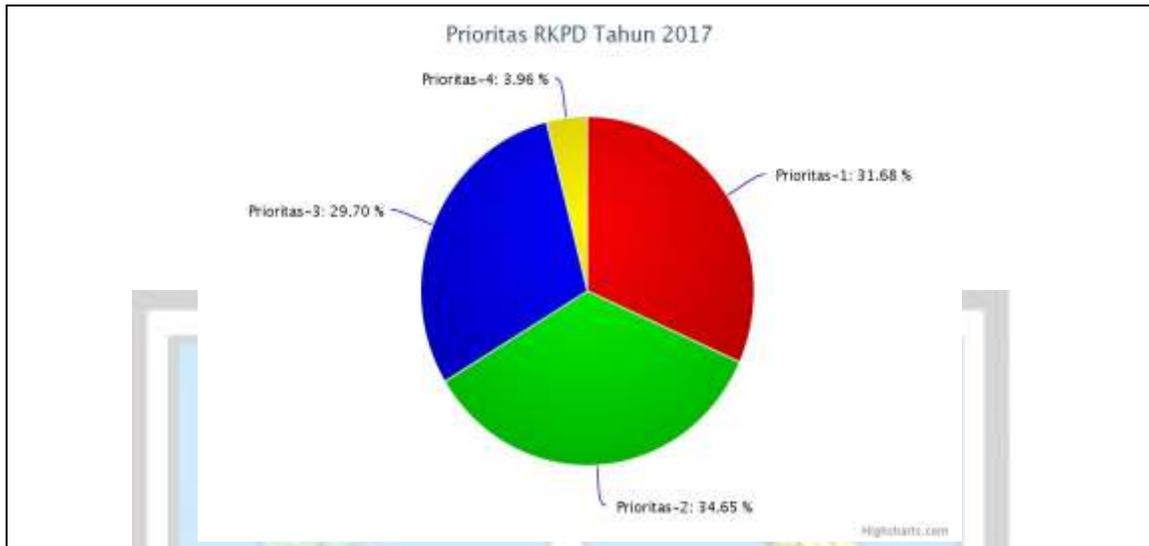
Adapun Sasaran yang ingin dicapai pada prioritas ini adalah Lingkungan Hidup yang Semakin Aman, Nyaman dan Lestari, dapat diperinci lagi terdiri dari :

- a). Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan
- b). Meningkatnya kesesuaian penataan ruang
- c). Meningkatnya perlindungan sumberdaya air dan lahan

Sesuai dengan kerangka prioritas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2018, maka skala prioritas pembangunan pada tahun 2017 yang terdiri atas :



**Tabel 4.6**  
**Program Prioritas Daerah**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017**



No	Prioritas RKPD	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Pemerintahan	22	904	128.733.396.187	32%
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia	45	523	139.467.530.300	35%
3	Produktifitas	63	253	119.076.199.233	30%
4	Lingkungan Hidup	15	43	15.831.834.800	4%
-	TOTAL	145	1.723	403.108.960.520	

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017**

No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	Terciptanya Reformasi Birokrasi	001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran yang prima	1 tahun	Semua SKPD
		002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Semua SKPD
		003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100%	Beberapa SKPD
		005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	Semua SKPD,
			Meningkatnya	465 orang	BKD, Diklat



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			kualitas sumber daya aparatur melalui diklat		
		006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian Laporan Kinerja dan keuangan Tepat Waktu	100%	Semua SKPD
		013. Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui E-Procurement	100%	Sekretariat Daerah – Bagian Umum
		015. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase indeks kepuasan DPRD & persentase kesesuaian pelaksanaan standar operasional prosedur	100%	Sekretariat DPRD
		016. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati Daerah	1 Tahun	Setda
		017. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pertumbuhan PAD terhadap APBD	27,860%	DPPKAD
		019. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Pelaksanaan pembinaan Kebijakan Pengelolaan ADD di Kab. HSS	144 Desa	Bag. Tapem
			Penerbitan Peraturan Desa (Lembaran Desa)	288 buah	
		020. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	jumlah Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	120 temuan	Inspektorat
		021. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	jumlah bimtek untuk peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	5 Bimbingan Teknis	Inspektorat
		022. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Standart Operasional Pemeriksaan	1 SOP	Inspektorat Kabupaten



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		023. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersusunnya sistem informasi pelayanan publik	1 Tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
		024. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tertanganinya Setiap pengaduan yang disampaikan Masyarakat	2 Kelompok pengaduan	Inspektorat Kabupaten
		026. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Bag. Hukum
		036. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase meningkatnya pembinaan dan pendayagunaan aparatur berbasis kompetensi	25%	BKD dan Diklat
		029. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	Sekretariat Daerah
		043. Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organisasi Kecamatan	Meningkatkan Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organisasi Kecamatan /Organisasi Kecamatan	100%	Kecamatan dan Kelurahan
		044. Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Meningkatnya Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	1 Tahun	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
		045. Program Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	10 SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
		015. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan administrasi kependudukan	100%	Disdukcapil
2	Meningkatnya Produktifitas	015. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	77,80%	Dinas PU
			Persentase Jalan dalam kondisi baik	62%	



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		016. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase jaringan drainase wilayah perkotaan	80%	Dinas LH Takodes
		018. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	62%	Dinas PU
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	77,80%	
		024. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	61,80%	Dinas PU
		000. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase pengembangan pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	37,33%	Dinas PU
			Persentase pengembangan pengembangan kinerja pengelolaan air minum	47,30	
		028. Program pengendalian banjir	Pengendalian banjir dalam antisipasi daya rusak air	300 Meter	Dinas PU
		030. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Penyediaan sarana infrastruktur yang memadai	Jalan agropolitan 12 ruas	Dinas PU
		015. Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengembangan perumahan yg melibatkan peran pemerintah	96,86%	Dinas PU
		000. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100%	Dinas PU
		020. Program pengelolaan areal pemakaman	Meningkatnya fasilitas sosial untuk masyarakat	1 TPU	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		015. Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang wilayah	100%	Bappeda



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		015. Program Pengembangan data/informasi	Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah	100%	Bappeda
		016. Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan	100%	Bappeda
		018. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Persentase jalan lingkungan dan gang dengan kondisi baik	80%	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
		019. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Meningkatnya keterpaduan perencanaan Pengemb. Kota-Kota Menengah & Besar	100%	Bappeda
		021. Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kualitas perencanaan pembangunan daerah	95%	Bappeda
		022. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya keterpaduan perencanaan prog bidang ekonomi	100%	Bappeda
		023. Program perencanaan sosial budaya	Meningkatnya keterpaduan perencanaan sosial budaya	100%	Bappeda
		000. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reasarana dan dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100%	Dishubkomin fo
		017. Program peningkatan pelayanan angkutan	meningkatnya pelayanan angkutan yang baik dan lancar	3 buah	Dishubkomin fo
		000. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya pengendalian lalu lintas yang tertib, aman dan terkendali	100%	Dishubkomin fo
		016. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan pertumbuhan wirausaha dan kecakapan hidup pemuda/masyarakat Pelaku UMKM	300 orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		018. Program Peningkatan Kualitas	Jumlah Koperasi Aktif	138 buah	Dinas Perindustria



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Kelembagaan Koperasi			n, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		015. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Nilai Investasi	5%	Sekretaris daerah - Bagian Ekobang
		000. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Desa Yang Telah Tersedia Sarjana Pendamping Desa Sejahtera	80%	Sekretariat Daerah Bag. Ekonomi & Pemb.
		000. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase Jenis Hasil Pertanian Berbasis AgroBisnis	38%	Sekretariat Daerah Bag. Ekonomi & Pemb.
		015. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan	100%	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			Persentase ketersediaan pangan utama (beras)	311%	
			Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita	80%	
			Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90%	
			Persentase skor pola pangan harapan (PPH)	79,72%	
		017. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	66%	Badan Keluarga Berencana, PMP
		018. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	148 Desa	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
		015. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pemenuhan Fasilitas Jaringan Komunikasi yang memadai untuk mendukung penyebaran informasi.	1 Tahun	Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		000. Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatnya hubungan kerjasama yang baik antara Pemkab dengan Media Massa untuk menyebarluaskan program dan kebijakan Pemkab HSS	4 media massa	Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat
		000. Program kerjasama informasi dengan mass media	Penyebarluasan informasi dan pelayanan internet gratis di Kecamatan	4 titik	Dishubkomin fo
		000. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Pengembangan karya tulis pemuda HSS di internet	50 karya tulis pemuda secara online	Dishubkomin fo
		017. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya pengetahuan pelajar dan guru di bidang kominfo	330 peserta	Dishubkomin fo
		015. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase meningkatnya kelas BPK menjadi kelas utama/madya	80,80%	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		016. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase meningkatnya kelas BPK menjadi kelas utama/madya	80,80%	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		017. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase meningkatnya kelas kelompok tani menjadi kelompok tani madya/utama	90%	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		019. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Persentase meningkatnya kelas BPK menjadi kelas utama/madya	80,80%	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		020. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya kesehatan hewan dan ternak dengan menurunnya kematian ternak(S/C)	S/C = 1,50	Dinas Perikanan dan Peternakan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		021. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi daging (ton)	1612.39	Dinas Perikanan dan Peternakan
		015. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terkendalinya pemanfaatan hasil hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Survey potensi HHBK dan penanganan pasca panen	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		016. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan dan pemanfaatan lahan marginal dalam dan luar kawasan hutan	175 Ha	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		017. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan kebun lingkup Kab. HSS	24 kali setahun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		015. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Terselenggaranya pertambangan yang aman, tertib dan Produktif serta selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan	17 IUP mineral bukan logam dan batuan, 3 IUP Batubara, 1 IUP mineral logam, 1 PKP2B	Dinas Pertambangan dan Energi
		017. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terdapat dan Terpenuhiya Kebutuhan Listrik Masyarakat yang belum terjangkau PLN	50 PLTS dan 55 genset	Dinas Pertambangan dan Energi
		018. Program Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Mineral	Terdatanya sumberdaya mineral	2 Kecamatan	Dinas Pertambangan dan Energi
		015. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tersebarluasnya informasi dan pemasaran pariwisata	4 Pameran	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		016. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun	2 buah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		017. Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya peran serta masyarakat	7 Kelompok	Dinas Kebudayaan dan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			dalam pengembangan kemitraan		Pariwisata
		016. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan	2 Kelompok POKWASMAS	Dinas Perikanan dan Peternakan
		020. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi benih ikan dan produksi perikanan budidaya	3600 ton	Dinas Perikanan dan Peternakan
		021. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan	8208 ton	Dinas Perikanan dan Peternakan
		023. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tercapaiannya Nilai Tambah Produk Perikanan Melalui Peningkatan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	12 Kelompok PHP	Dinas Perikanan dan Peternakan
		000. Program pembinaan pedagang kaki lima	Terbinanya pedagang kaki lima	100 wirausaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		015. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	11 kali	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		018. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3 unit pasar	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		015. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi	2 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		016. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah	600 wira usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		017. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri	200 wira usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		019. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Terpeliharanya penerangan jalan umum	5%	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
		020. Program Penertiban dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya operasi penertiban dan terpeliharanya sarana dan prasarana pasar	1 Tahun	Kantor Pengelola Pasar
		019. Program Pengembangan Sumber Energi Alternatif	Termanfaatkannya potensi daerah sebagai bahan energi alternatif	2 Instalasi Biogas	Dinas Pertambangan dan Energi
		020. Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas	Terawasinya pendistribusian BBM dan Gas	5 SPBU, 3 Agen Mitan, 45 Pangkalan Mitan	Dinas Pertambangan dan Energi
		000. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih	4 unit sumur bor ABT, 5 paket distribusi pemipaan	Dinas Pertambangan dan Energi
		000. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan)	Meningkatnya produktivitas padi per hektar	6.205	Dinas Pertanian, TPH
			Tersedianya bibit karet, tanaman kehutanan dan tanaman lokal	192.000 batang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		000. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%) harga konstan	3.10%	Dinas Pertanian, TPH
			Dikenalkannya hasil	3 even	Dinas Kehutanan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			produksi/pengolahan bidang kehutanan dan perkebunan		dan Perkebunan
		000. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2 jenis teknologi	Dinas Pertanian, TPH
			Terlaksananya peningkatan produksi dan pengolahan hasil kehutanan dan perkebunan	3 kelompok masyarakat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		000. Program peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya nilai tukar petani (tanaman perkebunan rakyat)	99.02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		000. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan	150 ha dan 7 kelompok masyarakat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	015. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini	66,30%	Dinas Pendidikan
		016. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	8,1 tahun	Dinas Pendidikan
		017. Program Pendidikan Menengah	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah	66,16%	Dinas Pendidikan
		018. Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Program pendidikan non Formal	40 lembaga pendidikan nonformal	Dinas Pendidikan
		020. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	Dinas Pendidikan
		021. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3 ujian sekolah/ujian nasional	Dinas Pendidikan
		015. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Terpenuhinya obat dan pembekalan kesehatan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan	212.308 jiwa	Dinas Kesehatan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			kebutuhan jumlah maupun jenisnya		
		016. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan masyarakat	6 laporan, 1 puskesmas BLUD	Dinas Kesehatan
		019. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Tercapainya Rumah Tangga Ber PHBS dari 38% menjadi 53%	Penambahan RT ber PHBS 3%	Dinas Kesehatan
		020. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) dari 60% menjadi 80%, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	Kenaikan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) menjadi 4%/tahun, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	Dinas Kesehatan
		021. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya jumlah desa ODF dari 22 desa menjadi 82 Desa	Meningkatnya jumlah desa ODF 10 desa /tahun	Dinas Kesehatan
		022. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tertanganinya penyakit menular yang berkembang di masyarakat	temuan pneumonia balita 48%, temuan pasien baru TB BTA positif 40%, DBD yang ditangani 100%, penemuan penderita deare 49,9% dan Penanganan Penderita HIV 100%	Dinas Kesehatan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		023. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	Dinas Kesehatan
		028. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kartu hss sehat	135000 jiwa pertahun	Dinas Kesehatan
		029. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap anak	25 orang peserta	Dinas Kesehatan
		030. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya kesehatan lansia pada 50 posyandu	1450 org lansia	Dinas Kesehatan
		031. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 47%	Terlaksananya a pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 62%	Dinas Kesehatan
		032. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	angka kematian ibu melahirkan 10 orang dan kematian bayi sebanyak 50 orang	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan maksimal 2 orang dan kematian bayi maksimal sebanyak 25 orang	Dinas Kesehatan
		019. Program Peningkatan Mutu Kesehatan	Terselenggaranya kegiatan BLUD	1 tahun	RSUD
		022. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Terpenuhinya obat & Pembekalan Kesehatan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan	1 tahun	RSUD



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			kebutuhan jumlah maupun jenisnya		
		023. Program Pengadaan, Peningkatan Saran & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terpenuhinya sarana pelayanan kesehatan	Rehab Rumah Sakit, Alkes, Aplikasi SIM	RSUD
		018. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya Kualitas Organisasi Perempuan	11 Kec	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
		019. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan gender dan perlindungan anak	2 lembaga	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
		015. Program Keluarga Berencana	Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera	81,18%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
		000. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri	Terselenggaranya jumlah keluarga prasejahtera dan KS 1	21,45%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
		020. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Berdirinya pusat informasi kesehatan reproduksi remaja	1 kelompok	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
		015. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	Terlaksananya pemberdayaan PMKS	100 kk	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
		016. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi keluarga korban bencana dan wanita lanjut usia	80 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		017. Program pembinaan anak terlantar	Mampunya anak terlantar melaksanakan fungsi sosialnya	40 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		018. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tersantuninya dan terbinanya penyandang cacat dan eks trauma	146 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		020. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terbinanya eks penyandang penyakit sosial	509 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		021. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	11 PSKS	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		015. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	80 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		017. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terwujudnya perlindungan dan pengawasan TK	286 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		015. Program Pengembangan Nilai Budaya	Terlestarikannya dan teraktualisaikan adat budaya daerah	1 budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		016. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terpelihara dan terlestarikannya Benda Cagar Budaya/Situs	23 BCB	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		017. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpelihara dan terlestarikannya Benda Cagar Budaya/Situs, Terlaksananya kegiatan festival seni daerah	4 festival seni daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		016. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terlaksananya Program peningkatan peran serta kepemudaan	3 Kegiatan untuk pelajar dan pemuda	Dinas Pendidikan
		018. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	15 Cabang Olahraga Unggulan	Dinas Pendidikan
		016. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terlaksananya penataan arsip dan dokumen daerah	1 tahun	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
		015. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Mendorong masyarakat meningkatkan minat, budaya dan kebiasaan 1 tahun membaca	1 tahun	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
		025. Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	terlaksananya 10 program pokok PKK	1 Kabupaten, 11 Kecamatan	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
4	Lingkungan Hidup yang Semakin Aman, Nyaman dan Lestari	015. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya kinerja pengelolaan persampahan	51,65%	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
		016. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	100%	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
		019. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Laporan Neraca SDA (1 buku) dan SLHD (2 buku)	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		024. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terlaksananya program ruang terbuka hijau (RTH)	RTH Publik = 28% RTH Private = 9%	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
				2 kecamatan	Bappeda
		015. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Antisipasi konflik	4 kasus	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
		016. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	156 kali	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
				Sosialisasi 22 kali tingkat kecamatan, rapat KOMINDA 4 kali, rapat FKDM 4 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		017. Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	Rapat FKUB 4 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		018. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya Pembangunan wawasan kebangsaan	talkshow 1 kali, penyuluhan PPBN 1 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		020. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terlaksananya kegiatan pemberantasan pekat di lingkungan Masyarakat	Razia 3 kali, penyuluhan 21 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		021. Program pendidikan politik masyarakat	Terfasilitasinya perselisihan, bantuan parpol termonitoringnya bantuan parpol dan pembinaan Ormas di Kab.	Fasiltasi 4 kali, verifikasi bantuan terhadap 15 parpol, pembinaan	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			HSS	terhadap Ormas 1 kali, penyuluhan masyarakat 11 kali	
		022. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosialisasi 11 kali, pelatihan 1 kali, rapat koordinasi 6 kali, simulasi dan lomba 2 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		031. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Terlaksananya tanggap darurat bencana	penyediaan logistik dan obat-obatan 2 paket, 2 kali kegiatan tanggap darurat	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		032. Program Pasca Bencana	Terlaksananya program pasca bencana	tersedianya data dampak bencana 1 dokumen, tersusunnya rencana rehabilitasi dan rekontruksi 1 dokumen, fasilitasi bantuan paska bencana 2 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Pada Bab ini secara eksplisit menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 disusun dengan mengacu Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya diatur dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2017 dikelompokkan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwajibkan melalui prestasi kerja dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan dan perundangan. Sedangkan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah



daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Program dan kegiatan yang ada pada Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan kumpulan program dan kegiatan yang berhubungan dengan kelancaran pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD. Proyeksi pagu indikatif berdasarkan rekapitulasi usulan Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2017 dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) sumber pembiayaan yakni APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

**a. APBN**

Rekapitulasi usulan Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2017 untuk sumber dana Dekon APBN, lebih lengkap ditampilkan pada Lampiran I.

**b. APBD Provinsi**

Rekapitulasi usulan Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2017 untuk sumber dana APBD Provinsi sebanyak 146 dan usulan tersebut tersebar pada 20 (dua puluh) di SKPD Provinsi, yang akan menjadi pembiayaan pembangunan bagi daerah untuk usulan-usulan yang dapat diakomodir oleh SKPD Provinsi, lebih lengkap ditampilkan pada lampiran II.

**c. APBD Kabupaten**

Pagu Indikatif dari Usulan Program dan Kegiatan yang Sumber dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 403.108.960.520,- yang tersebar pada 45 SKPD termasuk di dalamnya 11 Kecamatan dan 4 Kelurahan

Uraian lengkap pagu indikatif yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 5.1 halaman berikut ini :



**Tabel 5.1**  
**REKAPITUASI PAGU INDIKATIF ANGGARAN DANA PEMBANGUNAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 2017**

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Renja 2017	Program	Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	19.993.976.000	13	126
2	Dinas Kesehatan	35.115.000.000	17	402
3	RSUD Hasan Basry	69.075.000.000	4	16
4	Dinas Pekerjaan Umum	104.458.957.000	12	52
5	Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan	28.809.084.000	11	35
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.112.028.083	11	60
7	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	3.366.000.000	9	38
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.190.000.000	5	25
9	Badan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	3.311.000.000	10	41
10	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.237.484.000	12	49
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	5.299.999.400	12	45
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.567.108.000	8	27
13	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik	2.828.999.225	14	45
14	Satuan Polisi Pamong Praja	1.749.000.000	7	28
15	Sekretariat Daerah	12.971.039.000	5	20
16	Sekretariat Bagian Tata Pemerintahan	13.694.999.959	5	13
17	Sekretariat Daerah Bagian Hukum	720.641.000	1	7
18	Sekretariat Daerah Bagian Kesra	5.200.000.000	1	6
19	Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi dan Pembangunan	3.647.187.250	5	8
20	Sekretariat Daerah Bagian Humas	5.126.773.000	3	12
21	Sekretariat Daerah Bagian Umum	2.968.456.000	4	11
22	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	860.373.000	1	17
23	Sekretariat DPRD	14.204.499.000	5	29
24	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.999.563.000	6	50
25	Inspektorat Kabupaten	3.282.553.000	7	34



26	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	11.285.974.000	6	31
27	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	562.625.000	6	20
28	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan	3.095.000.000	8	31
29	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah	1.098.000.000	6	25
30	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura	7.793.360.000	6	33
31	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1.837.955.800	12	34
32	Dinas Pertambangan dan Energi	2.800.000.000	7	22
33	Dinas Perikanan dan Peternakan	5.269.349.803	9	38
34	Kantor Pengelola Pasar	1.244.000.000	5	21
35	Kec. Kandangan	586.724.000	4	24
	- Kel. Kandangan Kota	318.680.000	1	1
	- Kel. Kandangan Utara	213.080.000	1	1
	- Kel. Kandangan Barat	250.630.000	1	1
	- Kel. Jambu Hilir	322.680.000	1	1
36	Kec. Padang Batung	960.480.000	4	24
37	Kec. Loksado	919.934.000	5	26
38	Kec. Sungai Raya	510.128.000	4	21
39	Kec. Simpur	1.025.480.000	4	23
40	Kec. Kalumpang	686.970.000	5	25
41	Kec. Angkinang	698.220.000	5	31
42	Kec. Telaga Langsat	499.900.000	4	23
43	Kec. Daha Utara	885.000.000	4	24
44	Kec. Daha Selatan	742.696.000	4	24
45	Kec. Daha Barat	712.374.000	4	23
-	<b>Total</b>	403.108.960.520	304	1.723

Selanjutnya uraian lengkap Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran III RKPD ini.





## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini dikemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2017 sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Kab. HSS tahun 2014-2018 serta diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan berbagai masalah dan tantangan yang harus diatasi dan dihadapi. Dengan keterbatasan sumber daya dan mengacu pada prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, maka prioritas-prioritas pembangunan tahun 2017 adalah prioritas yang terfokus sebagai upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2014- 2018 telah dijabarkan rencana pembangunan lima tahun sesuai masa bakti kepala daerah terpilih yaitu 2014-2018 dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam dokumen RPJMD terkandung berbagai tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah yang disusun atas dasar visi dan misi kepala daerah sebagai bentuk pendekatan politis dari kepala daerah pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, yang seiring tahun berjalan dilakukan penyempurnaan dengan perubahan sasaran dan indikator sasaran pembangunan tanpa mengubah esensi yang terdahulu yang dilakukan melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hubungan tersebut disajikan sebagaimana tabel berikut :



**Tabel 4.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan**

VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Visi : Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif (SEHATI)			
Meningkatkan Kehidupan Beragama	Mewujudkan Nilai-Nilai Agamis sebagai sumber dalam kehidupan sehari-hari	Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama	Tidak terjadi konflik antar umat beragama
		Mewujudkan tatanan sosial keagamaan	Persentase kelulusan Khatam Al-quran
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani	Opini Audit Eksternal
			Predikat akuntabilitas kinerja
Meningkatnya pelayanan publik yang prima		Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	
		Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	
		Prosentase penduduk yang memiliki KTP	
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	
Meningkatkan dan Mengembangkan potensi daerah	Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan	Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama proses perijinan
			Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)
			APK PAUD
			APK SD/MI
			APK SMP/MTs
			APK SMA/SMK
			Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI
			Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts
			Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK
			Persentase Angka Kelulusan (AL) SMK
			Angka Partisipasi Murni SD/MI
			Angka Partisipasi Murni SMP/MTs



		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK
		Persentase lulusan yang diserap dunia kerja
	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
		Tidak terjadi konflik sosial
		Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)
	Meningkatnya fasilitasi sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV
		Persentase Guru SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1/D IV
		Persentase Guru SMA/SMK memenuhi kualifikasi S1/D IV
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase penurunan angka kematian ibu melahirkan
		Persentase angka kematian bayi
		Persentase penurunan kematian neonatal
		Persentase penurunan balita gizi kurang
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin



		Persentase penurunan angka kesakitan akibat demam berdarah dengue
		Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB
		Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas
		Persentase puskesmas dengan score $\geq 80$
		Persentase penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan (Kartu Hulu Sungai Selatan Sehat)
		Persentase desa dengan kategori siaga aktif pertama
		Persentase KK yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan
		Persentase KK menggunakan jamban sehat
Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil dan pariwisata	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan
	Menjadikan kota kandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olahraga	Persentase pelestarian budaya lokal
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan
		Persentase fasilitas dan prasarana semua cabang olahraga yang berstandar nasional
	Menurunnya persentase kemiskinan	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan
	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase desa yang telah tersedia sarana pendamping desa sejahtera
		Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
		Persentase desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan



		Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (daerah)
		Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah bebas oksigen	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB
			a. RTH Publik
			b. RTH Privat
			Jumlah hari dalam setahun dengan kualitas udara baik
		Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak yatim/piatu dan penyandang cacat	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu	Meningkatkan struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	Pertumbuhan PDRB (Laju pertumbuhan ekonomi)
		Meningkatnya pendapatan perkapita	PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000)
		Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase peningkatan produksi padi pertahun
	Persentase peningkatan produksi karet		
	Persentase peningkatan produksi kayu manis		
	Menciptakan tenaga kerja produktif yang mampu diserap dunia kerja	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	Pencari kerja yang ditempatkan
			Penurunan tingkat pengangguran terbuka
			Tingkat partisipasi angkatan kerja
		Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase peningkatan koperasi aktif
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		
	Meningkatnya pembinaan untuk 5000 pengusaha kecil produktif	Pembinaan UMKM	
	Meningkatnya pendapata, sumber keuangan daerah	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD



	dan perekonomian masyarakat	Lainnya	Persentase retribusi pasar terhadap PAD	
Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan informatika	Meningkatkan ketersediaan daya dukung sarana dan prasarana wilayah	Meningkatkan infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	Persentase kinerja sistem irigasi	
			Persentase penanganan daya rusak air	
		Meningkatkan jangkauan penggunaan teknologi informasi	Persentase kecamatan yang telah mendapat fasilitas internet gratis	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	Persentase jalan dalam kondisi baik	
			Peningkatan persentase konektivitas wilayah	
		Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	
			Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	
			Persentase kawasan yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	
		Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Meningkatnya Sumberdaya hayati dan sumber daya alam yang terkelola memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan
				Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan
Persentase penurunan kasus ilegal logging				
			Persentase penurunan kebakaran hutan/titik api	

## 4.2 Prioritas dan Pembangunan

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Tahun 2017

Prioritas Pembangunan tahun 2017 pada dasarnya adalah prioritas pembangunan yang diambil dari prioritas tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab.



HSS dan prioritas tahun ke 3 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. HSS Tahun 2005-2025.

Sebagaimana tema pembangunan tahun 2017 yang diangkat yaitu **Akurasi Sasaran Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Perencanaan Yang Efektif.**

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017 dalam Dokumen RPJMD 2014-2018 diamanahkan arah kebijakan yang diambil tetap mengacu pada arah kebijakan tahun sebelumnya, namun lebih tertuju pada upaya peningkatan hasil yang diperoleh pada tahun 2015. Prioritas Pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Perbaikan pada tata kelola pemerintahan
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- c. Peningkatan Produktivitas Daerah
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Prioritas tersebut ditetapkan dalam rangka upaya mencapai target-target sasaran dari visi dan misi Bupati Kab. HSS pada tahun perencanaan 2017, rincian sasaran dan target indikatornya seperti pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Sasaran dan Indikator Pembangunan**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	Target 2017
1	Kehidupan yang kondusif bagi umat beragama	Tidak terjadi konflik antar umat beragama	Terjadi (1 kejadian)	Tidak terjadi
2	Mewujudkan tatanan sosial keagamaan	Persentase kelulusan Khatam Al-quran	100%	0
3	Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta melayani	Opini Audit Eksternal	WDP	WTP
		Predikat akuntabilitas kinerja	CC	A
		Peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah	31% gaji pokok	ada peningkatan
4	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	76	80
		Prosentase penduduk yang memiliki KTP	92,86%	100%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	33,21%	90%



		Rata-rata lama proses perijinan	≥ 2 hari	2 hari
5	Meningkatkan jangkauan dan kualitas pendidikan	Persentase penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,47%	100%
		APK PAUD	47,61%	70,80%
		APK SD/MI	107,87%	100%
		APK SMP/MTs	91,45%	97,49%
		APK SMA/SMK	59,78%	79,72%
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	98,20%	100%
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK	100%	100%
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SMK	99,51%	100%
		Angka Partisipasi Murni SD/MI	94,60%	98,91%
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	69,21%	78,78%
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	43,96%	65,54%
		Persentase lulusan yang diserap dunia kerja	50,00%	65%
		APK PAUD	47,61%	70,80%
6	Meningkatnya kesadaran hukum dan ketaatan terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	48,6% (1:296 RT)	100% (609 RT)
		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%
		Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	33,33% (1kali patroli dlm sehari)	100%
		Tidak terjadi konflik sosial	5 kejadian	Tidak terjadi
		Forum komunikasi pembauran antar umat beragama dan organisasi masyarakat yang aktif	40 ormas	40 ormas
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik (pemilu)	68,89%	79%
7	Meningkatnya fasilitasi sumber daya tenaga kependidikan di Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	36	100%
		Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D IV	853 / 47%	89,4%
		Persentase Guru SMP/MTs memenuhi kualifikasi S1/D IV	392 / 78%	95,60%
		Persentase Guru SMA/SMK memenuhi kualifikasi S1/D IV	371 /91,98%	98,40%
8	Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase penurunan angka kematian ibu melahirkan	262	40%
		Persentase angka kematian bayi	11,8	
		Persentase penurunan kematian	39	25%



		neonatal		
		Persentase penurunan balita gizi kurang	11,18%	25%
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	89,10%	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	4,30%	100%
		Persentase penurunan angka kesakitan akibat demam berdarah dengue	0,096	80%
		Persentase penurunan desa/kelurahan yang mengalami KLB	11	1%
		Cakupan kunjungan dan layanan pasien di puskesmas	100%	100%
		Persentase puskesmas dengan score $\geq 80$	0	95%
		Persentase penduduk HSS yang memiliki jaminan kesehatan (Kartu Hulu Sungai Selatan Sehat)	100%	100%
		Persentase desa dengan kategori siaga aktif pertama	50%	45%
		Persentase KK yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas dan memenuhi syarat kesehatan	71,35%	80%
		Persentase KK menggunakan jamban sehat	55%	73%
9	Meningkatnya nilai tambah produk hasil pertanian	Persentase peningkatan angka konsumsi ikan	0,70%	0,92%
10	Menjadikan kotaandangan dan sekitarnya menjadi kota seni dan olahraga	Persentase pelestarian budaya lokal	70%	78%
		Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	41.240 wisatawan	12,5%
		Persentase fasilitas dan prasarana semua cabang olahraga yang berstandar nasional	10 buah	46%
11	Menurunnya persentase kemiskinan	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	66,7%	4,810%
12	Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masy dalam pembangunan	Persentase desa yang telah tersedia sarjana pendamping desa sejahtera	0%	660%
		Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	45%	65%
		Persentase desa yang terlayani lembaga ekonomi perdesaan	57%	68%
13	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Persentase ketersediaan pangan utama (daerah)	11.250 ton /307,82%	311,82%
14	Mewujudkan Hulu Sungai Selatan sebagai daerah bebas oksigen	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB		
		a. RTH Publik	25%	29%
		b. RTH Privat	(5.5.185Ha)	
		c. RTH Privat	5%	10%
		d. RTH Privat	(2.593Ha)	
		Jumlah hari dalam setahun dengan kualitas udara baik	0	75%
15	Terjaminnya kehidupan yang layak bagi lansia, anak	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	19,34% (1.536 orang)	50% (4025 orang)



	yatim/piatu dan penyandang cacat			
16	Meningkatkan struktur ekonomi yang kuat dengan tingkat pertumbuhan berkualitas dan merata	Pertumbuhan PDRB (Laju pertumbuhan ekonomi)	5,60%	6,46%
17	Meningkatnya pendapatan perkapita	PDRB perkapita (harga konstan) ribuan rupiah (000)	10.196	6.608
18	Meningkatnya Produksi Hasil Pertanian	Persentase peningkatan produksi padi pertahun	188.674 ton	11,62% 267.119 ton
		Persentase peningkatan produksi karet	7.206,9 ton	10,1% (728,17 ton)
		Persentase peningkatan produksi kayu manis	1436,53 ton	6,03% (86,65 ton)
19	Meningkatnya kualitas angkatan kerja usia produktif	Pencari kerja yang ditempatkan	4,74%	38,42%
		Penurunan tingkat pengangguran terbuka	4,22%	3,15%
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	68,82%	65,62%
20	Berkembangnya peran usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase peningkatan koperasi aktif	70 (105 koperasi aktif)	(138 KA)
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	12,04%	14,250%
21	Meningkatnya pembinaan untuk 5000 pengusaha kecil produktif	Pembinaan UMKM	88,91% ( 40.096 UMKM yang terbina)	0 (45.096 UMKM yang terbina)
22	Peningkatan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	13,41%	27,86%
		Persentase retribusi pasar terhadap PAD	3%	3%
23	Maningkatkan infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian , perikanan, peternakan dan perkebunan	Persentase kinerja sistem irigasi	48,08%	80%
		Persentase penanganan daya rusak air	30%	30%
24	Meningkatkan jangkauan penggunaan teknologi informasi	Persentase kecamatan yang telah mendapat fasilitas internet gratis	18,18% (3 titik wifi di 2 kec)	100% 4 titik
25	Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur perhubungan	Persentase jalan dalam kondisi baik	60,00%	74%
		Peningkatan persentase konektivitas wilayah	90%	100%
26	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	34,33%	71,97%
		Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	34,33%	61,5%
		Persentase kawasan yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	33,60%	50%
		Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	57,59%	20%
27	Meningkatnya Sumberdaya hayati dan sumber daya alam yang dikelola memperhatikan kaidah kelestarian, ramah lingkungan serta kearifan lokal	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	(504,53 Ha)	2,56% (350 Ha)
		Persentase penurunan kasus ilegal logging	12 kasus	16,67% (2 kasus)
		Persentase penurunan kebakaran hutan/titik api	44 titik api	11,36% (16 titik api)



#### **4.2.3 Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. HSS Tahun 2017**

Penyusunan RKPD Tahun 2017 tidak hanya mengacu pada RPJMD tetapi juga mengacu pada RKP dan RKPD Prov. Kalsel tahun 2017, prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Prov. Kalsel harus diperhatikan dan di jabarkan dengan prioritas pemerintah Kab. HSS

##### **1. Prioritas Pembangunan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang diteapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sebagaimana diketahui bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Kab. HSS Tahun 2017. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 atau arah pembangunan nasional disusun berdasarkan Nawacita yang terdiri atas :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;



8. Melakukan revolusi mental; dan
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

### **1.1 Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017**

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2017 (RPJMN 2015-2019) : “MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH”, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1% dengan sasaran wilayah Kalimantan sebesar 6,1%;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,5%-8,5% dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Kalimantan sebesar 5,4%;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 5,2%-5,5% dengan sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Kalimantan sebesar 4,2%; dan
4. Laju inflasi sebesar 4,0.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3(tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut :

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari :
  - a). revolusi mental;
  - b). pembangunan pendidikan;
  - c). pembangunan kesehatan; dan
  - d). Pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari :
  - a). kedaulatan pangan;
  - b). kedaulatan energi dan ketenagalistrikan;
  - c). Kemaritiman dan kelautan;
  - d). Pariwisata;
  - e) Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari :
  - a). pemerataan
  - b). Perbatasan negara dan daerah tertinggal;
  - c). Pembangunan perdesaan dan perkotaan;
  - d). Pengembangan konektivitas nasional.



## 1.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

### 1. Bidang Pendidikan.

- a. Pendidikan menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- b. Pendidikan Khusus; merupakan Warga Negara Indonesia usia 4 s.d 18 tahun yang berkebutuhan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

### 2. Bidang Kesehatan.

- a. Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
- b. Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
- c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- d. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- e. Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
- f. Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
- g. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
- h. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- i. Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- j. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
- k. Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna nazpa



dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

1. Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar.
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - a. Setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih.
  - b. Setiap warga negara berhak memperoleh akses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Penyediaan tempat tinggal korban bencana; setiap korban bencana berhak memperoleh tempat tinggal sesuai dengan standar tempat tinggal.
5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
  - a. Setiap warga negara yang menjadi korban yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar.
  - b. Setiap warga negara yang menjadi korban dan berdampak kebakaran memerlukan pertolongan.
  - c. Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar.
  - d. Setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan).
  - e. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan trantibum.
  - f. Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas.
6. Bidang Sosial
  - a. Pemberdayaan sosial terhadap warga komunitas adat terpencil (KAT); setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
  - b. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga; setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.



- c. Rehabilitasi sosial lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- d. Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga.
- e. Rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikologi sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

**Tabel 4.3**  
**Program Prioritas Daerah**  
**Yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2017**



No	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang	12	87	8.945.014.100	2.22%
2	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	37	499	140.738.557.350	34.91%
3	Pembangunan Ekonomi	30	113	21.695.263.850	5.38%
4	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	6	19	5.713.237.500	1.42%
5	Pembangunan Politik	5	16	12.067.384.200	2.99%
6	Pembangunan Pertahanan dan Keamanan	7	22	2.444.294.000	0.61%
7	Hukum dan Aparatur	14	824	109.851.722.737	27.25%
8	Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang	9	71	11.770.025.633	2.92%



No	Prioritas Nasional	Program	Kegiatan	Rp	%
9	Penyediaan Sarana dan Prasarana	14	49	75.849.308.800	18.82%
10	Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	11	23	14.034.152.350	3.48%
-	TOTAL	145	1.723	403.108.960.520	

## 2. Prioritas Pembangunan Kalimantan Selatan

### 2.1 Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Pembangunan Kalimantan Selatan pada RKPDP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017, merupakan tahapan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 yang disusun dan ditetapkan setelah Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2015 berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 “

“MEMBANGUN DAYA SAING DAERAH MENUJU KALSEL MANDIRI, TERDEPAN DAN BERKELANJUTAN.”

### 2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil proses politik yang dilaksanakan melalui Pemilukada tahun 2015, visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera,  
Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing**

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung Kalimantan Selatan yang mapan (Mandiri dan Terdepan) terdapat empat elemen utama pembangunan yaitu aspek kesejahteraan, aspek keadilan, aspek mandiri dan aspek berdaya saing.

RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 memuat 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi.

**Tabel 4.4**  
**Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**  
**Provinsi Kalimantan Selatan**

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat dan terampil	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
			Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja
2	Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal,	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
			Menurunnya jumlah masyarakat miskin



	dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Meningkatnya daya saing perekonomian	Meningkatnya nilai tambah produk daerah dan investasi dalam aktivitas perekonomian Meningkatnya kontribusi sektor pertanian
		Mewujudkan lingkungan hidup yang sehat dan asri	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan
3	Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya	Meningkatkan pemertaan pembangunan seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang	Terwujudnya pembangunan dan sarana prasarana penunjang kehidupan dasar secara merata dan kontinyu
4	Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal	Meningkatkan kualitas kehidupan berbudaya lokal	Meningkatnya penyelenggaraan festival budaya
5	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis, bersih dan bebas KKN Meningkatnya kualitas layanan publik

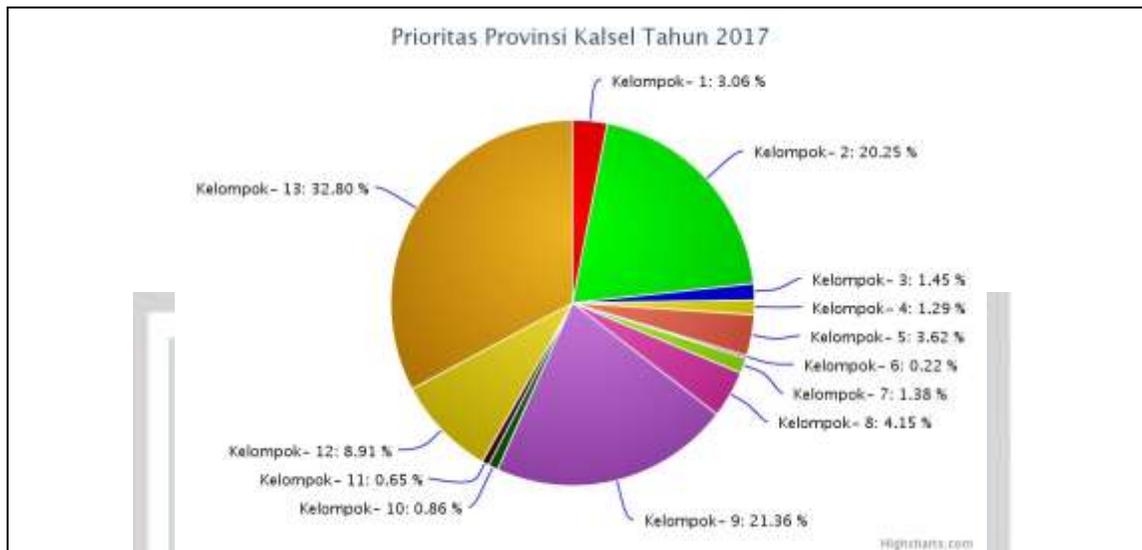
### 2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Sesuai dengan kerangka prioritas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, terdapat 13 prioritas pembangunan pada tahun 2017 yang terdiri atas :

1. Menuju Kalsel Cerdas
2. Menuju Kalsel Sehat
3. Menuju Kalsel Terampil
4. Menuju Kalsel Beriman
5. Menuju Kalsel Sentra Pangan
6. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
7. Kalsel Menuju Daerah Industri Perdagangan dan Jasa
8. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas
9. Menuju Kalsel dengan Infrstruktur Berkualitas
10. Menuju Kalsel Berbudaya
11. Menuju Kalsel Aman
12. Kalsel menuju Tuan Rumah PON
13. Menuju Kalsel dengan Pemerintah Daerah Berkinerja Baik



**Tabel 4.5**  
**Program Prioritas Daerah**  
**Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi Tahun 2017**



No	Prioritas Provinsi Kalsel	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Menuju Kalsel Cerdas	5	88	12.345.452.700	3.06%
2	Menuju Kalsel Sehat	15	361	81.623.238.800	20.25%
3	Menuju Kalsel Terampil	13	42	5.845.680.850	1.45%
4	Menuju Kalsel Beriman	0	0	0	0.00%
5	Menuju Kalsel Sentra Pangan	13	63	14.605.355.000	3.62%
6	Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional	3	5	889.316.500	0.22%
7	Kalsel Menuju Daerah Industri Perdagangan dan Jasa	13	41	5.556.466.600	1.38%
8	Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas	7	19	16.737.211.300	4.15%
9	Menuju Kalsel dengan Infrastruktur Yang Berkualitas	23	74	86.085.704.500	21.36%
10	Menuju Kalsel Berbudaya	8	22	3.472.980.350	0.86%
11	Menuju Kalsel Aman	10	30	2.609.623.500	0.65%
12	Kalsel Menuju Tuan Rumah PON	1	1	35.935.000.000	8.91%
13	Menuju Kalsel dengan Pemda Berkinerja Baik	34	977	137.402.930.420	34.09%
-	TOTAL	145	1.723	403.108.960.520	

**a. Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017**

Dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan prioritas pembangunan Provinsi Kalsel yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalsel Tahun 2017, serta



berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Tahun 2015, maka ditetapkan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan

Melaksanakan berbagai urusan wajib dan urusan pilihan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, perbaikan kinerja pemerintah dengan melakukan peningkatan terhadap kompetensi aparatur, pembinaan kelembagaan pemerintah, peningkatan kinerja untuk menggali sumber pendapatan daerah dan memelihara kerukunan hidup dalam suasana keagamaan.

2. Produktifitas

Melakukan pengembangan potensi lahan, meningkatkan inovasi masyarakat dalam sector pertanian dan industry pengolahan khususnya produk andalan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan pembinaan terhadap lembaga ekonomi yang ada di kecamatan maupun pedesaan.

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Melakukan perbaikan terhadap mutu dan layanan pendidikan dan kesehatan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan baik secara social maupun ekonomi, meningkatkan peran perempuan, perlindungan dan pembinaan anak terlantar, membina penyandang masalah social dalam upaya menumbuhkan kemandirian.

4. Lingkungan Hidup

Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem, pengendalian bencana alam serta perbaikan/rehabilitasi terhadap dampak pembangunan yang berpengaruh terhadap lingkungan.

Berdasarkan dengan 4 (empat) prioritas pembangunan tersebut diatas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 diatas masih tidak berbeda terlalu jauh dari prioritas pembangunan tahun sebelumnya, maka dapat diperjelas lagi kebijakan dan sasarannya sasarannya dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :



a. Pemerintahan

1. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam rangka upaya Perbaikan tata kelola pemerintahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka pembangunan diarahkan pada :

- a. Peningkatan kompetensi aparatur.
- b. Meningkatkan fungsi pemerintahan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- c. Meningkatnya keterlibatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
- d. Peningkatan dan Sumber Pendapatan Daerah.
- e. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis
- f. Meningkatkan layanan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah Terciptanya reformasi birokrasi, dapat diperinci lagi terdiri dari :

- a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah
- b. meningkatnya kualitas fungsi pemerintahan dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan.
- c. meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
- d. meningkatnya kualitas institusi pemberi layanan langsung dan layanan dasar kepada masyarakat
- e. meningkatnya kualitas aparat pemberi layanan
- f. terlaksananya sinergi pemerintah dengan masyarakat dan swasta pada proses pembangunan
- g. meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- h. terselenggaranya sosialisasi produk hukum daerah dan aturan perundang-undangan yang berlaku
- i. Meningkatnya penggalan terhadap sumber-sumber penerimaan keuangan daerah
- j. kondusifnya kehidupan masyarakat yang agamis
- k. Meningkatnya layanan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan

b. Produktivitas

1. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan produktivitas di Kab. HSS adalah



- a. Mendorong peran sektor industri, sektor perdagangan, serta sektor jasa swasta
  - b. Mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dengan penyediaan pasar baik di daerah maupun luar daerah
  - c. Mendorong Kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat tani/nelayan
  - d. Pengembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas lokal
  - e. Mendorong investasi dan permodalan
  - f. Meningkatkan produktivitas pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan ketahanan pangan
  - g. Menciptakan peluang usaha dan revitalisasi terhadap unit-unit usaha strategis yang dapat menyerap tenaga kerja
  - h. Melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, manajerial usaha dan pemasaran produk
  - i. Mengupayakan SDM kalangan muda sebagai tenaga kerja potensial/siap kerja
  - j. Meningkatkan pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur lainnya.
  - k. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana permukiman, kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya
  - l. Pengembangan wilayah Kota Kandangan
2. Sasaran
- Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produktifitas, dapat diperinci lagi terdiri dari:
- a. Meningkatnya perekonomian daerah dan kesejahteraan Masyarakat
  - b. Meningkatnya peran sektor industri, sektor perdagangan, serta sektor jasa swasta
  - c. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi pedesaan yang terintegrasi dengan penyediaan pasar baik di daerah maupun luar daerah
  - d. Meningkatnya Kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat tani/nelayan
  - e. Meningkatnya perkembangan kawasan agroindustri berbasis komoditas lokal
  - f. Meningkatnya investasi dan permodalan
  - g. Meningkatnya produktivitas pertanian secara intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan ketahanan pangan
  - h. Meningkatnya peluang usaha dan revitalisasi terhadap unit-unit usaha strategis yang dapat menyerap tenaga kerja



- i. Meningkatnya pelaksanaan berbagai kegiatan pelatihan ketenagakerjaan, manajerial usaha dan pemasaran produk
  - j. Meningkatnya SDM kalangan muda sebagai tenaga kerja potensial/siap kerja
  - k. Meningkatnya pemenuhan penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur kewilayahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan infrastruktur lainnya.
  - l. Meningkatnya pengembangan sarana prasarana permukiman, kependudukan, air bersih dan penunjang lainnya
  - m. Meningkatnya Pengembangan wilayah Kota Kandungan
- c. Pembangunan Sumber Daya Manusia
1. Arah Kebijakan  
Kebijakan yang ditempuh adalah :
    - a) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidik serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil
    - b) Menyediakan sarana pendidikan yang lebih bermutu dan memadai
    - c) Menyediakan pendidikan gratis untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMU/ sederajat berasal dari keluarga kurang mampu.
    - d) Menyediakan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu yang berasal dari daerah
    - e) Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan kesehatan
    - f) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
    - g) Meningkatkan sistem jaminan kesehatan dan pengobatan gratis di RSUD H.Hasan Basry
    - h) Menjadikan RSUD H.Hasan Basry sebagai rumah sakit rujukan Banua Enam
    - i) Meningkatkan transparansi dalam pelayanan di RSUD H.Hasan Basry
    - j) Meningkatkan Puskesmas di semua kecamatan untuk melayani rawat inap dengan skala prioritas.
    - k) Meningkatkan perkembangan sektor sektor ekonomi produktif daerah
    - l) Meningkatkan implementasi rencana aksi daerah dalam menanggulangi kemiskinan.
    - m) Meningkatkan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial
    - n) Melakukan penanganan dan penanggulangan bencana



- o) Meningkatkan peran pemuda dan mengembangkan keolahragaan dalam pembangunan
- p) Melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya daerah
- q) Mendorong peran perempuan
- r) Melaksanakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera

## 2. Sasaran

Adapun Sasaran yang ingin dicapai pada prioritas peningkatan adalah Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, dapat diperinci lagi terdiri dari :

- a) Meningkatnya kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidik serta meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidik yang bertugas di wilayah terpencil
- b) Tersedianya sarana pendidikan yang lebih bermutu dan memadai
- c) Terselenggaranya pendidikan gratis untuk SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMU/ sederajat berasal dari keluarga kurang mampu.
- d) Tersedianya beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu yang berasal dari daerah
- e) Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan
- f) Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
- g) Tersedianya sistem jaminan kesehatan dan pengobatan gratis di RSUD H.Hasan Basry
- h) Meningkatkan status RSUD H.Hasan Basry menjadi rumah sakit rujukan Banua Enam
- i) Meningkatnya transparansi dalam pelayanan di RSUD H.Hasan Basry
- j) Meningkatnya status Puskesmas di semua kecamatan untuk melayani rawat inap dengan skala prioritas.
- k) Meningkatnya perkembangan sektor ekonomi produktif daerah
- l) Terlaksananya implementasi rencana aksi daerah dalam menanggulangi kemiskinan.
- m) Meningkatkan ketahanan sosial dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial
- n) Terselenggaranya penanganan dan penanggulangan bencana
- o) Meningkatnya peran pemuda dan mengembangkan keolahragaan dalam pembangunan



- p) Terlaksananya pelestarian dan perkembangan seni dan budaya daerah
- q) Meningkatnya peran perempuan
- r) Terlaksananya program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

d. Lingkungan Hidup

1. Arah Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh yaitu :

- a. mendorong kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan
- b. Mewujudkan penataan ruang yang sesuai dan mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomian
- c. Mendorong pengembangan dan konservasi sumberdaya air untuk mengoptimalkan perlindungan dan pemanfaatan lahan

2. Sasaran

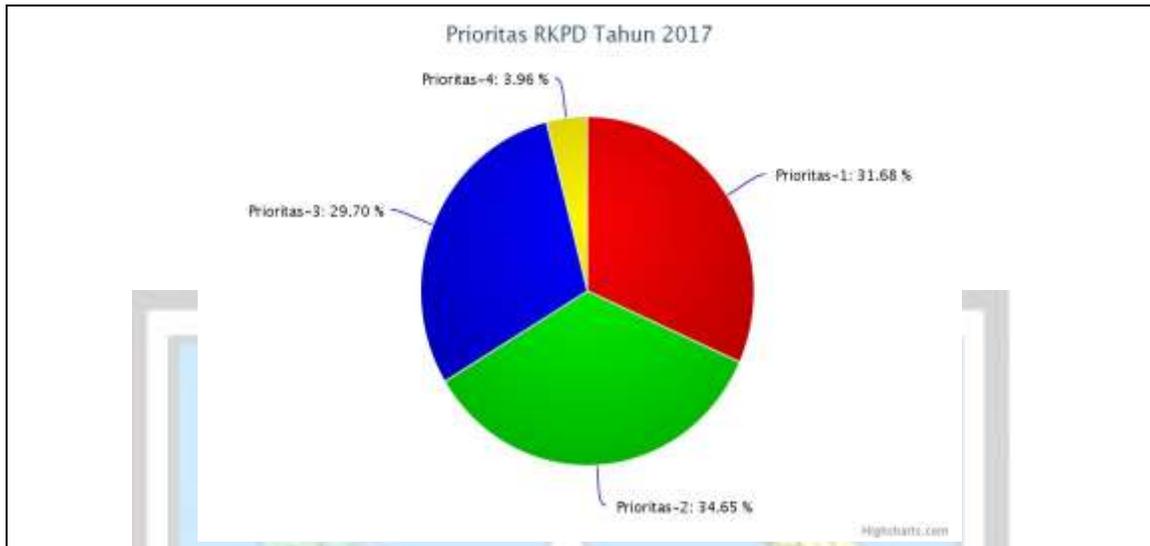
Adapun Sasaran yang ingin dicapai pada prioritas ini adalah Lingkungan Hidup yang Semakin Aman, Nyaman dan Lestari, dapat diperinci lagi terdiri dari :

- a). Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan
- b). Meningkatnya kesesuaian penataan ruang
- c). Meningkatnya perlindungan sumberdaya air dan lahan

Sesuai dengan kerangka prioritas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2018, maka skala prioritas pembangunan pada tahun 2017 yang terdiri atas :



**Tabel 4.6**  
**Program Prioritas Daerah**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017**



No	Prioritas RKPD	Program	Kegiatan	Rp	%
1	Pemerintahan	22	904	128.733.396.187	32%
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia	45	523	139.467.530.300	35%
3	Produktifitas	63	253	119.076.199.233	30%
4	Lingkungan Hidup	15	43	15.831.834.800	4%
-	TOTAL	145	1.723	403.108.960.520	

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program dan kegiatan prioritas terkait, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Program Prioritas Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017**

No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	Terciptanya Reformasi Birokrasi	001. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran yang prima	1 tahun	Semua SKPD
		002. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Semua SKPD
		003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Disiplin Aparatur	100%	Beberapa SKPD
		005. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	Semua SKPD,
			Meningkatnya	465 orang	BKD, Diklat



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			kualitas sumber daya aparatur melalui diklat		
		006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian Laporan Kinerja dan keuangan Tepat Waktu	100%	Semua SKPD
		013. Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui E-Procurement	100%	Sekretariat Daerah – Bagian Umum
		015. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase indeks kepuasan DPRD & persentase kesesuaian pelaksanaan standar operasional prosedur	100%	Sekretariat DPRD
		016. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati Daerah	1 Tahun	Setda
		017. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pertumbuhan PAD terhadap APBD	27,860%	DPPKAD
		019. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Pelaksanaan pembinaan Kebijakan Pengelolaan ADD di Kab. HSS	144 Desa	Bag. Tapem
			Penerbitan Peraturan Desa (Lembaran Desa)	288 buah	
		020. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	jumlah Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	120 temuan	Inspektorat
		021. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	jumlah bimtek untuk peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	5 Bimbingan Teknis	Inspektorat
		022. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Standart Operasional Pemeriksaan	1 SOP	Inspektorat Kabupaten



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		023. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersusunnya sistem informasi pelayanan publik	1 Tahun	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
		024. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Tertanganinya Setiap pengaduan yang disampaikan Masyarakat	2 Kelompok pengaduan	Inspektorat Kabupaten
		026. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase kerjasama Penyelesaian Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan	100%	Bag. Hukum
		036. Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase meningkatnya pembinaan dan pendayagunaan aparatur berbasis kompetensi	25%	BKD dan Diklat
		029. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	Sekretariat Daerah
		043. Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organisasi Kecamatan	Meningkatkan Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum/Kamtibmas/Organisasi Kecamatan /Organisasi Kecamatan	100%	Kecamatan dan Kelurahan
		044. Program Peningkatan Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	Meningkatnya Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan Masyarakat	1 Tahun	Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat
		045. Program Reorganisasi dan Revitalisasi Lembaga Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	10 SKPD	Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi
		015. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penataan administrasi kependudukan	100%	Disdukcapil
2	Meningkatnya Produktifitas	015. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jembatan dalam kondisi baik	77,80%	Dinas PU
			Persentase Jalan dalam kondisi baik	62%	



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		016. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase jaringan drainase wilayah perkotaan	80%	Dinas LH Takodes
		018. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	62%	Dinas PU
			Persentase Jembatan dalam kondisi baik	77,80%	
		024. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	61,80%	Dinas PU
		000. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase pengembangan pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	37,33%	Dinas PU
			Persentase pengembangan pengembangan kinerja pengelolaan air minum	47,30	
		028. Program pengendalian banjir	Pengendalian banjir dalam antisipasi daya rusak air	300 Meter	Dinas PU
		030. Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Penyediaan sarana infrastruktur yang memadai	Jalan agropolitan 12 ruas	Dinas PU
		015. Program Pengembangan Perumahan	Persentase pengembangan perumahan yg melibatkan peran pemerintah	96,86%	Dinas PU
		000. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	100%	Dinas PU
		020. Program pengelolaan areal pemakaman	Meningkatnya fasilitas sosial untuk masyarakat	1 TPU	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		015. Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang wilayah	100%	Bappeda



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		015. Program Pengembangan data/informasi	Meningkatnya kualitas data/informasi dan pengendalian capaian hasil pembangunan daerah	100%	Bappeda
		016. Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan	100%	Bappeda
		018. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Persentase jalan lingkungan dan gang dengan kondisi baik	80%	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
		019. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	Meningkatnya keterpaduan perencanaan Pengemb. Kota-Kota Menengah & Besar	100%	Bappeda
		021. Program perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas kualitas perencanaan pembangunan daerah	95%	Bappeda
		022. Program perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatnya keterpaduan perencanaan prog bidang ekonomi	100%	Bappeda
		023. Program perencanaan sosial budaya	Meningkatnya keterpaduan perencanaan sosial budaya	100%	Bappeda
		000. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reasarana dan dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	100%	Dishubkomin fo
		017. Program peningkatan pelayanan angkutan	meningkatnya pelayanan angkutan yang baik dan lancar	3 buah	Dishubkomin fo
		000. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Meningkatnya pengendalian lalu lintas yang tertib, aman dan terkendali	100%	Dishubkomin fo
		016. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Peningkatan pertumbuhan wirausaha dan kecakapan hidup pemuda/masyarakat Pelaku UMKM	300 orang	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		018. Program Peningkatan Kualitas	Jumlah Koperasi Aktif	138 buah	Dinas Perindustria



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Kelembagaan Koperasi			n, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		015. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Peningkatan Nilai Investasi	5%	Sekretaris daerah - Bagian Ekobang
		000. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Desa Yang Telah Tersedia Sarjana Pendamping Desa Sejahtera	80%	Sekretariat Daerah Bag. Ekonomi & Pemb.
		000. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	Persentase Jenis Hasil Pertanian Berbasis AgroBisnis	38%	Sekretariat Daerah Bag. Ekonomi & Pemb.
		015. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan	100%	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
			Persentase ketersediaan pangan utama (beras)	311%	
			Persentase ketersediaan energi dan protein per kapita	80%	
			Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	90%	
			Persentase skor pola pangan harapan (PPH)	79,72%	
		017. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa	66%	Badan Keluarga Berencana, PMP
		018. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	148 Desa	Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan
		015. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya pemenuhan Fasilitas Jaringan Komunikasi yang memadai untuk mendukung penyebaran informasi.	1 Tahun	Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		000. Program kerjasama informasi dengan mas media	Meningkatnya hubungan kerjasama yang baik antara Pemkab dengan Media Massa untuk menyebarluaskan program dan kebijakan Pemkab HSS	4 media massa	Sekretariat Daerah - Bagian Hubungan Masyarakat
		000. Program kerjasama informasi dengan mass media	Penyebarluasan informasi dan pelayanan internet gratis di Kecamatan	4 titik	Dishubkomin fo
		000. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Pengembangan karya tulis pemuda HSS di internet	50 karya tulis pemuda secara online	Dishubkomin fo
		017. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya pengetahuan pelajar dan guru di bidang kominfo	330 peserta	Dishubkomin fo
		015. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase meningkatnya kelas BPK menjadi kelas utama/madya	80,80%	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		016. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Persentase meningkatnya kelas BPK menjadi kelas utama/madya	80,80%	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		017. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase meningkatnya kelas kelompok tani menjadi kelompok tani madya/utama	90%	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		019. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Persentase meningkatnya kelas BPK menjadi kelas utama/madya	80,80%	Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		020. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Meningkatnya kesehatan hewan dan ternak dengan menurunnya kematian ternak(S/C)	S/C = 1,50	Dinas Perikanan dan Peternakan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		021. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi daging (ton)	1612.39	Dinas Perikanan dan Peternakan
		015. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terkendalinya pemanfaatan hasil hutan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Survey potensi HHBK dan penanganan pasca panen	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		016. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan dan pemanfaatan lahan marginal dalam dan luar kawasan hutan	175 Ha	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		017. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya perlindungan dan pengamanan terhadap hutan dan kebun lingkup Kab. HSS	24 kali setahun	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		015. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Terselenggaranya pertambangan yang aman, tertib dan Produktif serta selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan	17 IUP mineral bukan logam dan batuan, 3 IUP Batubara, 1 IUP mineral logam, 1 PKP2B	Dinas Pertambangan dan Energi
		017. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terdapat dan Terpenuhi kebutuhan Listrik Masyarakat yang belum terjangkau PLN	50 PLTS dan 55 genset	Dinas Pertambangan dan Energi
		018. Program Pengembangan dan Konservasi Sumber Daya Mineral	Terdatanya sumberdaya mineral	2 Kecamatan	Dinas Pertambangan dan Energi
		015. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tersebarluasnya informasi dan pemasaran pariwisata	4 Pameran	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		016. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun	2 buah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		017. Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya peran serta masyarakat	7 Kelompok	Dinas Kebudayaan dan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			dalam pengembangan kemitraan		Pariwisata
		016. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan	2 Kelompok POKWASMAS	Dinas Perikanan dan Peternakan
		020. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi benih ikan dan produksi perikanan budidaya	3600 ton	Dinas Perikanan dan Peternakan
		021. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap yang berkelanjutan	8208 ton	Dinas Perikanan dan Peternakan
		023. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tercapaiannya Nilai Tambah Produk Perikanan Melalui Peningkatan Industri Pengolahan Hasil Perikanan	12 Kelompok PHP	Dinas Perikanan dan Peternakan
		000. Program pembinaan pedagang kaki lima	Terbinanya pedagang kaki lima	100 wirausaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		015. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	11 kali	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		018. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	3 unit pasar	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		015. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya kapasitas iptek sistem produksi	2 jenis	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		016. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah	600 wira usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		017. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri	200 wira usaha	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		019. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Terpeliharanya penerangan jalan umum	5%	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
		020. Program Penertiban dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar	Terlaksananya operasi penertiban dan terpeliharanya sarana dan prasarana pasar	1 Tahun	Kantor Pengelola Pasar
		019. Program Pengembangan Sumber Energi Alternatif	Termanfaatkannya potensi daerah sebagai bahan energi alternatif	2 Instalasi Biogas	Dinas Pertambangan dan Energi
		020. Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas	Terawasinya pendistribusian BBM dan Gas	5 SPBU, 3 Agen Mitan, 45 Pangkalan Mitan	Dinas Pertambangan dan Energi
		000. Program penyediaan dan pengelolaan air bersih	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih	4 unit sumur bor ABT, 5 paket distribusi pemipaan	Dinas Pertambangan dan Energi
		000. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan)	Meningkatnya produktivitas padi per hektar	6.205	Dinas Pertanian, TPH
			Tersedianya bibit karet, tanaman kehutanan dan tanaman lokal	192.000 batang	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		000. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%) harga konstan	3.10%	Dinas Pertanian, TPH
			Dikenalkannya hasil	3 even	Dinas Kehutanan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			produksi/pengolahan bidang kehutanan dan perkebunan		dan Perkebunan
		000. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	2 jenis teknologi	Dinas Pertanian, TPH
			Terlaksananya peningkatan produksi dan pengolahan hasil kehutanan dan perkebunan	3 kelompok masyarakat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		000. Program peningkatan kesejahteraan petani	Meningkatnya nilai tukar petani (tanaman perkebunan rakyat)	99.02	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
		000. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Terlaksananya peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan	150 ha dan 7 kelompok masyarakat	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	015. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Program Pendidikan Anak Usia Dini	66,30%	Dinas Pendidikan
		016. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Terlaksananya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	8,1 tahun	Dinas Pendidikan
		017. Program Pendidikan Menengah	Terlaksananya Program Pendidikan Menengah	66,16%	Dinas Pendidikan
		018. Program Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Program pendidikan non Formal	40 lembaga pendidikan nonformal	Dinas Pendidikan
		020. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terlaksananya Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	Dinas Pendidikan
		021. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	3 ujian sekolah/ujian nasional	Dinas Pendidikan
		015. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Terpenuhinya obat dan pembekalan kesehatan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan	212.308 jiwa	Dinas Kesehatan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			kebutuhan jumlah maupun jenisnya		
		016. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Mutu pelayanan kesehatan masyarakat	6 laporan, 1 puskesmas BLUD	Dinas Kesehatan
		019. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Tercapainya Rumah Tangga Ber PHBS dari 38% menjadi 53%	Penambahan RT ber PHBS 3%	Dinas Kesehatan
		020. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) dari 60% menjadi 80%, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	Kenaikan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penimbangan (D/S) menjadi 4%/tahun, Tersedianya PMT Bagi Balita Gizi Kurang dan BGM, Gizi Buruk (510 balita), Tersedianya PMT Ibu Hamil KEK (130 org)	Dinas Kesehatan
		021. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Meningkatnya jumlah desa ODF dari 22 desa menjadi 82 Desa	Meningkatnya jumlah desa ODF 10 desa /tahun	Dinas Kesehatan
		022. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Tertanganinya penyakit menular yang berkembang di masyarakat	temuan pneumonia balita 48%, temuan pasien baru TB BTA positif 40%, DBD yang ditangani 100%, penemuan penderita deare 49,9% dan Penanganan Penderita HIV 100%	Dinas Kesehatan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		023. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	Tersusunnya Analisa Standar Belanja Pelayanan Kesehatan dan SOP	Dinas Kesehatan
		028. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kartu hss sehat	135000 jiwa pertahun	Dinas Kesehatan
		029. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap anak	25 orang peserta	Dinas Kesehatan
		030. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya kesehatan lansia pada 50 posyandu	1450 org lansia	Dinas Kesehatan
		031. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 47%	Terlaksananya a pengawasan dan pengendalian kesehatan pada makanan yang umum di konsumsi masyarakat 3850 tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat sebesar 62%	Dinas Kesehatan
		032. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	angka kematian ibu melahirkan 10 orang dan kematian bayi sebanyak 50 orang	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan maksimal 2 orang dan kematian bayi maksimal sebanyak 25 orang	Dinas Kesehatan
		019. Program Peningkatan Mutu Kesehatan	Terselenggaranya kegiatan BLUD	1 tahun	RSUD
		022. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	Terpenuhinya obat & Pembekalan Kesehatan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan	1 tahun	RSUD



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			kebutuhan jumlah maupun jenisnya		
		023. Program Pengadaan, Peningkatan Saran & Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Terpenuhinya sarana pelayanan kesehatan	Rehab Rumah Sakit, Alkes, Aplikasi SIM	RSUD
		018. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya Kualitas Organisasi Perempuan	11 Kec	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
		019. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatnya penguatan kelembagaan gender dan perlindungan anak	2 lembaga	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
		015. Program Keluarga Berencana	Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera	81,18%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
		000. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri	Terselenggaranya jumlah keluarga prasejahtera dan KS 1	21,45%	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
		020. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Berdirinya pusat informasi kesehatan reproduksi remaja	1 kelompok	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
		015. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	Terlaksananya pemberdayaan PMKS	100 kk	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			
		016. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi keluarga korban bencana dan wanita lanjut usia	80 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		017. Program pembinaan anak terlantar	Mampunya anak terlantar melaksanakan fungsi sosialnya	40 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		018. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Tersantuninya dan terbinanya penyandang cacat dan eks trauma	146 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		020. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terbinanya eks penyandang penyakit sosial	509 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		021. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	11 PSKS	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		015. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terwujudnya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	80 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		017. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terwujudnya perlindungan dan pengawasan TK	286 orang	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		015. Program Pengembangan Nilai Budaya	Terlestarikannya dan teraktualisaikan adat budaya daerah	1 budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		016. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terpelihara dan terlestarikannya Benda Cagar Budaya/Situs	23 BCB	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		017. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpelihara dan terlestarikannya Benda Cagar Budaya/Situs, Terlaksananya kegiatan festival seni daerah	4 festival seni daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		016. Program peningkatan peran serta kepemudaan	Terlaksananya Program peningkatan peran serta kepemudaan	3 Kegiatan untuk pelajar dan pemuda	Dinas Pendidikan
		018. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	15 Cabang Olahraga Unggulan	Dinas Pendidikan
		016. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terlaksananya penataan arsip dan dokumen daerah	1 tahun	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
		015. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Mendorong masyarakat meningkatkan minat, budaya dan kebiasaan 1 tahun membaca	1 tahun	Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah
		025. Program Pengembangan Kesejahteraan Keluarga	terlaksananya 10 program pokok PKK	1 Kabupaten, 11 Kecamatan	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
4	Lingkungan Hidup yang Semakin Aman, Nyaman dan Lestari	015. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya kinerja pengelolaan persampahan	51,65%	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
		016. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	100%	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
		019. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Laporan Neraca SDA (1 buku) dan SLHD (2 buku)	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
		024. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Terlaksananya program ruang terbuka hijau (RTH)	RTH Publik = 28% RTH Private = 9%	Dinas LH, Tata Kota dan Perdesaan
				2 kecamatan	Bappeda
		015. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Antisipasi konflik	4 kasus	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
		016. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Terlaksananya pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	156 kali	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
				Sosialisasi 22 kali tingkat kecamatan, rapat KOMINDA 4 kali, rapat FKDM 4 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		017. Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terciptanya kerukunan antar umat beragama	Rapat FKUB 4 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		018. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya Pembangunan wawasan kebangsaan	talkshow 1 kali, penyuluhan PPBN 1 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		020. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Terlaksananya kegiatan pemberantasan pekat di lingkungan Masyarakat	Razia 3 kali, penyuluhan 21 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		021. Program pendidikan politik masyarakat	Terfasilitasinya perselisihan, bantuan parpol termonitoringnya bantuan parpol dan pembinaan Ormas di Kab.	Fasiltasi 4 kali, verifikasi bantuan terhadap 15 parpol, pembinaan	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik



No.	Prioritas	Program	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
			HSS	terhadap Ormas 1 kali, penyuluhan masyarakat 11 kali	
		022. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Sosialisasi 11 kali, pelatihan 1 kali, rapat koordinasi 6 kali, simulasi dan lomba 2 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		031. Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Terlaksananya tanggap darurat bencana	penyediaan logistik dan obat-obatan 2 paket, 2 kali kegiatan tanggap darurat	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
		032. Program Pasca Bencana	Terlaksananya program pasca bencana	tersedianya data dampak bencana 1 dokumen, tersusunnya rencana rehabilitasi dan rekontruksi 1 dokumen, fasilitasi bantuan paska bencana 2 kali	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik